

**PEMBERDAYAAN EKONOMI SOSIAL MASYARAKAT DALAM  
PENGENTASAN KEMISKINAN PERKOTAAN  
(Studi tentang Program Jaring Pengaman Ekonomi Sosial  
di Kelurahan Dinoyo Kota Malang)**

**PROPOSAL SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Disusun oleh:  
**RATIH AYU DEWATY**  
**NIM: 0510313109**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
MALANG  
2009**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : PEMBERDAYAAN EKONOMI SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENGENTASAN  
KEMISKINAN PERKOTAAN.

(STUDI TENTANG PROGRAM JARING PENGAMAN EKONOMI SOSIAL DI  
KELURAHAN DINOYO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG)

Disusun oleh : RATIH AYU DEWATY

NIM : 0510313109

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pembangunan

Malang, Agustus 2009

Komisi Pembimbing,

Ketua

Anggota

Drs. Heru Ribawanto, M.S

Drs. Trilaksono Nugroho, M.S.

## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmadNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” Pembedayaan Ekonomi Sosial Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan Perkotaan.(Studi Tentang Program Jaring Pengaman Ekonomi Sosial di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibundaku dra. Wuryandani Josep, Msi dan Ayahandaku drs. Hari Wahyuono, MM yang penuh kesabaran dan ikhlas telah mengasuh, membesarkan dan membiayai baik materiil maupun spirituil serta mengalirkan doa - doanya untuk kebahagiaan putrinya di dunia maupun akhirat. Kedua adikku Danang dan Bagas yang memotivasi untuk segera lulus dan juga berprestasi dimanapun berada.
2. Bapak Drs. Heru Ribawanto, M.S selaku Ketua Pembimbing, dan Bapak Drs. Trilaksono Nugroho, M.S selaku Anggota Pembimbing yang telah sabar dan menyempatkan waktu padatnya untuk dapat membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak DR. MR Khairul Muluk, Msi selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Prof. DR. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Drs. Suwignyo selaku Lurah di Kelurahan Dinoyo, Ibu dan Bapak selaku staff pada Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
6. Teman-teman tercinta yang telah menemani hari-hariku penulis dalam canda tawa dan persahabatan.

7. Rekan-rekan angkatan 2005 yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Teriring do'a semoga amal yang telah kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. walaupun telah dengan segenap kemampuan, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih perlu adanya koreksi, saran dan kritikan yang konstruktif yang sifatnya membangun agar dapat berhasil dalam penelitian selanjutnya. Akhirnya penulis berharap dengan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua piha yang membacanya. Amin.

Malang, 1 September 2009

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Paradigma Pembangunan dan Pemberdayaan.....	9
1. Pembangunan Daerah.....	9
2. Paradigma Pembangunan.....	10
3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat .....	14
4. Model-model Pemberdayaan Masyarakat.....	17
B. Administrasi Pembangunan.....	24
1. Pengertian Pembangunan.....	24
2. Pengertian Administrasi Pembangunan .....	26
C. Kemiskinan .....	28
1. Pengertian Kemiskinan .....	28
2. Penyebab-Penyebab Kemiskinan.....	29
3. Kemiskinan di Perkotaan .....	30
D. Pengertian Kota .....	32
1. Pengertian Kota dan Perkotaan.....	32
2. Pemerintah Kota.....	34
E. Program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES).....	36
1. Pengertian Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) .....	36
2. Tujuan Program JPES .....	37
3. Ruang Lingkup Program JPES .....	38
4. Organisasi Pelaksana Program JPES .....	40
5. Tahap-Tahapan Program JPES .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A Jenis Penelitian.....	48
B Fokus Penelitian.....	49
C Lokasi Dan Situs Penelitian .....	50
D Sumber Data.....	50
E Teknik Pengumpulan Data.....	51
F Instrumen Penelitian .....	53
G Analisis Data.....	53
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Penyajian Data.....	55
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	55
a. Letak Geografis Kota Malang.....	55
b. Keadaan Demografi Kota Malang .....	56

c. Visi Misi Kota Malang .....	57
2. Gambaran Umum Kelurahan Dinoyo .....	59
a. Luas Dan Batas Wilayah .....	59
b. Kondisi Geografis .....	59
c. Struktur Kelurahan Dinoyo .....	60
d. Potensi Kelurahan Dinoyo .....	60
B. Fokus Penelitian .....	62
1. Proses Pemberdayaan Ekonomi Sosial Masyarakat Perkotaan Melalui Program JPES di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru .....	62
a. Tahap Perencanaan .....	62
b. Tahap Pelaksanaan .....	64
c. Tahap Evaluasi .....	65
2. Hasil yang Telah Dicapai Pelaksanaan JPES di Kelurahan Dinoyo .....	66
a. Pavingisasi dan Pembuatan Gorong-Gorong .....	66
b. Pembangunan Plengsengan Sungai .....	69
c. Pengerukan Sungai Kecil Melintang .....	71
d. Perbaikan MCK .....	74
e. Perbaikan Saluran Air dan Plengsengan .....	77
f. Pengerukan Sungai Besar .....	79
g. Pengerukan Saluran Air .....	82
3. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Terlaksananya JPES di Kelurahan Dinoyo Kota Malang .....	85
a. Faktor Penghambat Program JPES di Kelurahan Dinoyo .....	85
b. Faktor Pendukung Program JPES di Kelurahan Dinoyo .....	87
C. Analisis Data .....	88
1. Proses Pemberdayaan Ekonomi Sosial Masyarakat Perkotaan Melalui Program JPES di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru .....	88
a. Tahap Perencanaan .....	88
b. Tahap Pelaksanaan .....	90
c. Tahap Evaluasi .....	91
2. Hasil yang Telah Dicapai Pelaksanaan JPES di Kelurahan Dinoyo .....	93
a. Pavingisasi dan Pembuatan Gorong-Gorong .....	93
b. Pembangunan Plengsengan Sungai .....	94
c. Pengerukan Sungai Kecil Melintang .....	95
d. Perbaikan MCK .....	97
e. Perbaikan Saluran Air dan Plengsengan .....	98
f. Pengerukan Sungai Besar .....	100
g. Pengerukan Saluran Air .....	101
3. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Terlaksananya JPES di Kelurahan Dinoyo Kota Malang .....	102
a. Faktor Penghambat Program JPES di Kelurahan Dinoyo .....	102
b. Faktor Pendukung Program JPES di Kelurahan Dinoyo .....	104
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Jumlah penduduk Kelurahan Dinoyo 2008	60
2	Rincian penggunaan dana bantuan JPES dalam pavingisasi dan pembuatan gorong-gorong.	67
3	Upah tenaga kerja JPES dalam pavingisasi dan pembuatan gorong-gorong.	68
4	Rincian dana penggunaan dana JPES dalam pembangunan plengsengan sungai.	69
5	Upah tenaga kerja JPES dalam pembangunan plengsengan sungai.	70
6	Rincian penggunaan dana JPES dalam pengerukan sungai kecil melintang	72
7	Upah tenaga kerja JPES dalam pengerukan sungai.	73
8	Rincian penggunaan dana JPES dalam pembangunan MCK	75
9	Upah tenaga kerja JPES dalam pembangunan MCK	76
10	Rinsian penggunaan dana JPES dalam perbaikan saluran air dan plengsengan	77
11	Upah tenaga kerja JPES dalam perbaikan saluran air dan plengsengan	78
12	Rincian penggunaan dana JPES dalam pengerukan sungai besar	80
13	Upah tenaga kerja JPES dalam pengerukan sungai besar	81
14	Rincian penggunaan dana JPES dalam pengerukan sungai besar	83
15	Upah tenaga kerja JPES dalam pengerukan sungai besar	84

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Lingkaran setan kemiskinan	21
2	Peta Kota Malang	55





## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul
1	Surat Keterangan Riset
2	Surat Keterangan dari Bakesbanglinmas
3	Surat Keterangan dari Kecamatan Lowokwaru
4	Surat Keterangan dari Kelurahan Dinoyo
5	Peraturan yang Mendasari Program JPES
6	Foto Kegiatan JPES di Kelurahan Dinoyo
7	Peta Kota Malang



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan oleh setiap bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada undang - undang no.32 tahun 2004 dimana telah terjadi pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yakni dari pola sentralisasi ke pola desentralisasi berupa pemberian otonomi kepada daerah. Pelaksanaan dari undang-undang no.32 tahun 2004 menganut prinsip :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta potensi, dan keanekaragaman daerah.
2. Harus lebih meningkatkan kemandirian daerah.
3. Didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
4. Harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga terjalin hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah serta antar daerah.

Berdasarkan prinsip - prinsip tersebut, paradigma peran pemerintah bergeser dan berubah yaitu dari pelaksana menjadi fasilitator, dari pemberian instruksi menjadi melayani masyarakat dan dari mengatur menjadi memberdayakan masyarakat.

Kegagalan pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan pada dasarnya karena pembangunan yang dilaksanakannya kurang memperhatikan partisipasi masyarakat dimana masyarakat hanya dijadikan obyek pembangunan bukan sebagai subyek pembangunan.

Kemiskinan di Indonesia sendiri telah terjadi baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Kompleksnya masalah dalam perkotaan telah mengakibatkan salah satu dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu dalam masalah kemiskinan itu sendiri.

Pelajaran dari masalah kemiskinan menyadarkan bahwa ekonomi nasional harus dibangun dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya domestik baik meliputi sumber daya alam dan tenaga kerja secara berkeadilan dalam perspektif

ini berarti kemiskinan harus menjadi tanggung jawab bersama sehingga penanggulangannya menuntut keikutsertaan aktif semua pihak. Oleh karena itulah, muncul sebuah konsep yang diharapkan dapat menjawab permasalahan kemiskinan di Indonesia. Konsep tersebut sebagai salah satu pendekatan dalam pengelolaan pembangunan yang sesuai dengan amanat undang - undang No.32 Tahun 2004, yaitu melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Munculnya gagasan dan kesadaran untuk penataan kembali strategi pembangunan seiring dengan perubahan paradigma pembangunan dunia ke arah *people centered development* yang lebih bernuansa pemberdayaan masyarakat, nampaknya juga telah mulai mengubah arah pembangunan ekonomi Indonesia dimana adanya keterlibatan secara aktif masyarakat di dalam perekonomian (ekonomi kerakyatan) disertai desentralisasi manajemen pembangunan. Aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat harus dilakukan secara optimal dan benar - benar menyentuh pada upaya memperbaiki keadaan sekaligus mampu mengangkat kondisi ekonomi masyarakat miskin, minimal pada tataran kemampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, dan konsekuensi dari harapan ini sudah tentu berorientasi pada pemberian kewenangan dan kekuatan, untuk mengakses sumber daya ekonomi yang tersedia secara optimal yang pada gilirannya mereka dapat berdaya dari kondisi keterpurukan ekonomi yang melilit. Pemberdayaan ekonomi masyarakat mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga melalui langkah - langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat. Pemberdayaan ekonomi rakyat diarahkan dalam upaya mendorong perubahan struktural yaitu dengan memperkuat kedudukan, dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian. Dengan demikian pelaku ekonomi rakyat mampu menikmati yang dihasilkan dan seterusnya mampu menghasilkan untuk dinikmati secara berlanjut.

Suatu bahan evaluasi berbagai program yang dilakukan pemerintah Indonesia selama ini secara konseptual telah mengedepankan aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai contoh program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Inpres Desa Tertinggal ( IDT ), Program Pengembangan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT) dengan pendanaan lembaga

internasional, Jaring Pengaman Sosial (JPS), Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE). Meski tidak bisa dikatakan bahwa berbagai program tersebut gagal total, tetapi tidak bisa dikatakan pula bahwa program tersebut telah berhasil terutama berkaitan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada implementasinya, program tersebut kurang melibatkan partisipasi masyarakat dan peran serta pemerintah masih sangat dominan.

Pentingnya pengkajian masalah - masalah perkotaan dan masalah kemiskinan di perkotaan, adalah karena kedudukan kota - kota dalam masyarakat negara tersusun dalam suatu jaringan yang bertingkat - tingkat dan merupakan pusat penguasaan atau pendominasian bagi pengaturan kesejahteraan kehidupan warga masyarakat negara. Sistem pendominasian yang berpusat di kota - kota secara bertingkat - tingkat tersebut bukan hanya melibatkan aspek - aspek politik dan administrasi saja tetapi juga melibatkan aspek - aspek ekonomi, sosial, budaya dan komunikasi, karena itu dalam kenyataan sosial yang ada masyarakat manapun di dunia cenderung berorientasi ke kota dalam arti lain orang desalah yang berorientasi ke kota. Karena itulah kota cenderung tumbuh dan menjadi kompleks. Kompleks tersebut bisa dilihat dari kota yang mempunyai potensi atau kemampuan untuk menampung pendatang baru dari pedesaan atau dari kota - kota lainnya. Kemampuan atau potensi kota untuk menampung pendatang baru untuk dapat hidup di wilayahnya adalah corak sistem ekonomi di daerah perkotaan yang lebih menekankan pada pekerjaan - pekerjaan dalam bidang industri.

Dengan demikian di daerah perkotaan kalau dibandingkan di daerah pedesaan lebih banyak terdapat alternatif - alternatif pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Sedangkan di daerah pedesaan, yang penekanan sistem ekonominya pada penghasilan bahan - bahan makanan dan bahan - bahan mentah, sehingga sistem ekonomi lebih terbatas daripada di perkotaan. Sehingga ukuran atau tolak ukur yang dapat dipakai untuk menentukan kemiskinan di pedesaan juga dapat dibuat secara lebih sederhana yang dapat mencakup keseluruhan daerah pedesaan sesuai dengan pengkategorisasian corak atau tingkat desa yang dibuat.

Walaupun alternatif - alternatif untuk memperoleh pekerjaan lebih terbuka di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan, kemiskinan di daerah perkotaan

tetap ada atau laten karena potensi - potensi yang ada ( lingkungan fisik dan alam, sistem sosial dan kebudayaan ), tidak atau belum dapat dimanfaatkan untuk menciptakan alternatif - alternatif baru atau tidak dapat memberikan nafkah yang cukup memadai bagi sebagian besar para warganya. Atau kebudayaan yang ada dalam masyarakat perkotaan tersebut tidak mendorong untuk adanya kemungkinan bagi pengembangan tingkat pemanfaatan sumber daya yang secara obyektif sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi dan sosial pada warga masyarakatnya.

Menurut Berita Resmi Statistik BPS No. 37/07/Th. XI, 1 Juli 2008 jumlah penduduk miskin ( penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan ) di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang ( 15,42 persen ). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta orang ( 16,58 persen ), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,21 juta orang.

Selama periode Maret 2007 - Maret 2008, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,42 juta orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,79 juta orang.

Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2008, sebagian besar ( 63,47 persen ) penduduk miskin berada di daerah perdesaan.

Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam melaksanakan program penanganan kemiskinan diarahkan pada konsep pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sehingga program penanganan kemiskinan yang dilaksanakan memiliki kekhususan - kekhususan yang terkait dengan situasi dan kondisi maupun tujuan masing - masing program. Sesuai paradigma yang berkembang pada saat ini, agar program penanggulangan kemiskinan dapat memberi hasil yang nyata maka dibutuhkan model dan upaya yang terfokus pada proses pemberdayaan, revitalisasi sistem nilai setempat, pengakuan pada potensi lokal dan manajemen program yang solid.

Sehingga atas dasar itulah Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada Tahun 2007 ini dalam rangka penanganan masalah kemiskinan dan menindaklanjuti PAM - DKB telah menetapkan Program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial

( JPES ) Propinsi Jawa Timur Tahun 2007. Program ini merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang dirancang secara khusus untuk menyelamatkan sekaligus mempersiapkan fondasi bagi pengembangan keberdayaan masyarakat miskin secara nyata dengan memanfaatkan potensi lokal. Tujuan daripada program JPES pada umumnya sebagai berikut : ( <http://www.probolinggo.go.id> )

- a. Program JPES merupakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat kelurahan melalui penguatan pendapatan masyarakat yang mengkhhususkan pada peningkatan jumlah kegiatan pembangunan di kelurahan melalui stimulan Program JPES Propinsi Jawa Timur dalam mendorong program pembangunan kelurahan.
- b. Penyediaan lapangan kerja produktif bagi tenaga kerja warga masyarakat setempat di lokasi kegiatan pembangunan Infrastruktur.
- c. Pendayagunaan tenaga warga masyarakat lokal.
- d. Peningkatan produktivitas dan kebersamaan serta rasa memiliki masyarakat setempat terhadap pembangunan infrastruktur.
- e. Penguatan kelembagaan dan keswadayaan masyarakat lokal.
- f. Peningkatan SDM masyarakat lokal Kelurahan melalui kegiatan nyata.

Kegiatan Program JPES Tahun 2007 yang dibiayai dari dana APBD Propinsi Jawa Timur difokuskan pada kegiatan Padat Karya untuk pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat., yang pelaksanaannya melibatkan peran aktif masyarakat khususnya masyarakat miskin setempat.

Sasaran Program JPES Tahun 2007 adalah masyarakat keluarga miskin ( Gakin ) di kelurahan yang terdaftar dalam data BPS melalui Pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005 ( PSE – 05 ) yang telah diperbaharui tahun 2006.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/6496/022/2008 tentang Alokasi Dana Bantuan Sosial Program JPES Propinsi Jatim Tahun 2008. Pelaksana kegiatan Padat Karya Program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial ( JPES ) di tingkat Kelurahan adalah Kelompok Masyarakat ( Pokmas ) yang telah dibentuk melalui musyawarah kelurahan. Pokmas bertugas untuk merencanakan usulan kegiatan dan melaksanakan kegiatan padat karya di wilayah kelurahannya dengan bantuan Tim Pembina Kelurahan dan Pendamping Pokmas. Adapun

Pokmas yang telah terbentuk di masing - masing kelurahan dan kegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah kemiskinan di perkotaan telah membawa dampak negatif pada kehidupan masyarakat di perkotaan itu sendiri. Untuk itu dalam penulis mengambil judul **“Pemberdayaan Ekonomi Sosial Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Perkotaan .”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat disusun rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat perkotaan melalui program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial ( JPES ) di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?
2. Bagaimanakah hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial ( JPES ) di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?
3. Apa sajakah faktor - faktor penghambat dan pendukung terlaksananya program JPES di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan proses pemberdayaan masyarakat perkotaan melalui program JPES di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program JPES di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
3. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor - faktor penghambat dan pendukung terlaksananya program JPES di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

## **D. Kontribusi Penelitian**

### **1. Bagi Mahasiswa**

- a. Dapat mengenal lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- b. Dapat menguji kemampuan pribadi dalam berkreasi pada bidang ilmu yang dimiliki serta dalam tata cara hubungan masyarakat di lingkungan kerjanya.
- c. Memperdalam dan meningkatkan ketrampilan dan kreativitas diri dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.
- d. Dapat menyiapkan langkah - langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan kerjanya di masa datang.
- e. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman selaku generasi yang dididik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di lingkungan kerjanya.

### **2. Bagi Fakultas Ilmu Administrasi**

- a. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program atau kurikulum yang telah diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat pengguna lulusan program.
- b. Untuk memperkenalkan instansi pendidikan Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya kepada instansi yang membutuhkan lulusan atau tenaga kerja yang dihasilkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

### **3. Bagi Instansi yang bersangkutan**

- a. Merupakan sarana untuk alih ilmu di bidang administrasi khususnya administrasi Publik dan lain - lain bagi kemajuan instansi yang bersangkutan.
- b. Merupakan sarana penghubung antara instansi dan Lembaga Pendidikan Tinggi.



- c. Sebagai sarana untuk memberikan pertimbangan dalam menentukan kriteria lulusan yang dibutuhkan oleh instansi yang bersangkutan, dilihat dari segi sumber daya manusia yang dihasilkan Lembaga Pendidikan Tinggi.

### **E. Sistematika Bahasan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 ( lima ) bab yang merupakan rangkaian antar bab yang satu dengan lainnya. Adapun penulisan sistematika ini adalah sebagai berikut :

- Bab I : Merupakan pendahuluan yang meliputi penjelasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, serta sistematika bahasan.
- Bab II : Merupakan penjelasan tentang kajian pustaka / kajian teori yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu dengan teori yang berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat pada kelurahan Dinoyo.
- Bab III : Menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan yang menyangkut jenis penelitian, variabel dan indikator serta item - item yang digunakan dan pegukurannya, sumber data, populasi dan sampling, instrument penelitian, validasi dan analisis data.
- Bab IV : Menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang memuat penyajian data dan analisis data.
- Bab V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan, dan saran yang merupakan rekomendasi tentang studi lanjutan / kebijakan - kebijakan yang akan datang.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Paradigma Pembangunan dan Pemberdayaan

#### 1. Pembangunan Daerah

Istilah pembangunan daerah bermakna sangat kompleks sehingga terdapat banyak pengertian yang berkaitan dengannya. Pada awalnya, istilah ini bermakna kegiatan yang ditujukan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah (propinsi, kabupaten atau kota). Namun pengertian ini dianggap memiliki beberapa kelamahan karena belum mengaitkan antara pembangunan daerah dengan perkembangan penduduk. Konsep yang lahir kemudian adalah konsep pembangunan daerah yang lebih menekankan pada aspek peningkatan pendapatan berkapita. Ini berarti bahwa pembangunan daerah harus menekankan pada aspek kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan hasil (*output*) yang melebihi tingkat pertumbuhan penduduk.

Konsep inipun mengalami nasib serupa karena dianggap terlalu economic centrist. Beberapa konsep pembangunan daerah yang economic centris tersebut menghasilkan konsep pembangunan daerah yang multidimensional. Meskipun terdapat beragam corak pemikiran, namun konsep pembangunan daerah yang multidimensional tadi menghendaki adanya cakupan yang lebih luas seperti menurut Nugroho (2007: 62) sebagai berikut :

- Life sustenance*, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan) bukan untuk to be more tetapi untuk mempertahankan hidup.
- Self esteem*, pembangunan daerah harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai manusia.
- Liberation*, kebebasan setiap insan untuk berkembang (jiwa dan raga) dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan daerah.

Jika dalam pengertian yang pertama tentang pembangunan daerah kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh siapapun, tanpa harus ada partisipasi maka pada pengertian yang kedua kegiatan tersebut harus dilakukan secara kemitraan, harus ada penciptaan lapangan pekerjaan. Disamping itu, juga harus meningkatkan dan menggairahkan ekonomi daerah. Apabila dalam pengertian pertama kurang memperhatikan kekhasan suatu daerah, penggunaan sumber daya lokal dan inisiatif lokal, pada pengertian yang terakhir justru sebaliknya. Pembentukan dan

penguatan institusi lokal, perbaikan kapasitas tenaga kerja, dan lain - lain menjadi perhatian pertama dari konsep pembangunan daerah yang lebih belakangan. Dengan kata lain , konsep yang terakhir menekankan pada kualitas sumber daya lokal, peluang kerja untuk masyarakat, serta inisiatif dan partisipasi serta kemitraan antara unsur yang ada.

## 2. Paradigma Pembangunan

Dahulu negara berkembang disebut sebagai negara dunia ketiga atau negara - negara terbelakang. Dunia pertama itu disebut juga dunia bebas atau blok Atlantik meliputi negara Amerika Utara dan Eropa yang Komunis. Dunia kedua merupakan negara Eropa Timur yang blok Komunis atau kelompok Uni Sovyet. Sementara dunia ketiga meliputi sisa dari dua "dunia" itu dan dengan jumlah terbanyak yang meliputi Asia, Afrika dan Amerika Latin dengan dasar pembangan dilihat dari kemajuan sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Horowis dalam Nugroho ( 2007: 9 ).

Keterbelakangan negara - negara dunia ketiga yang sekarang menyebut dirinya negara berkembang itu menurut Szentes dalam Nugroho ( 2007: 9 ) dapat dilihat dari lima segi:

- a. Negara itu dianggap terbelakang karena keterbelakangan sumber daya.
- b. Keterbelakangan itu dianggap sebagai keterlambatan dalam arti lingkaran setan *static ( static vicious circle )* atau sistem dengan keseimbangan stabil semu ( *quasi - stable equilibrium system* ).
- c. Hal ini dapat dipandang sebagai keterkaitan pada tradisi ( *tradisional society* ).
- d. Keterbelakangan dianggap sebagai kondisi yang bersifat historis sebagai kesenjangan yang terjadi antara negara maju dengan negara yang belum maju.
- e. Keterbelakangan dipandang sebagai akibat ketidakseimbangan dalam hubungan internasional.

Selain itu, beberapa pakar seperti Horowitz, Todaro, School dalam Nugroho ( 2007: 9 ) mengungkapkan karakteristik negara berkembang yang pada umumnya menyangkut bidang ekonomi dan sosial sebagai berikut :

- a. Tingkat kehidupan yang rendah ditandai dengan rendahnya pendapatan perkapita, rendahnya tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, dan kurangnya pemerataan.
- b. Makanan kurang yang didasarkan pada ukuran kalori. Seseorang dianggap kekurangan makan bila makanannya bergizi rendah, yaitu rata - rata

kurang dari 2.500 kalori. Dengan ukuran itu pada 1959 sekitar 70% penduduk dunia kekurangan makanan.

- c. Struktur agraria lemah. Penduduk yang bekerja dibidang pertanian 55% - 80%, sedangkan negara maju dibawah 20% bahkan ada yang hanya 5 %. Data itu menunjukkan kalau produksi sangat rendah dan gejala tersebut juga dikatakan sebagai gejala pertanian subsistem ( *subsistence agricultural* ).
- d. Industri kurang berkembang yang ditunjukkan fakta kecilnya presentase tenaga kerja terserap disektor industri. Data di Asia dan Afrika 10% dan 11%, sedangkan di Amerika Utara dan Eropa 37% dan 42%.
- e. Sumber tenaga kerja yang dibangkitkan dengan mesin sangat kurang. Jika penggunaan tenaga dianggap setara dengan 1 ton batu bara, di AS setiap penduduk menggunakan 8 ton, sedangkan di Asia 0,3 ton.
- f. Ketergantungan ekonomi suatu negara berkembang pada negara maju dibidang ekonomi misalnya bantuan luar negeri. Termasuk dalam pengertian ini yakni pola ekspor yang mengandalkan 1 jenis komoditi saja seperti minyak bumi, kopi.
- g. Perkembangan ekonomi yang pincang. Sektor perdagangan dan jasa di negara berkembang terlalu maju jika dibanding sektor pertanian dan industri.
- h. Struktur sosial lemah. Sebagian besar sistem sosial masih didominasi struktur feodal atau semifeodal. Padahal struktur feodal kurang menunjang modernisasi.
- i. Kelas menengah tidak begitu maju, tetapi di negara dunia pertama justru kelas ini memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi.
- j. Kurangnya integrasi nasional yang ditandai dengan ketidakstabilan politik.
- k. Pengangguran terselubung terjadi dalam jumlah ( angka ) yang besar. Dalam konsep ini termasuk penggunaan waktu yang tidak penuh dan inefisiensi pelaksanaan pekerjaan.
- l. Tingkat pendidikan lebih rendah daripada negara maju.
- m. Angka kelahiran tinggi hingga mencapai 40 - 45 per 1000, sedangkan di negara maju 25 per 1000.
- n. Kesehatan buruh yang ditunjukkan dengan angka kematian yang tinggi, seperti di Afrika 28 - 32 per 1000. Dikalangan balita angka kematian itu jauh lebih tinggi, mencapai lebih dari 10 kali lipat dibandingkan di negara maju.
- o. Orientasi tradisional yang berarti orang sangat bergantung pada kekuatan alam secara langsung.
- p. Laju perkembangan negara maju sangat konsisten, berarti memperlihatkan peningkatan secara terus - menerus. Meski dulu sempat terjadi depresi ekonomi, namun bagi negara dunia pertama hal itu hanya merupakan guncangan jangka panjang terhadap kecenderungan jangka panjang yang terus bergerak naik dan mantap. Sebaiknya justru banyak terjadi di negara berkembang.

Menurut Nugroho ( 2007: 11 ) ada tiga konsep yang mendasari paradigma pembangunan diantaranya adalah :

a. Paradigma Pertumbuhan

Konsep paradigma pertumbuhan ( *growth paradigma* ) merupakan asas pemikiran yang memperjuangkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan negara untuk mengejar ketertinggalan. Sasaran utama dari paradigma pertumbuhan adalah menciptakan kondisi masyarakat dan negara yang lebih baik dengan mengusahakan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dan negara.

Pemerintah Indonesia dan negara sedang berkembang lainnya ( seperti Malaysia ) telah menerapkan paradigma pertumbuhan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan pemerataan pendapatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendapatan ini telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, walaupun belum mampu mengatasi masalah kemiskinan secara tuntas. Disisi lain paradigma pertumbuhan ini mengandung eksternalitas negatif yang tidak diharapkan yaitu jurang pemisah yang cukup lebar antara si kaya dan si miskin. Teori pembangunan yang paling menekankan peningkatan pendapatan berkapita ini mempunyai asumsi bahwa kalau sudah terjadi peningkatan pada suatu sektor, selanjutnya akan terjadi *trickle - down effect* atau efek menetes kebawah. Pendekatan pertumbuhan ( *economic growth development* ) dengan tetesan kebawah ( *trickle - down effect* ) yang begitu dominan kandas ditengah jalan. Pembangunan yang lebih menonjolkan infrastruktur fisik justru memunculkan ketimpangan sosial ekonomi secara meluas. Pembangunan yang dilakukan membawa implikasi munculnya disparatis dan ketergantungan. Intinya pertumbuhan pendapatan tersebut tidak disertai pendapatan masyarakat. Ide tetesan kebawah tidak dapat diwujudkan secara proporsional karena pertumbuhan yang terjadi hanya dinikmati oleh kaum elit, sedangkan masyarakat kecil hanya menerima sebagian kecil dari efek pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang seharusnya menempatkan kaum miskin dan tidak berdaya menjadi prioritas, tetapi pembangunan berbasis pertumbuhan justru memperlakukan pemilik modal sebagai “ primadona ” yang dibanjiri oleh fasilitas dan kemudahan.

Paradigma pertumbuhan pada intinya meningkatkan pendapatan masyarakat agar dapat menyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, meskipun permasalahan kemiskinan belum bisa teratasi secara maksimal.

b. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

Adanya kenyataan bahwa hasil - hasil pembangunan tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat telah mengkondisikan ketimpangan dan ketergantungan. Oleh karena itu pemerintah menerapkan paradigma baru yaitu paradigma pembangunan berkelanjutan.

Paradigma pembangunan berkelanjutan menawarkan konsep pembangunan yang bersifat ramah lingkungan, yang pada dasarnya pembangunan hendaknya memperhatikan masalah sumber daya yang bersifat *renewable / non - renewable*. Dengan demikian pemakaian segenap potensi dan studi pembangunan akan disertai kebijakan pemeliharaan.

Dalam hal ini sangat diperhitungkan dampak yang akan terjadi jika pembangunan dilakukan secara terus menerus yang berakibat langkanya sumber daya alam.

c. Paradigma *Human Development*

Belajar dari kegagalan maka pendekatan pembangunan menggunakan paradigma baru yang lebih humanis, yaitu pendekatan pembangunan yang memperhatikan lingkungan dan pembangunan berwajah manusiawi. Pendekatan ini memprioritaskan pembangunan sosial dan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan strategi *sustainable development*. Pembangunan berpihak kepada rakyat, bukan elit penguasa. Dengan demikian konsentrasi pembangunan lebih pada ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan fasilitas pembangunan usaha kaum lemah.

Pembangunan yang berbasis manusia mencakup pembangunan masyarakat ( *community based development* ) dan pembangunan manusia ( *people centered development* ). Paradigma kekuasaan ini berusaha mengangkat martabat manusia sebagaimana mestinya sebagai makhluk

yang memiliki harga diri, kemampuan intelegensi dan kekuasaan. Manusia tidak dapat disamakan dengan alat produksi untuk melipat gandakan hasil semata, hendaknya manusia dihargai dan dihormati dengan cara meningkatkan kualitas SDM sehingga menempatkan manusia pada martabat yang lebih baik.

Dari ketiga paradigma pembangunan yang ada diatas, paradigma *Human Development* adalah paradigma yang sempurna. Dimana aspek manusia dan lingkungan manusia sangat diperhatikan demi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

### 3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Hikmat, Hary ( 2004: 1 ), konsep pemberdayaan ( *empowerment* ) mulai tampak ke permukaan sekitar dekade tahun 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an ( akhir abad ke 20 ). Kemunculan konsep ini hampir bersamaan dengan aliran - aliran, seperti eksistensialisme fenomenologi, dan personalisme. Konsep pemberdayaan dipandang sebagai bagian dari aliran yang muncul pada paruh abad ke 20 yang lebih dikenal dengan *post - modernism*. Muncullah konsep pemberdayaan merupakan akibat dari aksi dan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat, dan tata budaya sebelumnya yang berkembang disuatu negara.

Kegagalan arus utama model pengembangan ekonomi berupa ketidakmampuan memecahkan masalah kemiskinan dan keberlangsungan lingkungan membutuhkan sebuah alternatif pembangunan yang memberdayakan masyarakat. Friedman dalam Nugroho ( 2007: 24 ) berpendapat bahwa pembangunan alternatif tersebut harus lebih dipusatkan pada manusia dan lingkungan daripada produksi dan laba. Pendekatan pertumbuhan ekonomi yang memakai pandangan perusahaan yang sebagai dasar ekonomi neoklasik. Pembangunan alternatif yang memberdayakan manusia harus didasarkan pada lingkungan kehidupan sosial dilihat dari sudut pandang kerumahtanggaan.

Parson dalam Nugroho ( 2007: 25 ) menyatakan bahwa konsep *power* dalam masyarakat adalah variabel jumlah. Menurut perspektif tersebut *power* masyarakat adalah kekuatan anggota masyarakat secara keseluruhan yang disebut

tujuan kolektif. Logikanya pemberdayaan masyarakat miskin dapat dicapai jika ditunjang oleh struktur sosial yang tidak berpengaruh negatif kepada kekuasaan ( *powerfull* ). Dengan kata lain, kelompok miskin dapat diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat berperan sebagai agen pembangunan.

Sejak tahun 1960, lahir sebuah konsep pemberdayaan komunitas yang disebut *Community Development* ( selanjutnya disebut CD ). CD adalah sebuah proses pembangunan jejaring interaksi dalam rangka meningkatkan kapasitas dari sebuah komunitas, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan kualitas hidup masyarakat ( *United States Departement of Agriculture, 2005* ). CD tidak bertujuan untuk mencari dan menetapkan solusi, struktur penyelesaian masalah atau menghadirkan pelayanan bagi masyarakat. CD adalah bekerja bersama masyarakat sehingga mereka dapat mendefinisikan dan menangani masalah, serta terbuka untuk menyatakan kepentingan - kepentingannya sendiri dalam proses pengambilan keputusan ( *Standing Conference for Community Development, 2001* ).( <http://fiqihisantoso.wordpress.com> )

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya orang - orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki oleh seseorang semakin baik pula kemampuan berantisipasinya.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, pengertian pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata “ *empowerment* ” yaitu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Wahyono dalam Nugroho ( 2007: 25 ) menyatakan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri ( *self - reliant communities* ) sebagai suatu sistem yang mengorganisasikan diri mereka sendiri.



Pendekatan pemberdayaan masyarakat seperti itu diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek tetapi sebagai pelaku yang menentukan hidup mereka.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat kepada manusia ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal ( *community - based resource management* ) sebagai mekanisme perencanaan *people centered development* yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial ( *social learning* ) dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya ( *empowerment* ).

Soegijono dkk (2004:26) menyatakan bahwa terdapat 3 pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin, yakni:

- a. Pendekatan yang terarah artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah dan berpihak kepada orang miskin.
- b. Pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi.
- c. Pendekatan pendampingan, artinya dilakukan selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian.

Pemberdayaan masyarakat (*community development*) telah diwacanakan di Indonesia sejak dekade 1960. Dari aspek keterlibatan masyarakat, terdapat 3 (tiga) bentuk pemberdayaan masyarakat, yaitu: (<http://fasilitator-masyarakat.org>)

- a. *Development for community.*

Dimana dalam proses pembangunan, masyarakat sebagai obyek karena penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh pihak luar.

- b. *Development with community*

Ditandai secara khusus dengan kuatnya pola kolaborasi antara aktor luar dan masyarakat setempat. Keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama dan sumber daya yang dipakai berasal dari kedua belah pihak.

- c. *Development of community*

Merupakan proses pembangunan yang baik inisiatif, perencanaan, dan pelaksanaannya dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. Masyarakat

membangun dirinya sendiri. Peran aktor dari luar dalam kondisi ini lebih sebagai sistem pendukung bagi proses pembangunan.

Ketiga pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu memperbaiki kualitas kehidupan dan kelembagaan masyarakat lokal. Perbedaan yang ada lebih berada pada sarana (means) yang dipakai. Efektivitas sarana ini sangat ditentukan oleh konteks dan karakteristik masyarakat yang dihadapi. Pada masyarakat tertentu mungkin pendekatan *development for community* lebih sesuai sementara pada masyarakat yang lain *development with community* justru yang dibutuhkan. Faktor utama yang menentukan pemilihan ketiga pendekatan tersebut adalah seberapa jauh kelembagaan masyarakat telah berkembang. Pada masyarakat yang kelembagaannya sudah lebih berkembang *development of community* akan lebih tepat.

#### 4. Model-Model Pemberdayaan Masyarakat

Pada dasarnya, pedapat pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat (khususnya yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan) didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan peri kehidupan mereka. Terdapat 4 strategi yang ditawarkan dalam memberdayakan masyarakat di tingkat kelurahan menurut Nugroho (2007:27) yaitu:

- a. Memberdayakan masyarakat dengan “menyosialisasikan” peran masyarakat sebagai subyek.
- b. Mendayagunakan “mekanisme” penyelenggaraan pembangunan /pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif/demokrasi, efektif dan efisien.
- c. Mobilisasi “sumber daya” manusia seperti tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai profesionalismenya.
- d. Memaksimalkan peran pemerintah khususnya pemerintahan kelurahan dalam memfasilitasi dan mengatur agar penyelenggaraan pembangunan /pemberdayaan masyarakat berjalan lancar.

Selain itu, untuk memberdayakan masyarakat tentu harus melalui proses pendekatan yang tidak membuat aneh kaget serta curiga masyarakat sehingga pemberdayaan dapat diterima oleh masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh tokoh gerakan pembangunan masyarakat China, Y.C dalam Islamy (2007:27) menyatakan bahwa setiap penggerak pembangunan yang akan memberdayakan masyarakat harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Go to people*, mendatangi masyarakat yang hendak diberdayakan.
- b. *Live among the people*, hidup dan tinggallah dengan mereka agar kita mengenal dengan baik kepentingan dan kebutuhannya.
- c. *Learn from the people*, belajarlh dari mereka supaya dapat dipahami apa yang ada dibenak mereka, potensi apa yang mereka miliki.
- d. *Plan with the people*, ajak dan ikut sertakan mereka dalam proses pelaksanaan rencana.
- e. *Work with the people*, ajak dan libatkan mereka dalam proses perencanaan rencana.
- f. *Start with what the people know*, mulailah dari apa yang masyarakat ketahui dan pahami.
- g. *Build on what the people have*, bangunlah sesuatu dari modal yang dimiliki masyarakat.
- h. *Teach by showing, learn by doing*, ajarilah masyarakat dengan contoh konkret atau nyata.
- i. *Not a showcase, but a pattern*, mereka jangan dipameri dengan sesuatu yang menyilaukan, tetapi berikanlah kepada mereka suatu pola.
- j. *Not odds and ends, but a system*, jangan tunjukkan kepada mereka sesuatu yang aneh dan akhir dari segalanya tetapi berikanlah kepada mereka suatu sistem yang baik dan benar.
- k. *Not piecemeal, but integrated approach*, jangan menggunakan pendekatan yang sepotong-sepotong, tetapi pendekatan menyeluruh dan terpadu.
- l. *Not to conform but to transform*, bukan penyesuaian cara/model tapi transformasi model.
- m. *Nor relief but release*, jangan berikan penyelesaian akhir kepada mereka tetapi beri kebebasan kepada mereka sendiri untuk menyelesaikan masalahnya.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Menurut Craig dan Mayo dalam Nugroho (2007:28), partisipasi merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Strategi pemberdayaan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai isu pertama pembangunan saat ini. Partisipasi masyarakat didunia ketiga dinilai sebagai strategi aktif untuk meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Dengan partisipasi pembangunan dapat menjangkau masyarakat terlemah dengan upaya membangkitkan semangat hidup untuk menolong diri sendiri. Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat terkait dengan efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan jaminan bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, model memiliki arti contoh, pola, acuan, ragam, macam, dan sebagainya. Sementara itu, pengertian pemberdayaan

adalah peningkatan kemampuan dan kemandirian sehingga orang atau lembaga tersebut yang bersangkutan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Beberapa model pemberdayaan masyarakat antara lain menurut Nugroho (2007:29):

a. Model *People Centered Development*

Menurut model ini pembangunan kualitas manusia adalah upaya meningkatkan kapasitas manusia adalah upaya meningkatkan kapasitas manusia untuk memengaruhi dan mengatur masa depannya. Korten dalam Nugroho (2007:29) menyebutkan model pembangunan ini adalah sebagai *People centered development*. Model ini mencoba mengangkat martabat manusia sebagai mana mestinya sebagai makhluk yang mempunyai harga diri, kemampuan inteligensi, dan perasaan. Manusia tidak bisa disamakan dengan alat produksi untuk melipatgandakan hasil sementara, melainkan manusia hendaknya dihargai dan dihormati. Dengan meningkatkan kualitas SDM maka akan menempatkan manusia pada masyarakat yang lebih baik.

Contoh program yang menerapkan model ini antara lain program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Proyek Kawasan Terpadu (PKT), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Beras Untuk Orang Miskin (RASKIN), Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program-program tersebut dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan dan membantu masyarakat agar bisa keluar dari perangkap kemiskinan. Meskipun demikian, program-program tersebut sedikit banyak telah mengalami kegagalan. Sebagaimana diidentifikasi oleh Sutrisno dalam Nugroho (2007:30) sebab-sebab kegagalan itu diantaranya:

- 1) Program itu dilaksanakan pemerintah atas dasar persepsi dan asumsi yang keliru terhadap sebab munculnya kemiskinan.
- 2) Perencanaan program anti kemiskinan dilakukan secara uniform
- 3) Lemahnya monitoring pemerintah terhadap pelaksanaan program anti kemiskinan.
- 4) Kurangnya dukungan penelitian perihal masalah-masalah kemiskinan

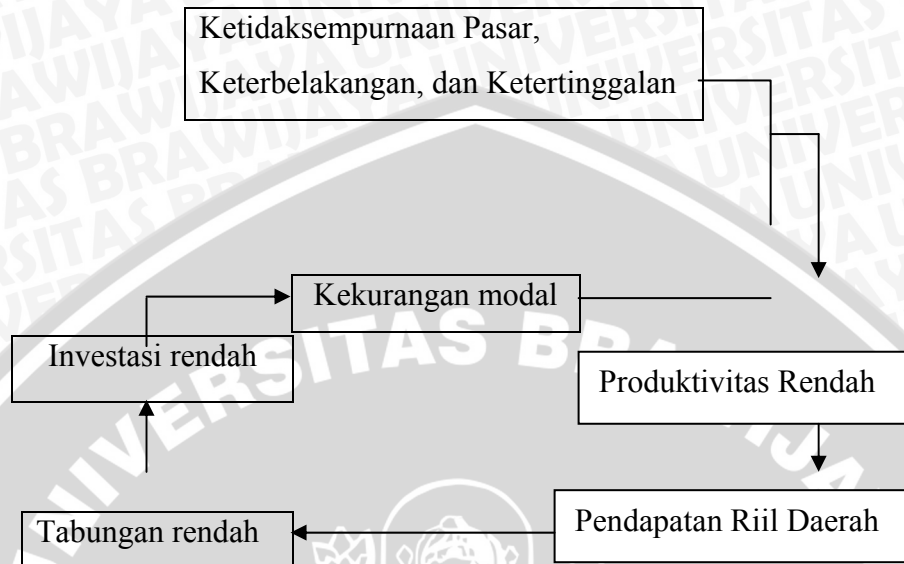
- 5) Tertutupnya sikap pemerintah terhadap masalah-masalah kemiskinan
- 6) Justru melahirkan sikap ketergantungan dari masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan demikian jelas kiranya martabat manusia sangat diperhatikan. Lebih baik membangun manusianya terlebih dahulu, karena jika manusianya sudah berkualitas pembangunan ekonomi pun kemudian akan terbangun.

b. Model Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse

Nurkse dalam Nugroho (2007:30) menyinyalir bahwa “*a poor country is poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia miskin). Selanjutnya dijelaskan bahwa kemiskinan itu merupakan suatu lingkaran yang disebutnya dengan lingkaran kemiskinan yang mengemukakan bahwa kemiskinan diawali dari adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir tersebut dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, ekonom pembangunan ternama di tahun 1953.

**Gambar 1**  
**Lingkar Setan Kemiskinan**



**Sumber: Nugroho (2007:31)**

Sampai kini, negara berkembang masih memiliki beberapa ciri, terutama sulitnya mengelola pasar dalam negrinya menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi maka kecenderungan kapital dapat terjadi, diikuti rendahnya produktivitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan dan investasi, mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya berputar. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkat kemiskinan ini.

Dapat ditarik suatu kesimpulan dimana bahwa sebenarnya kemiskinan ada karena rendahnya pendapatan yang berakibat rendahnya investasi sehingga negara tersebut terbelenggu dalam suatu lingkaran kemiskinan.

c. Model kemitraan

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis di adaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari asal kata partner. Partner dapat diterjemahkan

“pasangan,jodoh,sekutu”. Sementara itu *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari ini kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Bertolak dari pengertian tersebut, kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi beberapa persyaratan menurut Nugroho (2007:32):

- 1) Ada dua pihak atau lebih
- 2) Mempunyai kesamaan visi dalam mencapai tujuan
- 3) Ada kesepakatan
- 4) Saling membutuhkan.

Tujuan kemitraan adalah mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Dengan demikian, kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, bukan sebaliknya ada pihak yang merugikan dan dirugikan. Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak, baik perseorangan maupun badan hukum atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra dapat memiliki status yang setara atau subordinat, memiliki kesamaan visi ataupun misi yang berbeda tetapi saling melengkapi secara fungsional.

Kemitraan dibagi menjadi 3 bagian menurut Nugroho (2007:32):

- 1) Kemitraan semu yaitu sebuah persekutuan antara dua pihak atau lebih, namun sesungguhnya kerjasama tersebut tidak imbang satu dengan lainnya. Bahkan suatu pihak tidak memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, atau untuk tujuan apa tujuan dilakukan serta disepakati. Ada sesuatu yang unik dalam kemitraan ini, yakni kedua pihak atau lebih merasa sama-sama penting untuk melakukan kerja sama tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan apa manfaatnya.

- 2) Kemitraan mutualistis adalah persekutuan dua pihak atau lebih yang menyadari aspek penting melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih sehingga akan tercapai tujuan secara optimal.
- 3) Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan paramecium. Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi kemudian terpisah satu sama lain, selanjutnya dapat melakukan pembelaan diri. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing. Model kemitraan yang lain dikembangkan berdasarkan atas asas kehidupan pada umumnya.

Model pemberdayaan masyarakat yang lain adalah model kemitraan yang diterapkan pada program Takresa Kukesra, model kemitraan yang dibangun adalah kemitraan 4 arah antara pemerintah, swasta, bank dan masyarakat. Pemerintah berposisi sebagai regulator, swasta sebagai pemasok dana, bank sebagai implementor, sedangkan masyarakat sebagai pihak yang dibangkitkan dayanya sebagai usaha menabung.

d. Model Grameen Bank

Pemberdayaan masyarakat sangat sulit dilakukan dilapangan, misalnya di Bangladesh Garmen Bank memberikan pelayanan program pengentasan kemiskinan. Mereka juga menerangkan tujuan, fungsi dan model kerja Bank ke masyarakat daerah. Grameen Bank memberikan kredit kepada masyarakat tanpa tanggungan dan menciptakan sistem perbankan yang berbasis pada kesalingpercayaan, akuntabilitas, partisipasi dan kreativitas.

Di Garmen Bank kredit merupakan senjata yang efektif untuk memerangi kemiskinan yang memicu kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin yang dipinggirkan oleh bank konvensional karena dianggap tidak layak bank. Grameen Bank memulai dengan suatu keyakinan bahwa kredit akan dipahami menjadi suatu hak asasi manusia dan membangun sistem dimana seseorang yang tidak memiliki apa-apa tetap dapat prioritas tinggi



untuk mendapatkan pinjaman. Metodologi dari Grameen Bank tidak berbasis pada penilaian kepemilikan seseorang, tetapi berbasis pada potensi dari orang tersebut. Grameen bank percaya bahwa setiap manusia yang miskin sekalipun dibekali dengan potensi yang banyak. Grameen bank bertujuan memberikan pelayanan keuangan kepada kelompok miskin khususnya perempuan guna menolong mereka memerangi kemiskinan, meskipun demikian Grameen Bank tetap berusaha mendapatkan operasional agar operasional bank tidak terhenti.

e. Dan Model Sri Mahila SEWA Sahakari Bank

Model lain diterapkan oleh Sri Mahila SEWA Sahakari Bank, yakni lembaga keuangan yang memberikan akses keuangan yang memberikan akses keuangan terhadap wanita-wanita yang lemah. Peminjaman hanya untuk kegiatan ekonomi bukan untuk keperluan pribadi. Bank mendorong

Dengan adanya berbagai model pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang berpengaruh dengan tingginya investasi sehingga dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.

## **B. Administrasi Pembangunan**

### **1. Pengertian Pembangunan**

Menurut Nugroho (2007:13) pembangunan berasal dari kata bangun yang berarti sadar, siuman, bangkit berdiri dan juga berarti bentuk. Dalam kata kerja "bangun" juga berarti membuat, mendirikan atau membina. Sehingga bisa dikatakan pembangunan meliputi bentuk (anatomis), kehidupan (fisiologis dan perilaku (behavioral) . lebih dari itu, kata pembangunan telah menjadi bahasa dunia. Keinginan bangsa-bangsa mengejar, bahkan memburu masa depan yang lebih baik melihat kondisi dan cara masing-masing, melahirkan berbagai konsep yang antara lain pertumbuhan, rekonstruksi, modernisasi, werternisasi, perubahan sosial, pembebasan, pembaruan, pembangunan bangsa, pembangunan nasional, pengembangan dan pembinaan.

Ponsioen dalam Nugroho (2007:14) berpendapat pembangunan bangsa adalah bagian integral dari pembangunan nasional suatu negara. Pembangunan

setiap negara berkembang bersifat multidimensional, berupa pembangunan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Sedangkan Briyant dan white dalam Nugroho menyebutkan bahwa pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk memengaruhi masa depannya yang memiliki 5 implikasi utama meliputi:

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok.
- b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, kekerataan nilai dan kesejahteraan.
- c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan.
- d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri.
- e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu dengan negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati.

Sekalipun para ahli pembangunan memberi pengertian tentang konsep pembangunan secara berbeda tetapi juga memiliki unsur-unsur esensial yang relatif sama. Michael Todaro dalam Nugroho (2007:16), pembangunan sebagai proses dimensional yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan lembaga nasional yang disertai akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Dari pandangan para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha (proyek-proyek) berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat/bangsa bersama pemerintah dan swasta yang bersifat multidimensional dan mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan lembaga nasional yang berproses melalui suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir dalam suatu perubahan sosial yang besar. Upaya tersebut ditempuh melalui modernitas proses pembinaan bangsa dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik disertai akselerasi ekonomi pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut berdasarkan pandangan masyarakat itu sendiri.

Esensi pembangunan menurut Briyant dan White dalam Nugroho (2007:16) adalah suatu peningkatan kapasitas untuk memengaruhi masa depan.

Pengertian ini berimplikasi sebagai berikut:

- a. Perhatian diarahkan sebagai daya/kemampuan terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan suatu kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. peningkatan kapasitas melalui aspek politik, ekonomi, sosial, budaya serta aspek peradaban dari setiap tingkatan sosial.
- b. Mencakup keadilan, perhatian yang berat sebelah terhadap pihak-pihak tertentu akan dapat memicu perpecahan dan mengurangi kapasitas.
- c. Penumbuhan kuasa dan wewenang artinya jika hanya seseorang mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan dapat mengambil manfaat pembangunan.
- d. Memerhatikan sungguh-sungguh pada hubungan dalam pertalian saling ketergantungan antar berbagai pihak sebagai suatu persatuan dan keseluruhan dalam setiap tingkatan sosial.
- e. Perhatian yang penu terhadap masa depan yang ditunjang kelangsungan hidupnya

Pembangunan sebagai kenyataan empiris telah melahirkan persepsi yang berbeda-beda dikalangan para pemerhati dan para analisis. Pada umumnya perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan pusat perhatian amatan dan kaca mata pandang yang digunakan untuk melihatnya. Berdasarkan pusat perhatian yang dipilih menurut Nugroho (2007:17) pembangunan dapat dipandang sebagai:

- a. Pertumbuhan dan perkembangan
- b. Pemenuhan kebutuhan pokok
- c. Pemerataan kesempatan dan keadilan
- d. Perubahan sosial
- e. Pembentukan bangsa
- f. Peningkatan kapasitas
- g. Masa depan yang ditunjang kelangsungan hidupnya
- h. Suatu pola hubungan yang saling menguntungkan/menghidupkan
- i. Pemberdayaan bakat potensi manusia
- j. Peningkatan pemenuhan kesejahteraan

Apabila diperhatikan suatu aspek penting dari kualitas perencanaan pembangunan adalah sejauh mana perencanaan pembangunan merespon kebutuhan-kebutuhan riil pembangunan dari suatu masyarakat.

## 2. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan sebagai suatu disiplin ilmiah merupakan orientasi baru dalam Ilmu Administrasi. Dikatakan suatu orientasi baru oleh karena sampai sekarang Administrasi Pembangunan belum secara universal diakui

sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. “Ilmu” Administrasi Pembangunan dewasa ini masih berada dalam tahap embrional.

Meskipun demikian perkembangan Administrasi Pembangunan menunjukkan bahwa sudah semakin banyak para ahli di samping para ahli administrasi yang menaruh perhatian terhadap Administrasi pembangunan itu, terutama para ahli yang menspesialisasikan dirinya dalam ilmu-ilmu politik, ekonomi, hukum, sosiologi dan sebagainya. Karena itu ada optimisme yang besar di kalangan para pelopor Administrasi Pembangunan bahwa Ilmu Administrasi Pembangunan akan cepat mencapai kedewasaan.

Sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu yang lain, pengembangan prinsip-prinsip Administrasi Pembangunan kiranya memerlukan usaha yang intensif agar supaya prinsip-prinsip Administrasi Pembangunan itu sungguh diakui sejajar dengan ilmu pengetahuan sosial lainnya.

Menurut Siagian (1970:2) administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu: *pertama*, tentang administrasi dan *kedua*, tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

- a. *Pertama*, bahwa pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan; meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi dan biasanya memang dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri (*independent phase of a process*). Tahapan itu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.
- b. *Kedua*, bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan sadar dan timbul hanya secara insidental di masyarakat, tidaklah dapat digolongkan kepada kategori pembangunan.
- c. *Ketiga*, bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
- d. *Keempat*, bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada

sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swa-sembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Memang salah satu ciri dari masyarakat yang telah mencapai tingkat modernitas yang tinggi ialah bahwa masyarakat itu makin dapat melepaskan diri dari tekanan dan kekangan alam dan bahkan menguasai alam sekelilingnya.

- e. *Kelima*, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi-dimensionil. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.
- f. *Keenam*, bahwa kesemua hal yang telah disebutkan di muka ditujukan kepada usaha membina bangsa (*nation-building*) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan pengertian-pengertian tersebut sebagai titik tolak, penulis kini akan memberikan definisi kerja (*working definition*) daripada administrasi pembangunan. Administrasi Pembangunan adalah "seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bahasa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Dengan demikian kiranya jelas bahwa sesuatu bangsa yang sedang membangun tidak mungkin dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa bangsa ini bersikap acuh tak acuh terhadap pembangunan. Menyerahkan kegiatan-kegiatan pembangunan itu hanya kepada pemerintah adalah suatu hal yang perlu dicegah. Pada hakekatnya partisipasi seluruh masyarakat (*societal participation*) merupakan salah satu tugas kewajiban setiap anggota masyarakat.

## C. Kemiskinan

### 1. Pengertian Kemiskinan

Menurut Sutrisno (2002:8) kemiskinan merupakan masalah klasik yang selalu dihadapi oleh manusia karena melibatkan seluruh aspek kehidupan, walaupun seringkali kehadirannya sering tidak disadari sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan kondisi yang nyata yang ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan.

Walaupun demikian, belum tentu mereka sadar akan kemiskinan yang mereka jalani. Kesadaran akan kemiskinan yang mereka miliki itu baru muncul pada waktu mereka membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi.

Menurut Levitan dalam Soetrisno (2002:9) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan bahan-bahan dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standart hidup yang layak.

Sedangkan menurut Schiller dalam Soetrisno (2002:9) kemiskinan adalah ketidakanggapan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Dan dengan nada yang sama menurut Salim dalam Soetrisno (2002:9) mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.

Sementara itu, menurut Wignyosoebroto dalam Soetrisno (2002:10) kemiskinan diartikan sebagai bentuk ketidakberdayaan, karena orang yang dilanda kemiskinan tidak akan bisa banyak berdaya, bahkan untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup fisik pada taraf subsistem saja tidak berdaya.

Dari beberapa pendapat para ahli tentang definisi kemiskinan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kemiskinan sebagai fenomena ekonomi, dalam arti rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup

## 2. Penyebab Kemiskinan

. Secara teoritis menurut Soetrisno (2002:16) dapat dipahami melalui akar penyebabnya yang dapat dibedakan menjadi dua kategori:

### a. Kemiskinan Natural

Kemiskinan kategori ini timbul karena akibat terbatasnya sumber daya dan atau tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah, artinya faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah faktor alam yang kurang menguntungkan. Keadaan kemiskinan yang demikian bisa saja terjadi perbedaan-perbedaan kemampuan, tetapi dampak perbedaan tersebut akan diperlunak atau dieliminasi oleh adanya pranata

tradisional, seperti hubungan patroklien, jiwa gotong royong atau sejenisnya yang secara fungsional dapat meredam kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial.

b. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan kategori ini lebih disebabkan oleh karena srtuktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan demikian sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan.

Kemiskinan srtuktural dalam banyak hal terjadi bukan karena seseorang individu atau anggota keluarga malas bekerja atau karena mereka terus-menerus sakit. Dalam perspektif modernisasi (cenderung) kemiskinan bersumber dari lemahnya etos kerja, tidak terbiasa dengan kerja keras. Kemiskinan buatan dalam perbincangan di kalangan ilmuwan sosial seringkali diidentikkan dengan pengertian kemiskinan struktural.

Golongan yang menderita kemiskinan struktural ini misalnya para petani penggarap, atau para petani yang tanah miliknya kecil sehingga hasilnya tidak mencukupi untuk memberi makan dirinya sendiri dan keluarganya, disamping itu ciri utama dari kemiskinan struktural ialah tidak terjadinya apa yang disebut mobilitas sosial vertikal.

Ciri lain kemiskinan struktural adalah terletak pada lingkungan sosial yang menyebabkan mereka kurang hasrat untuk meningkatkan taraf hidup mereka, kurang kuat untuk berusaha dibidang pendidikan dan mencari pekerjaan, bahkan cenderung kuatnya ketergantungan pihak si miskin kepada kelas sosial ekonomi di atasnya termasuk ketergantungan kepada pihak birokrasi atau otoritarian desa.

### 3. Kemiskinan di perkotaan

Kemiskinan perkotaan adalah fenomena yang mulai dipandang sebagai masalah serius, terutama dengan semakin banyaknya permasalahan sosial ekonomi dan politik yang ditimbulkannya. Modernisasi dan industrialisasi sering

kali dituding sebagai pemicu, diantara beberapa pemicu yang lain, perkembangan daerah perkotaan secara pesat mengundang terjadinya urbanisasi dan kemudian komunitas-komunitas kumuh atau daerah kumuh yang identik dengan kemiskinan perkotaan. (<http://www.appropriateeconomics.org>)

Meskipun ahli-ahli ekonomi telah mempelajari masalah-masalah perkotaan sudah sejak lama, tetapi disiplin ekonomi perkotaan masih relatif baru. Ekonomi perkotaan belum dipelajari secara luas, banyak istilah ekonomi perkotaan dianggap kurang tepat, sehingga sering terjadi interpretasi yang berbeda-beda. Terdapat perbedaan antara "studi-studi masalah perkotaan" dan disiplin "ekonomi perkotaan". Hal tersebut merupakan suatu masalah penting. Karena hampir tiga perempat kegiatan negara-negara maju seperti Jepang, Australia dan Amerika Serikat terjadi di daerah-daerah perkotaan, maka sebagian besar masalah-masalah ekonomi dapat dikatakan sebagai masalah perkotaan, yaitu meliputi pertumbuhan perkotaan, penggunaan lahan perkotaan, persaingan dan monopoli, serta distribusi pendapatan. Namun hal tersebut tidak dapat dikatakan sepenuhnya sebagai konsepsi yang valid dari suatu disiplin tetapi memiliki sifat-sifat yang seharusnya mendapat perhatian dalam penanganan masalah perkotaan.

Ciri atau sifat esensial daerah perkotaan adalah konsentrasi basis berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik pada tata ruang perkotaan. Konsentrasi spasial (tata ruang) adalah faktor sentral (utama). Terdapat pertanyaan mengapa kegiatan-kegiatan itu berkelompok dan dampak apa yang ditimbulkan dari pengelompokan tersebut. Hubungan spasial yang unik (istimewa) antara dan di dalam kota-kota mempengaruhi sifat dari banyak tipe isu perkotaan yang dihadapi masyarakat perkotaan masa kini. Tetapi tidak berarti bahwa masalah spasial merupakan satu-satunya pertimbangan. Masalah perkotaan sangat luas dan bervariasi, sehingga untuk menanganinya diperlukan langkah dan upaya pemecahan dengan menggunakan analisis ekonomi agar dapat dicapai hasil yang efektif dan efisien. Lahan perkotaan yang tersedia relatif terbatas sedangkan berbagai jenis kegiatan yang membutuhkan lahan perkotaan itu sangat banyak, sehingga terjadi ketimpangan dalam pemanfaatan lahan perkotaan.



## **D. Pemerintah Kota**

### **1. Pengertian Kota dan Perkotaan**

Menurut Adisasmita (2005:77) pada umumnya “kota” itu diartikan sebagai suatu permukaan wilayah dimana terdapat permusatan (konsentrasi) penduduk dengan berbagai jenis kegiatan ekonomi, sosial budaya dan administrasi pemerintahan. Secara lebih rinci dapat digambarkan yaitu meliputi lahan geografis utamanya untuk pemukiman; berpenduduk dalam jumlah yang relative banyak (besar); di atas lahan yang terbatas luasnya; dimana mata pencaharian penduduk di dominasi oleh kegiatan non pertanian, sebagian besar merupakan sektor jasa atau sektor tersier (perdagangan, transportasi, keuangan, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya), sektor pengolahan atau sektor sekunder (industri dan manufaktur), serta pola hubungan lainnya antar individu dalam masyarakat dapat dikatakan lebih bersifat rasional, ekonomis, dan individualistis.

Kota mempunyai daya tarik yang relative (sangat) kuat bagi penduduk yang berdomisili di luar kota yang bersangkutan, baik yang tersebar di daerah perdesaan ataupun di kota-kota yang lebih kecil. Arus urbanisasi (ke daerah perkotaan) makin kuat. Daya tariknya dalam bentuk menjanjikan lapangan kerja, pendapatan yang lebih tinggi, taraf kehidupan yang lebih baik, memberikan peluang melanjutkan studi dan lainnya. Jadi suatu kota itu mempunyai kaitan dengan kota-kota lainnya, maka dapat dikatakan bahwa fungsi primer kota itu adalah pelayanan kepada kota-kota lain (hubungan eksternal) dan fungsi sekundernya adalah pelayanan kepada warga kotanya (hubungan internal).

Menurut Mansyur (1977:107) masyarakat kota adalah masyarakat yang anggota-anggotanya terdiri dari manusia yang bermacam-macam lapisan/tingkatan hidup, pendidikan, kebudayaan dan lain-lain.

Perkembangan perkotaan menunjukkan daerah terbangun (urban area) makin bertambah luas sebagai akibat dari jumlah penduduknya bertambah besar. Seringkali terjadi luas daerah terbangun keluar melampaui batas wilayah administrasinya, sehingga batas wilayah administrasi kota seperti dikemukakan di atas harus diperluas. Untuk itu diperlukan perundingan dan negosiasi dengan kabupaten tetangga agar bersedia menyerahkan sebagian dari wilayah administratifnya. Idealnya suatu kota itu harus mampu mengakomodasi

perkembangan kota yang sangat pesat dan dinamis pada masa mendatang. Oleh karena itu harus mampu mengantisipasi perkembangan 20-30 tahun bahkan 50 tahun ke depan.

Derah perkotaan merupakan ruang permukaan daratan di mana terdapat konsentrasi penduduk dengan segala kegiatannya yang membutuhkan ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Jumlah penduduk di daerah perkotaan menunjukkan perkembangan yang meningkat, karena daerah perkotaan mempunyai daya tarik yang kuat yaitu menjanjikan kesempatan kerja yang lebih luas, pendapatan yang lebih tinggi, dan berbagai kemudahan lainnya yang beraneka macam.

Penyediaan prasarana dan sarana perkotaan diarahkan kepada penyelenggaraan fungsi kota dan yang utama adalah pengadaan tempat tinggal (pemukiman), tempat bekerja, system transportasi, dan rekreasi. Kebutuhan atau permintaan tersedianya prasarana dan sarana perkotaan ternyata tidak mampu mengimbangi kebutuhan karena lahan perkotaan untuk pembangunan prasarana dan sarana itu relatif terbatas dan anggaran pembangunan yang tersedia juga sangat terbatas, sedangkan perkembangan di daerah perkotaan berlangsung semakin pesat.

Tidak seimbangnya prasarana dan sarana perkotaan dibandingkan dengan kebutuhan perkotaan menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam penggunaan fasilitas yang tersedia. Misalnya kepadatan lalu lintas atau ketidalamancaran pelayanan angkutan umum perkotaan. Hal ini jelas merugikan masyarakat.

Prasarana perkotaan meliputi jalan/jembatan, air bersih, persampahan, sanitasi, ruang parkir, taman kota, dan sebagainya. Yang termasuk sarana perkotaan adalah terminal, pasar, pemadam kebakaran dan sebagainya. Sedangkan fasilitas pelayanan ekonomi terdiri dari bank, pasar, hotel, restoran, dan sebagainya. Dan fasilitas pelayanan sosial misalnya meliputi perumahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, keagamaan, olah raga, reaksi, dan sebagainya.

Prasarana dan sarana perkotaan dan berbagai fasilitas layanan ekonomi dan sosial agar disediakan dalam jumlah yang cukup. Dalam pembangunannya, peranan pemerintah kota sangat besar dan menentukan. Di samping itu

diperlukan pula peran serta swasta dan masyarakat yang bersifat partisipatif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Menurut konsep ekonomi, prasarana dilakukan sebagai pelayanan publik (*public utilities*) dimana di dalamnya meliputi pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi, saluran air, sanitasi dan pembuangan limbah padat (*solid waste*) dan pipa gas. Pelayanan umum (*public work*) mencakup jalan, irigasi, dan sarana transportasi lainnya yang meliputi kereta api perkotaan, angkutan perkotaan, pelabuhan laut dan bandar udara. Jika investasi prasarana menurun maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Sebaliknya jika terdapat peningkatan investasi prasarana perkotaan maka akan secara langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi prasarana, selain menunjang secara langsung perkembangan kegiatan sektor ekonomi, akan menunjang pula sektor-sektor terkait lainnya.

Prasarana mempunyai peranan ganda dan sekaligus memadukan antara menunjang pertumbuhan ekonomi dan menunjang pemerataan hasil-hasil pembangunan dan sekaligus mempunyai dampak positif yaitu meningkatkan kualitas hidup. Penggunaan, pelabuhan laut, bandar udara, transportasi perkotaan dan telekomunikasi berperan secara langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pembangunan prasarana jalan lokal, saluran air bersih, dan pembuangan limbah akan menunjang masyarakat golongan miskin untuk dapat hidup dalam lingkungan yang lebih sehat.

## 2. Pemerintah Kota

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya. hanya dinikmati oleh keluarga- keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali

mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

Sekilas sejarah pemerintahan di Kota Malang (<http://www.malangkota.go.id>) :

- a. Malang merupakan sebuah Kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, dengan rajanya Gajayana.
- b. Tahun 1767 Kompeni memasuki Kota
- c. Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda di pusatkan di sekitar kali Brantas
- d. Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen
- e. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat Kota di dirikan dan Kota didirikan alun-alun di bangun.
- f. 1 April 1914 Malang di tetapkan sebagai Kotapraja
- g. 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang
- h. 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia

- i. 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda
- j. 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang.
- k. 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang.

Pemerintah Daerah Kota Malang secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) komponen yang berkaitan (<http://www.malangkota.go.id>):

a. Muspida

Merupakan pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Malang, yang meliputi :

- 1) Walikota
- 2) Dandim
- 3) Kapolresta
- 4) Kepala Kajari
- 5) Ketua DPRD

b. Eksekutif

Merupakan Pejabat Pemerintah Daerah Kota Malang, yang unsur-unsurnya terdiri dari Walikota dan jajaran di bawahnya.

c. Legislatif

Merupakan Unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Komisi-Komisi yang terbentuk.

## **E. Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES)**

### **1. Pengertian Jaring Pengaman Sosial (JPES)**

Program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) sesungguhnya adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang khas atau spesifik Jawa Timur, dan mengedepankan pada pengembangan jenis kegiatan tertentu yang diharapkan dapat bermanfaat secara signifikan bagi masyarakat miskin yang kehidupan sosial-ekonominya makin berat.

Secara umum Program JPES sama seperti program penanggulangan kemiskinan lainnya yang bertujuan untuk menyelamatkan dan memberdayakan

masyarakat miskin dengan memanfaatkan potensi lokal serta kekhasan Program JPES yang dapat dikembangkan dalam jangka menengah dan jangka panjang program pembangunan Jawa Timur.

## 2. Tujuan Program JPES

Pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa/kelurahan melalui penguatan pendapatan masyarakat yang mengkhhususkan pada (Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor: 188/022/2008) :

- a. Peningkatan jumlah kegiatan pembangunan di pedesaan melalui stimulan Program JPES Pemprop Jawa Timur dalam mendorong program pembangunan pedesaan melalui APBD Kabupaten/Kota.
- b. Penyediaan lapangan kerja produktif bagi tenaga kerja warga masyarakat setempat di lokasi kegiatan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur dan sarana prasarana.
- c. Pendayagunaan tenaga warga masyarakat lokal untuk meningkatkan penghasilan tambahan melalui kegiatan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja setempat (*off season job opportunity*).
- d. Peningkatan produktivitas dan kebersamaan, tanggungjawab dan rasa memiliki masyarakat setempat terhadap infrastruktur dan sarana yang telah dibangun yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- e. Penguatan kelembagaan dan keswadayaan masyarakat, desa/kelurahan agar berfungsi dan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat lokal.
- f. Peningkatan SDM masyarakat desa melalui kegiatan nyata (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian) dalam berorganisasi melaksanakan pembangunan masyarakat desa/kelurahan.

Dengan adanya program JPES diharapkan warga dapat menjadi aktif dalam segala kegiatan yang nantinya akan mengentaskan mereka dari kemiskinan.

### 3. Ruang Lingkup Program JPES

Program JPES yang dibiayai dari dana APBD Propinsi Jawa Timur tahun 2008 tetap difokuskan pada pola Padat Karya, yaitu program pembangunan sarana dan prasarana desa setempat yang pelaksanaannya melibatkan peran aktif tenaga kerja dan partisipasi masyarakat miskin setempat.

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dana pendampingan (*cost sharing*) APBD Kabupaten/Kota masing-masing dapat menyusun program pengentasan kemiskinan lainnya sesuai kebutuhan.

- a. Pembangunan/rehabilitasi: jembatan, jalan makadam, jalan rabat dan jalan paving yang berlokasi di desa setempat;
- b. Pembangunan/rehabilitasi/normalisasi: saluran irigasi, talud/ plengsengan sungai dan pengerukan embung yang berlokasi dan untuk kepentingan masyarakat setempat;
- c. Pembuatan/perbaikan bangunan konservasi lahan: pembersihan dan penyiapan lahan, pembuatan lubang tanaman, pembuatan teras atau talud, pembuatan saluran pembuang dll;
- d. Pekerjaan rehabilitasi lahan bekas penambangan dan pembuatan terumbu karang;
- e. Pembangunan/rehabilitasi sanitasi lingkungan dan air bersih;
- f. Kegiatan sarana dan prasarana lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa/Kelurahan.

Untuk lebih jelasnya sasaran pelaksanaan JPES mengacu atau mengkhususkan pada:

- a. Banyak menyerap tenaga kerja lokal setempat dan tidak memerlukan teknologi tinggi maupun alat-alat berat dan dikelola dengan manajemen sederhana sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan tidak boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga;
- b. Bersifat produktif yang mempunyai nilai ekonomi dan menjadi kebutuhan warga masyarakat setempat;

- c. Merupakan fasilitas umum (public facility) berupa sarana dan prasarana yang berguna untuk kepentingan masyarakat Was dan bukan untuk kepentingan golongan maupun perorangan;
- d. Kegiatan bersifat mendukung program pembangunan daerah dan tidak merusak lingkungan;
- e. Atas kesepakatan bersama tidak ada ganti rugi tanah, tanaman dan lainnya.
- f. Hasil pembangunan menjadi asset masyarakat desa/kelurahan.

Kelompok masyarakat miskin yang menjadi target prioritas dalam program JPES di masing-masing desa/kelurahan adalah warga termiskin dari masyarakat miskin di desa/kelurahan setempat. Untuk menentukan sasaran dalam Program JPES adalah (Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor: 188/022/2008):

- a. Penduduk miskin produktif (pada umumnya usia kerja 19-55 tahun).
- b. Buruh (buruh tani, buruh nelayan, buruh industri kecil, dan lain-lain).
- c. Perempuan miskin produktif yang tidak mempunyai penghasilan tetap.

Untuk menjamin agar dana dan program yang didanai JPES dapat efektif dan transparan, maka beberapa ketentuan yang harus dipenuhi adalah:

- a. Seluruh informasi yang berkaitan dengan besarnya dana, rincian kegiatan dan target sasaran yang terlibat harus secara terbuka disampaikan kepada masyarakat setempat.
- b. Pembuatan papan nama proyek yang memuat informasi antara lain jenis lokasi kegiatan, nama pokgakin pelaksana, jumlah pokgakin, kegiatan, volume kegiatan, sumber dana, biaya, partisipasi masyarakat dan informasi penting lainnya, diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh umum.
- c. Seluruh masyarakat dan perangkat desa/kelurahan setempat berhak dan berkewajiban untuk memantau pelaksanaan kegiatan yang didanai Program JPES.



- d. Kabupaten/Kota wajib membuka saluran keluhan agar warga masyarakat dapat menyampaikan masukan, kritik dan saran tentang pelaksanaan termasuk penyimpangan dalam pelaksanaannya.

#### **4. Organisasi Pelaksana Program JPES**

##### **a. Tingkat Propinsi**

Organisasi Pelaksana Program JPES ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 3 Maret 2008 nomor 188/1997/022/2008 tentang Tim Penyelenggara Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun 2008, terdiri dari:

1) Pengarah, bertugas:

- a) Memberikan arahan kebijakan penyusunan Petunjuk Operasional Program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun 2008;
- b) Memberikan arahan kebijakan pelaksanaan kegiatan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun 2008.

2) Sekretariat, bertugas:

- a) Menyusun dan menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penetapan Pagu Alokasi Dana Bantuan Program JPES per Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
- b) Menyusun Petunjuk Operasional Program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial;
- c) Menyusun jadwal kegiatan dan pemantauan pelaksanaan program kerja;
- d) Menghimpun bahan-bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian program kerja Penyelenggara Program JPES sebagai bahan perumusan pelaksanaan kegiatan;
- e) Menghimpun usulan program kegiatan Program JPES dari Bupati/Walikota se Jawa Timur;

- f) Melakukan Kerjasama dengan perbankan untuk penyaluran dana Program JPES kepada penerima bantuan serta desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota;
  - g) Menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan Program JPES kepada Bupati/Walikota;
  - h) Menyusun dan menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang:
    - a. Pendamping Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) penerima bantuan;
    - b. Lokasi (kecamatan dan desa/kelurahan), nama Pokgakin dan Ketua Pokgakin, alamat, kegiatan, alokasi dana serta nomor rekening Pokgakin (atas nama Ketua dan Bendahara);
    - i) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Program JPES.
3. Dewan Pakar selaku Tenaga Ahli Program JPES, bertugas:
- a) Memberikan pertimbangan dan saran terhadap penyusunan rumusan prosentase terhadap klasifikasi urutan Kabupaten/Kota miskin berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur dan mengusulkan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Administrasi Pembangunan;
  - b) Memberikan pertimbangan dan saran terhadap penyusunan Petunjuk Operasional Program JPES;
  - c) Membantu pelaksanaan sosialisasi dan informasi tentang pelaksanaan Program JPES;
  - d) Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan Program JPES sebagai perbaikan program selanjutnya;
  - e) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Administrasi Pembangunan.
4. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) se Jawa Timur mempunyai tugas:
- a) Menyelenggarakan sosialisasi di wilayahnya;
  - b) Melakukan pembinaan kepada Pendamping Propinsi;

- c) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap semua proses administrasi program dan kegiatan JPES;
  - d) Membentuk Tim untuk melakukan verifikasi usulan program kegiatan Program JPES dari Bupati/Walikota sebagai dasar pertimbangan Gubernur menerbitkan Keputusan tentang Lokasi (kecamatan dan desa/kelurahan), nama Pokgakin dan Ketua Pokgakin, alamat, kegiatan, alokasi dana serta nomor rekening Pokgakin (atas nama Ketua dan Bendahara).
  - e) Melakukan pemantauan kegiatan Program JPES;
  - f) Mengkoordinasikan serta meneliti laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan Program JPES dari Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan;
  - g) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Program JPES di masing-masing Kabupaten/Kota kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Administrasi Pembangunan.
5. Untuk kelancaran pelaksanaan di lapangan, Tim Penyelenggara Program JPES Propinsi menunjuk dan menetapkan Pendamping Pokgakin, yang pembinaannya dilakukan Bakorwil dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan langsung oleh Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Program JPES, untuk:
- a) Membantu kelancaran administratif dan teknis tugas Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Program JPES;
  - b) Bersama Camat dan Kepala Desa/Lurah membantu sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan Program JPES di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
  - c) Bersama Kepala Desa/Lurah mendata anggota masyarakat Desa/Kelurahan yang menjadi sasaran Program JPES;
  - d) Membantu mengkoordinasikan peran Pokgakin dalam kegiatan pelaksanaan Program JPES;
  - e) Membantu/memfasilitasi Pokgakin dalam menyusun Proposal usulan kegiatan;

- f) Membantu merekapitulasi usulan Desa/Kelurahan tentang kegiatan, lokasi dan Pokgakin;
- g) Membantu/memfasilitasi Pokgakin dalam menyusun laporan pertanggungjawaban;
- h) Melaporkan secara periodik (bulanan) kegiatan Program JPES kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dengan tembusan Penyelenggara Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial Propinsi Jawa Timur.

#### **b. Tingkat Kabupaten/Kota**

##### **1. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota**

Tim Koordinasi Kabupaten/Kota adalah organisasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota, dengan susunan Tim Koordinasi sebagai berikut:

- a) Pengarah : (1) Bupati/Walikota, (2) Sekretaris Daerah,
- b) Ketua : Kepala Bappeda,
- c) Sekretaris : Unsur Sekretariat Daerah (Bagian Penyusunan Program atau Bagian yang terkait),
- d) Bendahara ;
- e) Anggota dari unsur-unsur Bapemas/Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas/Instansi terkait sesuai kebutuhan;
- g. Tugas dan fungsi Tim Koordinasi Kabupaten/Kota:
  - a) Mengkoordinasikan pengelolaan Program JPES di wilayahnya;
  - b) Mengkoordinasikan peran dinas/instansi dan unsur terkait lainnya untuk mendukung pelaksanaan Program JPES;
  - c) Merekapitulasi/mensinkronisasi pelaksanaan Program JPES dengan program kemiskinan lainnya;
  - d) Menetapkan pembagian alokasi dana Program JPES pada masing-masing Desa/Kelurahan sesuai prioritas program penanganan kemiskinan;
  - e) Mensosialisasikan petunjuk operasional program dan kegiatan JPES kepada Camat, Kepala Desa/Lurah terkait;

- f) Menghimpun dan mengusulkan lokasi/kegiatan maupun nomor rekening Pokgakin Program JPES di wilayahnya kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi usulan Program JPES;
- g) Mengkoordinasikan usulan Program JPES dengan Bakorwil;
- h) Menyampaikan usulan Program JPES kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Administrasi Pembangunan;
- i) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Program JPES di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- j) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan JPES setiap bulan kepada Gubernur Jawa Timur cq. Biro Administrasi Pembangunan dengan tembusan kepada Bakorwil.

**c. Tingkat Kecamatan**

Camat yang karena jabatannya sebagai pembina JPES di tingkat kecamatan dengan tugas:

- 1) Membantu Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program JPES di wilayahnya;
- 2) Memfasilitasi diterbitkannya nomor rekening masing-masing Pokgakin pada Bank JATIM;
- 3) Bersama Pendamping Pokgakin dan Perangkat Desa/Kelurahan terkait serta Bank JATIM meneliti usulan Desa/Kelurahan tentang kegiatan, lokasi, usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan Pokgakin di Desa/Kelurahan serta nomor rekening Ketua dan Bendahara Pokgakin;
- 4) Menyampaikan kepada Bupati/Walikota tentang rekapitulasi usulan nama Pokgakin beserta lokasi, kegiatan, anggaran biaya dan nomor rekening Pokgakin di wilayahnya melalui Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;
- 5) Melaksanakan pembinaan pelaksanaan Program JPES di wilayahnya;
- 6) Melaporkan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan JPES setiap bulan kepada Bupati/Walikota melalui Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.

#### d. Tingkat Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah karena jabatannya adalah Pembina Program JPES di wilayahnya dengan tugas dan fungsi:

- 1) Menyeleksi Pokgakin di wilayahnya yang belum pernah melaksanakan program PAM-DKB tahun 2006 dan JPES tahun 2007;
- 2) Melaksanakan musyawarah desa/ kelurahan dengan seluruh perangkat desa/kelurahan dan tokoh masyarakat serta Pokgakin dan Pendamping Pokgakin untuk menyusun rencana kegiatan sesuai dengan urutan prioritas kebutuhan masyarakat miskin setempat.
- 3) Menetapkan Pokgakin sebagai pelaksana kegiatan Program JPES;
- 4) Membahas dan menetapkan lokasi dan kegiatan serta rencana anggaran biaya kegiatan Pokgakin dan menetapkan Ketua dan Bendahara;
- 5) Memfasilitasi pengajuan nomor rekening pada masing-masing Pokgakin kepada Bank JATIM setempat;
- 6) Mengusulkan kepada Camat urutan prioritas rencana kegiatan, lokasi dan Rencana Anggaran Biaya serta nomor rekening Ketua dan Bendahara Pokgakin;
- 7) Melegalisasi setiap usulan pencairan dana masing-masing Pokgakin/ kegiatan di wilayahnya;
- 8) Melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program JPES di wilayahnya;
- 9) Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Camat.

#### 5. Tahap-Tahapan Program JPES

Tahap-tahapan program JPES dalam mengentaskan kemiskinan di perkotaan hadala sebagai berikut:

##### a. Perencanaan

Pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa/kelurahan melalui penguatan pendapatan masyarakat yang menghususkan pada (Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor: 188/022/2008) sasaran dan target sebagai berikut :

- 1) Pada tingkat individu, yakni orang miskin di Propinsi Jawa Timur, Target yang ingin dicapai adalah keikutertaan orang-orang miskin dalam program dan kegiatan pembangunan di wilayahnya, agar secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
- 2) Pada tingkat keluarga miskin, target yang ingin dicapai adalah masing keluarga miskin dapat memiliki sumber penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
- 3) Pada tingkat komunitas masyarakat miskin, target yang ingin dicapai adalah menumbuhkembangkan solidaritas dan interaksi sosial agar dapat saling bekerjasama dan mengembangkan kegiatan sosial yang dapat menambah penghasilan dan pengetahuan untuk bekal memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
- 4) Pada tingkat wilayah, diprioritaskan kepada desa atau kelurahan miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pendataan Sosial Ekonomi 2005 yang diperbaharui tahun 2006 Kabupaten/Kota Jawa Timur. Target yang ingin dicapai adalah msing-masing desa dan kelurahan miskin dapat memiliki prasarana dan sarana dasar yang layak dan bermanfaat.

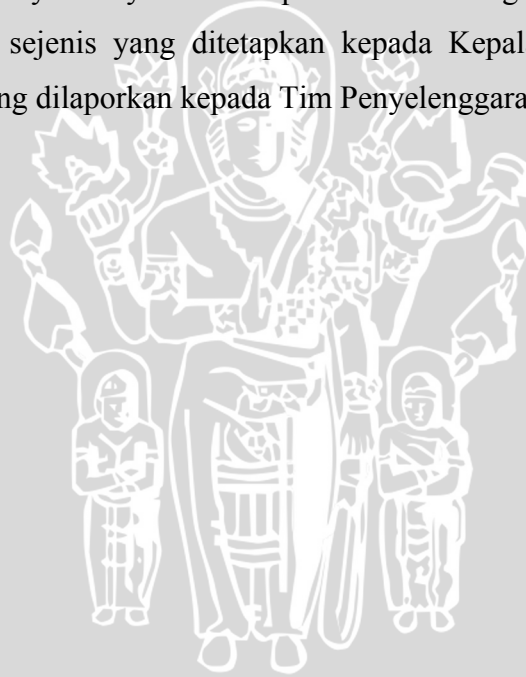
Hasil yang diharapkan dari adanya program JPES yang sudah di diprogramkan oleh Gubernur Jawa Timur:

- 1) Masyarakat miskin mampu berkembang dan makin berdaya melalui dukungan pranata sosial, solidarits dan daya kohesi sosial dalam kelompoknya.
  - 2) Masyarakat miskin mampu melangsungkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
- b. Pelaksanaan
- 1) Pelaksanaan kegiatan Program JPES harus sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi dan Lokasi Kegiatan Program JPES per Kabupaten/Kota dan apabila harus terjadi perubahan dilakukan dengan mekanisme permohonan dari Bupati/Walikota untuk ditetapkan dalam perubahan Keputusan Gubernur.

- 2) Usulan perubahan tidak diperkenankan untuk memindah lokasi ke desa lain, kecuali ada pernyataan dari Kepala Desa lokasi kegiatan semula dan harus tetap dalam daftar desa miskin sesuai data BPS.

c. Pertanggungjawaban (evaluasi)

- 1) Pertanggungjawaban dana bantuan Program JPES yang telah diterima oleh lembaga dan atau penerima bantuan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 pasal 133 ayat (2) menyebutkan:  
*Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah;*
- 2) Partisipasi/swadaya masyarakat dilaporkan oleh Pokgakin dan LPMD/K atau Lembaga sejenis yang ditetapkan kepada Kepala Desa/Lurah dan secara berjenjang dilaporkan kepada Tim Penyelenggara Program JPES.





### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Suatu metode dipilih dengan memperhatikan kesesuaian dengan obyek studi atau dengan kata lain dengan suatu penelitian sangat diperlukan metode yang sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian dengan maksud dengan diperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif karena dalam penelitiannya nanti, peneliti berusaha untuk mendiskripsikan proses dan kejadian yang sesungguhnya ”pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat melalui program jpes dalam pengentasan kemiskinan perkotaan”.

Pendekatan kualitatif menurut David William dalam Moleong (2006:5), penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. Jelas definisi ini memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar ilmiah, metode ilmiah yang dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah.

Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, motivasi dan lain-lain.

Pengertian metode diskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran / suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Dari pengertian diatas sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni ” Pemberdayaan Ekonomi Sosial Masyarakat Melalui Program JPES

Dalam Pengentasan Kemiskinan Perkotaan” maka peneliti akan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dalam mencari jawaban permasalahan dalam penelitian.

## B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian secara jelas dan mantap akan mempermudah penulis membuat keputusan yang tepat data mana yang tidak perlu dijamah ataupun data mana yang perlu dibuang atau dikeluarkan.

Menurut Moleong (2006:94) ada 2 maksud penetapan dari fokus :

1. Penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Peneliti tidak perlu kesana kemari untuk mencari subyek penelitian, sudah dengan sendirinya dibatasi oleh fokusnya.
2. Penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan.

Adapun fokus dari penelitian ini yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Sosial Masyarakat Melalui Program JPES Dalam Pengentasan Kemiskinan Perkotaan adalah :

1. Proses pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat perkotaan melalui program JPES di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru
  - a. Tahap perencanaan
  - b. Tahap pelaksanaan
  - c. Tahap evaluasi
2. Hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) di Kelurahan Dinoyo Kota Malang
  - a. Pavingisasi dan pembuatan gorong-gorong,
  - b. Pembangunan plengsengan sungai,
  - c. Pengerukan sungai kecil melintang,
  - d. Perbaikan MCK,
  - e. Perbaikan saluran air dan plengsengan,
  - f. Pengerukan sungai besar dan
  - g. Pengerukan saluran air

3. Faktor-faktor penghambat dan pendukung terlaksananya program JPES di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru
  - a. Faktor penghambat program JPES di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru
  - b. Faktor pendukung program JPES di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Upaya untuk menentukan lokasi dan situs penelitian merupakan kegiatan yang sangat berpengaruh dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah lokasi peneliti melakukan penelitian yakni di Kelurahan Dinoyo Kota Malang.

Sedangkan untuk menangkap keadaan/fenomena yang sebenarnya dari obyek yang diteliti, merupakan situs penelitian. Jadi yang dimaksud situs penelitian adalah lokasi atau tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data maupun informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi situs penelitian ini adalah Kantor Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru, yang mencakup segenap ruang-ruang kerja pada kantor itu. Penelitian situs ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi/ tempat tersebut memungkinkan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian.

### **D. Sumber Data**

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2006:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

Sesuai dengan jenisnya data yang diperoleh dapat digolongkan menjadi :

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan, dari nara sumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti.

## 2. Data sekunder

Yaitu data lengkap/penunjang data primer yang dikumpulkan dari data yang sesuai. Data ini dapat berupa dokumentasi, majalah dan arsip-arsip yang sesuai dengan keperluan peneliti.

Sedangkan yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah:

### 1. Informan

Informan adalah orang dalam yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah semua staf Kelurahan Dinoyo.

### 2. Dokumen

Dokumen yang digunakan adalah yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian. Dokumen ini diperoleh dari Kantor Kelurahan Dinoyo.

### 3. Peristiwa

Peristiwa yang dimaksud dari penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kelurahan Dinoyo dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data adalah usaha secara operasional dalam melakukan penelitian yang dapat memberikan pengaruh positif bagi pelaksanaan analisa dan interpretasi data. Berkaitan dengan hal tersebut maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan penelitian ini adalah :

### 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara*(*interviewee*) yang memnerikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan tanya jawab atau wawancara langsung dengan responden/informan yang telah dipilih secara sengaja.

### 3. Pengamatan (observasi)

Pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat/mengamati secara langsung fenomena obyek yang diteliti, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari wawancara. Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln dalam Moleong (2006:174) sebagai berikut :

- a. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung.
- b. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya
- c. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- d. Sering terjadi data keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang dijaringnya ada yang keliru.
- e. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit.
- f. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Alasan secara metodologis bagi penggunaan pengamatan ialah : pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subyek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap fenomena dari segi pengertian subyek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan panutan para peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subyek sehingga memungkinkan pula peneliti sebagai sumber data. Pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subyek.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu penelitian sebagai alat dan teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka yang menjadi instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian disamping peneliti sebagai instrumen utama yang lainnya adalah :

1. Pedoman wawancara (*interview guide*), merupakan suatu petunjuk/pedoman yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengadakan wawancara langsung.
2. Catatan lapangan (*field notes*), merupakan catatan yang berisi pokok-pokok informasi yang diperoleh peneliti selama melakukan wawancara maupun pengamatan dilapangan.

## G. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Di pihak lain, analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut :

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal ini diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintensiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya.

3. Berpikir dengan jelas membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

Selanjutnya menurut Janice McDrury (*Collaborative Group Analysis of Data*) dalam Moleong (2006:248), tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci gagasan yang ada dalam data.
2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan teme-tema yang berasal dari data.
3. Menuliskan model yang ditemukan.
4. Koding yang telah dilakukan.

Dari definisi-definisi tersebut dapatlah kita pahami bahwa ada yang mengemukakan proses, ada pula yang menjelaskan tentang komponen-komponen yang perlu ada dalam sesuatu analisa data.

Secara umum proses analisis datanya mencakup :

1. Reduksi data
  - a. Identifikasi satuan (unit)
  - b. Sesudah satuan diperoleh langkah berikutnya adalah membuat koding.
2. Katagorisasi
  - a. Menyusun kategori. Kategori adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.
  - b. Setiap kategari diberi nama yang disebut ”label”
3. Sintesiasi
  - a. Mensintesisikan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya
  - b. Kaitan satu kategoridengan kategori lainnya diberi nama/label lagi.

Dengan uraian diatas, maka dalam penyajian data dan analisa nantinya peneliti merujuk pada poin-poin diatas, sehingga skripsi yang berjudul ”Pemberdayaan Ekonomi Sosial Masyarakat Melalui Program JPES Dalam Pengentasan Kemiskinan Perkotaan” dapat terarah dalam pembahasan.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penyajian Data

#### 1. Gambaran Umum Kota Malang

##### a. Letak Geografis Kota Malang

Terletak pada ketinggian antara 440 - 667 meter diatas permukaan air laut. 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dengan dikelilingi gunung-gunung :

- 1) Gunung Arjuno di sebelah Utara
- 2) Gunung Semeru di sebelah Timur
- 3) Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
- 4) Gunung Kelud di sebelah Selatan

Kondisi iklim rata-rata suhu udara berkisar antara 22,2°C - 24,5°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,3°C dan suhu minimum 17,8°C . Rata kelembaban udara berkisar 74% - 82%. dengan kelembaban maksimum 97% dan minimum mencapai 37%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April, dan Desember. Sedangkan pada bulan Juni, Agustus, dan Nopember curah hujan relatif rendah

Secara Administratif Kota Malang dibagi 5 Kecamatan, yaitu:

**Gambar 2**  
**Peta Kota Malang**  
**Gambar 1**





Kota Malang dikelilingi oleh gunung-gunung:

1. Sebelah utara terdapat Gunung Arjuna (3,399 m) dan Gunung Anjasmara (2,277 m)
2. Sebelah timur terdapat Gunung Semeru (3,3676 m) dan Gunung Bromo (2,392 m)
3. Sebelah barat terdapat Gunung Kawi (2,625 m) dan Gunung Kelud (1,731 m)
4. Sebelah selatan terdapat Pegunungan Kapur (650 m)

#### **b. Keadaan Demografi Kota Malang**

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km<sup>2</sup>. Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2006 sebesar **807.136 jiwa** yang terdiri dari 402.818 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 404.318 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7334 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 103.928 jiwa, Blimbing = 166.239 jiwa, Kedungkandang = 177.530 jiwa, Sukun = 169.017 jiwa, dan Lowokwaru = 190.422 jiwa). Terdiri dari 57 Desa/Kelurahan, 509 unit RW dan 3783 unit RT.

Etnik Masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina)

Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan Kotanya. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun2, Kayutangan dan Ijen) serta Klenteng di Kota Lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara

Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari Topeng, namun kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini

adalah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan (Solo, Yogya), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi). Untuk mengetahui lebih jauh tentang daerah2 lain disekitar Kota malang silahkan kunjungi : Daerah Sekitar Kota Malang

Bahasa Jawa dialek Jawa Timuran dan bahasa Madura adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Dikalangan generasi muda berlaku dialek khas Malang yang disebut 'boso walikan' yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, contohnya : seperti Malang menjadi Ngalam. Gaya bahasa di Malang terkenal kaku tanpa unggah-ungguh sebagaimana bahasa Jawa kasar umumnya. Hal menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi.

Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar / mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedang untuk golongan pelajar / mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

### **c. Visi dan Misi Kota Malang**

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana akan dibawa agar tercapai pada tujuan yang diinginkan sebagai gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang.

Dengan memperhatikan latar belakang, kondisi, potensi dan masalah maka untuk melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan maka perlu dirumuskan visi dan misi serta rencana strategis agar pembangunan menjadi terarah, terukur, tepat waktu dan tepat sasaran terlebih dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan hambatan dan ketidak pastian. Perumusan visi tersebut adalah "terwujudnya kota malang yang mandiri, berbudaya, sejahtera dan berwawasan lingkungan". Mandiri, artinya bahwa kedepan Kota Malang diharapkan mampu membiayai sendiri seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan segala

sumber daya lokal (SDA, Potensi Daerah SDM yang dimiliki). Berbudaya, artinya bahwa pelaksanaan otonomi daerah tetap mengedepankan nilai-nilai Ke-Tuhanan, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat Kota Malang dan mengembangkan pendidikan untuk mengantisipasi perkembangan Kota Malang menuju kota Metropolitan. Sejahtera, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang di laksanakan di Kota Malang kesemuanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota, baik secara materiil maupun spirituil. Berwawasan Lingkungan, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang di laksanakan tetap berupaya untuk menjaga kelestarian alam dan kualitas lingkungan serta pemukiman Kota Malang.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Malang tersebut, penjabaran Misi Kota Malang untuk tahun 2004 - 2008 adalah :

Mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin perkotaan;

- 1) Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Sehat melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan penghijauan kota;
- 2) Mewujudkan semangat dan cita-cita reformasi dalam upaya pemulihan ekonomi kota menuju terwujudnya Indonesia baru berlandaskan pada: negara dengan pondasi system kehidupan ekonomi, social, budaya yang dijiwai prinsip-prinsip demokrasi kebangsaan dan keadilan social dalam ikut serta menertibkan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan Kota Malang;
- 3) Mewujudkan tuntutan reformasi dalam tatanan system politik pemerintahan dan tatanan paradigma pembangunan berdasarkan pada: wawasan kebangsaan, demokrasi, persatuan dan kesatuan, otonomi daerah, iman dan takwa, budi pekerti, hak asasi manusia, dan keadilan sosial;
- 4) Mewujudkan upaya reformasi melalui pembenahan system administrasi publik dan system administrasi kebijakan publik, dengan syarat rasa kebersamaan seluruh masyarakat yang pluralistic, persatuan dan kesatuan, kerjasama dan merupakan gerakan rakyat;

- 5) Menjadikan tekad mengentaskan kemiskinan menjadi landasan prioritas pembangunan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 6) Mendayagunakan secara optimal potensi penduduk, posisi geografis strategis, dan sumberdaya alam yang memadai untuk memajukan masyarakat kota Malang dan kontribusi maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

## **2. Gambaran umum Kelurahan Dinoyo**

### **a. Luas dan Batas Wilayah**

Wilayah kerja kelurahan dinoyo dibagi menjadi 3 lingkungan:

1. Lingkungan Dinoyo
2. Lingkungan Gajayana
3. Lingkungan Kanjuruhan

Luas wilayah kelurahan Dinoyo adalah 142,8 ha, sedangkan batas wilayahnya adalah:

1. Sebelah utara : Kelurahan Jatimulyo
2. Sebelah selatan : Kelurahan Sumpersari
3. Sebelah Barat : Kelurahan Merjosari
4. Sebelah timur : Kelurahan Ketawanggede

### **b. Kondisi Geografi**

Kelurahan Dinoyo dilihat dari topografinya merupakan daerah dataran tinggi. Sedangkan dilihat dari orbitasi (jarak dari Pusat Pemerintahan Kelurahan) adalah:

1. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 3 km
2. Jarak dari pusat pemerintahan Kota 6 km
3. Jarak dari pusat kedudukan Bakorwil 4 km
4. Jarak dari ibukota Propinsi 98 km
5. Jarak dari ibukota Negara 800 km

Sampai dengan bulan Juni 2008 Kelurahan Dinoyo mempunyai jumlah penduduk sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Kelurahan Dinoyo 2008**

NO	URAIAN	TAHUN 2007	TAHUN 2008
1	Penduduk	13.897	14.592
2	KK	2.188	2.310
3	RW	6	6
4	RT	43	48
5	Linmas/Hansip	34	40

*Sumber: Profil Kelurahan Dinoyo*

#### **c. Struktur Pemerintahan Kelurahan Dinoyo**

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No.11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Malang Dan Keputusan Walikota Malang No.390 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Keputusan Camat Lowokwaru Kota Malang No.91 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Kelurahan Se-Kelurahan Yang Berada Di Wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

#### **d. Potensi Kelurahan Dinoyo**

##### **1. Penduduk dan Sosiologi**

Luas wilayah Kelurahan Dinoyo secara keseluruhan adalah 142,8 ha, dihuni oleh 14.592 jiwa. TERBAGI ATAS 6 Rukun Warga dan 48 Rukun Tetangga dan dihuni oleh 2.310 Kepala Keluarga dengan perincian:

- a) Penduduk laki-laki : 7.900 Jiwa
- b) Penduduk perempuan : 6.692 Jiwa

##### **2. Komposisi etnik**

Masyarakat kelurahan Dinoyo terkenal religius, dinamis, suka kerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Warga Kelurahan Dinoyo. Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik terutama suku Jawa, Madura, sebagian keturunan Arab dan Cina.

##### **3. Pendidikan**

Lingkungan yang aman dan tenang, biaya hidup yang relatif murah merupakan tempat yang ideal untuk belajar dan menimba ilmu.

Ketersediaan sarana pendidikan yang lengkap baik formal maupun informal berikut fasilitas yang memadai dengan mutu Nasional menjadi Kelurahan Dinoyo memiliki beberapa lembaga pendidikan antara lain Perguruan Tinggi (PT), SLTA, SLTP, SD/MI, TK/TA, Play Group dan TPQ/TPI baik berstatus negeri atau swasta.

#### 4. Industri

Banyak industri kecil maupun industri sedang yang ada di Kelurahan Dinoyo, namun yang sangat terkenal adalah industri keramik yang sudah menasional, yang merupakan produk unggulan dari Kelurahan Dinoyo.

Banyak toko-toko keramik yang ada di Kelurahan Dinoyo, bahkan hingga masuk ke perkampungan dengan menyusuri gang-gang yang relatif sempit:

Seni keramik dinoyo adalah pabrikan. namun kualitas dan bentuknya sangat bagus dan beragam. Ini berpotensi untuk dijadikan ciri khas kota Malang. Aneka ragam seni keramik yang menjadi khasnya adalah jenis:

- b) Keramik Hias : tempat duduk, payung, guci, pot, vas, keramik
- c) Kontemporer dan patung
- d) Batu tahan api bentuk dan normal
- e) Isolator listrik

#### 5. Ekonomi

Peranan masyarakat di bidang ekonomi sangat menonjol mengingat kelurahan Dinoyo dibelah oleh jalan raya jurusan kota pariwisata Batu, maka sangat berpotensi sekali masyarakatnya meningkatkan taraf ekonominya meningkatkan taraf ekonominya di segala bidang industri keramik yang merupakan produk unggulan Kelurahan Dinoyo.

#### 6. Kesehatan

Di bidang kesehatan Kelurahan Dinoyo telah dilengkapi sarana dan prasarana antara lain:

- a) Rumah Sakit : 1 buah
- b) Puskesmas : 1 buah

- c) Dokter praktek : 10 orang
- d) Apotik : 4 buah
- e) Toko obat dan jamu : 1 buah
- f) Panti pijat : 1 buah
- g) Bidan dan Perawat : 20 orang
- h) Posyandu : 8 kelompok

#### 7. Keamanan dan Ketertiban

Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kewajiban kita bersama. Kamtibmas di Kelurahan Dinoyo dapat dikatakan terkendali dengan baik dengan kerjasama antara dengan masyarakat dengan Babin Kamtibmas/ Babinsa/ Kasatgas Hansip (Linmas) yang berjalan dengan baik.

Dengan kekuatan 40 Hansip (Linmas) yang terlatih serta jumlah pos kamling sebanyak 22 buah dengan dibantu 12 orang kelompok diharapkan Kelurahan Dinoyo kehidupan masyarakatnya semakin aman, tentram dan kondusif.

### **B. Fokus Penelitian**

#### **1. Proses pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat perkotaan melalui program JPES di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru**

##### **a. Tahap Perencanaan**

Pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa/kelurahan melalui penguatan pendapatan masyarakat mengkhususkan pada (Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor: 188/022/2008) sasaran dan target yang ditetapkan ada 4 tingkat, pada tingkat individu, yakni orang miskin di Propinsi Jawa Timur, Target yang ingin dicapai adalah keikutertaan orang-orang miskin dalam program dan kegiatan pembangunan di wilayahnya, agar secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Pada tingkat keluarga miskin, target yang ingin dicapai adalah masing keluarga miskin dapat memiliki sumber penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Pada tingkat komunitas masyarakat miskin, target yang ingin dicapai adalah menumbuhkembangkan solidaritas dan interaksi sosial agar dapat saling bekerjasama dan mengembangkan kegiatan sosial yang dapat menambah penghasilan dan pengetahuan untuk bekal memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Pada tingkat wilayah, diprioritaskan kepada desa atau kelurahan miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pendataan Sosial Ekonomi 2005 yang diperbaharui tahun 2006 Kabupaten/Kota Jawa Timur. Target yang ingin dicapai adalah masing-masing desa dan kelurahan miskin dapat memiliki prasarana dan sarana dasar yang layak dan bermanfaat.

Hasil yang diharapkan dari adanya program JPES yang sudah di diprogramkan oleh Gubernur Jawa Timur:

- 3) Masyarakat miskin mampu berkembang dan makin berdaya melalui dukungan pranata sosial, solidaritas dan daya kohesi sosial dalam kelompoknya.
- 4) Masyarakat miskin mampu melangsungkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak

Selanjutnya menurut Bapak Suwignyo selaku Lurah di Kelurahan Dinoyo pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2009 mengatakan bahwa:

“Perencanaan program JPES yang dilaksanakan nantinya di Kelurahan Dinoyo diharapkan akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Meskipun program JPES hanya dikhususkan untuk kegiatan padat karya namun diharapkan dapat membantu secara fisik kegiatan masyarakat di Kelurahan Dinoyo”

Menurut Bapak Dasiran selaku bendahara program JPES di Kelurahan Dinoyo pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2009 mengatakan bahwa:

“Perencanaan program JPES meliputi pendataan kegiatan yang perlu dilaksanakan sehingga dapat dibuat proposal kegiatan dan anggaran biaya yang di keluarkan nantinya. Karena program JPES yang dilakukan di Kelurahan Dinoyo masih meliputi kegiatan padat karya maka dalam hal penganggaran harus jelas karena bukan hanya berorientasi pada anggaran kegiatan namun juga upah tenaga kerja yang nantinya dapat membantu perekonomian warga.”



Senada dengan Bapak Dasiran, Bapak Rahno selaku ketua Pogakin pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2009 mengatakan pendapatnya bahwa:

“Perencanaan program JPES ini memang diprioritaskan pada kegiatan padat karya namun tingkat ekonomi warga juga harus terbantu, maka dari itu perencanaan juga harus difokuskan pada tingkat upah tenaga kerja yang mengarah pada perbaikan sektor ekonomi warga.”

Program JPES yang dilakukan di Jawa Timur pada umumnya difokuskan pada kegiatan padat karya, namun diharapkan peningkatan ekonomi masyarakat dapat terdukung juga.

#### **b. Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan Program JPES harus sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi dan Lokasi Kegiatan Program JPES per Kabupaten/Kota dan apabila harus terjadi perubahan dilakukan dengan mekanisme permohonan dari Bupati/Walikota untuk ditetapkan dalam perubahan Keputusan Gubernur.

Usulan perubahan tidak diperkenankan untuk memindah lokasi ke desa lain, kecuali ada pernyataan dari Kepala Desa lokasi kegiatan semula dan harus tetap dalam daftar desa miskin sesuai data BPS.

Pelaksanaan program JPES yang dilaksanakan di Kelurahan Dinoyo harus sesuai dengan prosedur yaitu membuat proposal kegiatan terlebih dahulu

Bapak Suwignyo selaku Lurah di Kelurahan Dinoyo memberi pendapat mengenai pelaksanaan program JPES di Kelurahan Dinoyo pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2009 bahwa:

“ Dengan adanya program JPES di Kelurahan Dinoyo yang memfokuskan pada padat karya ini sangat membawa dampak positif, dimana sarana dan prasarana warga jadi lebih baik dan kehidupan perekonomian warga juga meningkat. Upah kerja yang diberikan dengan adanya program JPES ini lumayan tinggi.”

Sedangkan Bapak Dasiran selaku bendahara program JPES pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2009 mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan program JPES sudah sangat maksimal yang dilakukan di Kelurahan Dinoyo, karena semua program kegiatan dapat terlaksana dengan baik sehingga sarana dan prasarana sudah layak dipergunakan

dan bukan itu saja perekonomian warga juga terbantu dengan adanya program JPES yang dilakukan di Kelurahan Dinoyo.”

Senada dengan pendapat dari Bapak Suwignyo dan Bapak Dasiran, bapak Rahno selaku ketua Pogakin juga mengutarakan pendapatnya bahwa:

“Dengan adanya program JPES di Kelurahan Dinoyo maka dapat dilihat perbaikan sarana dan prasarana sudah baik dan tertata rapi. Sedangkan proses pemberdayaan keluarga miskin juga sudah berjalan karena mereka yang tadinya menganggur sekarang sudah dapat bekerja walaupun bersifat sementara namun dapat membantu perekonomian mereka.”

Saat peneliti melakukan observasi langsung di lapangan keadaan jalan yang sudah rapi dan saluran air yang sudah berjalan baik menunjukkan bahwa pelaksanaan program JPES sudah terlaksana dengan baik.

Dalam pelaksanaan program JPES ini Pemerintah Kota juga mengadakan pengawasan atas optimalisasi program JPES yang dilakukan di Kelurahan Dinoyo. Pengawasan dilakukan agar supaya tidak ada penyimpangan dana yang digunakan saat pelaksanaan berlangsung.

### **c. Tahap Evaluasi**

Pertanggungjawaban dana bantuan Program JPES yang telah diterima oleh lembaga dan atau penerima bantuan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 pasal 133 ayat (2) menyebutkan:

Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.

Partisipasi/swadaya masyarakat dilaporkan oleh Pokgakin dan LPMD/K atau Lembaga sejenis yang ditetapkan kepada Kepala Desa/Lurah dan secara berjenjang dilaporkan kepada Tim Penyelenggara Program JPES.

Di Kelurahan Dinoyo tahap evaluasi juga dilakukan dimana penyesuaian antara dana yang masuk atau yang sudah dianggarkan dengan penggunaan dan bukan itu saja sebagai bukti pelaksanaan kegiatan JPES juga dilampirkan sejumlah foto mengenai pelaksanaannya. Foto tersebut antara lain mengenai

keadaan sebelum diadakannya program JPES dan foto-foto setelah adanya program JPES di Kelurahan Dinoyo.

Pada tahap evaluasi Bapak Suwignyo selaku Lurah di Kelurahan Dinoyo pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2009 mengatakan bahwa :

“ Proses Evaluasi pun juga tetap dilakukan dimana antara anggaran biaya yang dianggarkan harus sesuai dengan pengeluaran dan tidak boleh lebih besar pengeluarannya. Namun yang terjadi di Kelurahan Dinoyo bahwa program JPES yang dilaksanakan sudah berjalan maksimal dan pada proses pembiayaannya tidak memakan biaya yang berlebih.”

Sedangkan menurut bapak Dasiran selaku bendahara program JPES pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2009 mengatakan bahwa:

“ Meskipun pada pelaksanaannya di prioritaskan pada kegiatan padat karya namun proses pemberdayaan masyarakat pada keluarga miskin sudah berjalan dengan baik karena anggaran yang dikeluarkan lebih banyak pada pemberian upah kerjanya, dapat terlihat bahwaogra perekonomian warga dapat meningkat karena warga menginginkan pelaksanaan program JPES berkelanjutan.”

Menurut pengamatan peneliti di lapangan bahwa dalam tahap evaluasi pelaksanaan program JPES tidak ada permasalahan yang muncul karena dana yang dianggarkan sudah sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan, hal ini terlihat pada laporan pertanggungjawaban program JPES Kelurahan Dinoyo.

## **2. Hasil yang telah dicapai pelaksanaan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) Kelurahan Dinoyo Kota Malang**

### **a. Pavingisasi dan pembuatan gorong-gorong**

Kegiatan pembangunan paving dan menutup drainase di Kelurahan Dinoyo tepatnya dilaksanakan di jalan MT. Haryono X RT 05 RW V. Anggaran dana yang dianggarkan dari Kelurahan sebanyak 2,5 juta. Volume kegiatan untuk pavingisasi sekitar 100 M2 sedangkan drainasenya adalah 50 M2. berikut adalah rincian penggunaan dana JPES dalam pavingisasi dan pembuatan gorong-gorong:

**Tabel 2**  
**Rincian Penggunaan Dana Bantuan Jaring Pengaman Ekonomi Dan Sosial Dalam Pavingisasi Dan Pembuatan Gorong-Gorong.**

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Harga (rp.)	Penerima	Jumlah (rp.)
1.	19-11-08	1	Pembelian Paving	617.500	Toko Ahmad Ning	
			Benang	2.500		620.000
3.	30-11-08	3	Upah Kerja		Dasiran	1.880.000
					( Bendahara )	
			<b>Jumlah</b>			<b>2.500.000</b>

*Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Program JPES Kelurahan Dinoyo 2008*

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa pada tanggal 19 Kelurahan Dinoyo membeli November 2008 paving seharga Rp 617.500,- dan benang seharga Rp 2.500,- sehingga total pembelian paving dan benang adalah Rp 2.500.000. sedangkan pada tanggal 30 November 2008 Kelurahan Dinoyo yang diwakili oleh Dasiran selaku bendahara memberikan upah kerja sebesar Rp. 188.0000.

Tujuan dan manfaat pembangunan pavingisasi dan gorong-gorong ini adalah:

- 1) Memberdayakan keluarga miskin
- 2) Keindahan Kelurahan Dinoyo

Target dan sasaran pelaksanaan pavingisasi dan gorong-gorong ini adalah keluarga miskin kota Dinoyo di berdayakan agar mereka dapat ikut serta dalam pembangunan dan mendapat upah dari pemangunan pavingisasi dan drainase tersebut.

Kegiatan pembangunan pavingisasi dan gorong-gorong ini dilaksanakan secara gotong royong oleh warga Kelurahan Dinoyo dengan melibatkan 12 warga. Berikut adalah data mengenai daftar penerima upah tenaga kerja:

**Tabel 3**  
**Upah Tenaga Kerja**  
**Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) dalam Pembuatan**  
**Pavingisasi Dan Gorong-Gorong**

NO	NAMA PENERIMA	Hari Orang Kerja ( HOK ) Menurut Tanggal					Jumlah HOK	Jumlah Upah ( Rp. )
		26	27	28	29	30		
1.	Suryadi						5	200.000
2.	Untung						5	175.000
3.	Bambang						4	140.000
4.	Sumardi						5	175.000
5.	Surdji						5	175.000
6.	Dian						5	175.000
7.	Muklis						4	140.000
8.	Bayu						4	140.000
9.	Udin						4	140.000
10.	Bagio						4	140.000
11.	Alex						4	140.000
12.	Cak to						4	140.000
<b>JUMLAH</b>								<b>1.880.000</b>

*Sumber: laporan Hasil Kegiatan JPES Kelurahan Dinoyo 2008*

Dari tabel 3 mengenai daftar penerima upah tenaga kerja JPES dalam pembuatan pavingisasi dan gorong-gorong, bahwa warga yang bekerja 5 hari seperti Suuryadi, Untung, Sumardi, Surdji, dan Dian mendapatkan upah kerja sebesar Rp 175.000,00 sedangkan warga yang bekerja selama 4 hari seperti Bambang, Mukhlis, Bayu, Udin Bagio, Alel dan Cak To mendapat upah kerja sebesar Rp 140.000,00.

Menurut keterangan dari Bapak Suwignyo selaku Lurah pada Kelurahan Dinoyo pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2009 pukul 10.00 di kantor Kelurahan Dinoyo menyatakan:

“Pelaksanaan pembangunan pavingisasi dan drainase selain dapat memberdayakan warga agar mendapat penghasilan tambahan juga membantu kelancaran secara fisik aktivitas warga di Kelurahan Dinoyo.”

Sedangkan menurut Bapak Rahno selaku Ketua Pogakin pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2009 mengatakan:

“Pembangunan pavingisasi dan drainase ini membawa dampak positif dimana jalan yang tadinya masih tergenang air sekarang sudah tertata rapi maka keindahan jalanpun dapat terlihat.. Warga juga antusias dengan

adanya pelaksanaan pembangunan di daerahnya karena selain dapat meningkatkan perekonomian juga membuat jalan di MT. Haryono X RT 05 RW V menjadi lebih rapi.”

Pada saat melakukan penelitian, peneliti melihat kondisi jalan yang terletak di MT. Haryono X RT 05 RW V, terlihat bahwa jalan lebih rapi dan bersih dan tidak ada genangan air meskipun musim penghujan datang. Optimalisasi pelaksanaan JPES dalam pembangunan paving dan drainase sudah berjalan dengan baik.

#### b. Pembangunan Plengsengan Sungai

Kegiatan pembuatan plengsengan sungai di Kelurahan Dinoyo tepatnya dilaksanakan di jalan MT. Haryono VIII terusan RW IV. Anggaran dana yang dianggarkan dari Kelurahan sebanyak 1,5 juta. Volume kegiatan untuk pavingisasi sekitar 30 M2. Berikut adalah perincian dana JPES dalam pembangunan plengsengan sungai:

**Tabel 4**  
**Rincian Penggunaan Dana Bantuan Jaring Pengaman Ekonomi Dan Sosial Dalam Pembangunan Plengsengan Sungai.**

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Harga (rp)	Penerima	Jumlah (rp)
1	18-11-2008	1	Pasir	140.000	Toko Ahmad Ning	
			Semen	63.000		
			Semen	43.000		
			Batu	85.000		
			Kawat	4000		325.000
2	21-11-2008	2	Upah kerja			1.175.000
Jumlah						1.500.000

*Sumber: laporan Hasil Kegiatan JPES Kelurahan Dinoyo 2008*

Dari tabel 4 mengenai rincian penggunaan dana JPES dalam pembangunan plengsengan terlihat bahwa pada tanggal 18 November 2008 Kelurahan Dinoyo membeli pasir seharga Rp 140.000,00, semen Rp 63.000,00, semen Rp 43.000,00, batu kali seharga Rp 85.000,00 dan kawat seharga Rp 4.000,00. dan pada tanggal

21 November 2008 Kelurahan Dinoyo melalui Dasiran selaku bendahara memberikan upah kerja sebesar Rp 1.175.000,00 kepada warga Kelurahan Dinoyo yang ikut serta dalam pembangunan plengsengan.

Tujuan dan manfaat pembangunan plengsengan sungai ini adalah:

- 1) Memberdayakan keluarga miskin
- 2) Keselamatan warga penghuni sekitar sungai

Target dan sasaran pelaksanaan pembangunan plengsengan sungai ini adalah keluarga miskin kota Dinoyo di berdayakan agar mereka dapat ikut serta dalam pembangunan dan mendapat upah dari pembangunan tersebut.

Kegiatan pembangunan plengsengan sungai ini dilaksanakan secara gotong royong oleh warga Kelurahan Dinoyo dengan melibatkan 12 warga. Berikut adalah data mengenai daftar penerima upah tenaga kerja:

**Tabel 5**  
**Upah Tenaga Kerja**  
**Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) dalam Pembangunan**  
**Plengsengan Sungai**

NO	Nama Penerima	Hari Orang Kerja ( HOK ) Menurut Tanggal				Jumlah HOK	Jumlah Upah ( Rp. )
		18-Nop	19-Nop	20-Nop	21-Nop		
1.	Irfai					4	160.000
2.	Djumali					3	105.000
3.	Budi Sriadi					4	140.000
4.	Resemat					4	140.000
5.	Rubai					3	105.000
6.	Karnadi					3	105.000
7.	Sariono					3	105.000
8.	Madeli					3	105.000
9.	Rahno					3	105.000
10.	Fahmi					3	105.000
<b>JUMLAH</b>							<b>1.175.000</b>

*Sumber: laporan Hasil Kegiatan JPES Kelurahan Dinoyo 2008*

Dari tabel 5 mengenai daftar upah tenaga kerja dalam program JPES dalam pembangunan plengsengan terlihat bahwa 10 orang warga Kelurahan Dinoyo ikut terlibat diantaranya Ifrai, Budi Sriadi dan Resemat yang bekerja selama 4 hari mendapatkan upah sebesar Rp 140.000 masing-masing orang.

Sedangkan warga yang bekerja 3 hari seperti Djumali, Rubai, Karnadi, Sariono, Madeli, Rahno dan Fahmi menerima upah kerja sebesar Rp 105.000,00 masing-masing orang. Sehingga jumlah total yang dikeluarkan Kelurahan Dinoyo dalam pembangunan plengsengan sebesar Rp 1.175.000,00.

Menurut keterangan dari Bapak Suwignyo selaku Lurah pada Kelurahan Dinoyo pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2009 pukul 10.00 di kantor Kelurahan Dinoyo menyatakan:

“Pelaksanaan pembangunan plengsengan sungai selain dapat memberdayakan warga agar mendapat penghasilan tambahan juga membantu kelancaran secara fisik dan keselamatan warga sekitar sungai di Kelurahan Dinoyo.”

Senada dengan bapak Suwignyo, pendapat yang sama juga diutarakan oleh Bapak Rahno selaku Ketua Pogakin pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2009 bahwa:

“ Dengan adanya pelaksanaan kegiatan pembangunan plengsengan sungai maka penduduk disekitar sungai sudah tidak takut lagi dengan adanya bahaya banjir saat musim penghujan datang.”

Pada saat melakukan penelitian di MT. Haryono VIII terusan RW IV terlihat bahwa plengsengan sungai sudah dibangun dan air tidak dapat lagi naik keatas rumah warga. Selain itu lebih terlihat rapi dan bersih pada daerah sekitar sungai.

### **c. Pengerukan Sungai Kecil Melintang**

Kegiatan pengerukan sungai kecil melintang di Kelurahan Dinoyo tepatnya dilaksanakan di RW V, IV, dan I. Volume kegiatan untuk pavingisasi sekitar 1000 M2. Anggaran dana yang dianggarkan dalam pengerukan sungai kecil melintang sebesar 5 juta Berikut adalah perincian dana yang digunakan dalam pengerukan sungai kecil melintang:



**Tabel 6**  
**Rincian Penggunaan Dana**  
**Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) dalam Pengerukan Sungai**

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Harga (rp)	Penerima	Jumlah (rp)
1	14-12-2008	1	Cangkul	180.000	Toko Barokah	
			Sekop	120.000		
			Sabit	50.000		
			Keranjang	30.000		380.000
2	20 -12- 2008	2	Upah Kerja		Dasiran (bendahara)	4.620.000
<b>Jumlah</b>						<b>5.000.000</b>

*Sumber: laporan Hasil Kegiatan JPES Kelurahan Dinoyo 2008*

Dari tabel 6 dapat diketahui rincian penggunaan dana JPES dalam pengerukan sungai yaitu pada tanggal 14 Desember 2008 Kelurahan Dinoyo membeli cangkul seharga Rp 180.000,00, sekop seharga Rp 120.000,000, sabit seharga Rp 50.000,00 dan keranjang sebesar Rp 30.000,00. Maka total pengeluaran Kelurahan Dinoyo pada tanggal 14 Desember 2008 sebesar Rp 380.000,00. Sedangkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dinoyo pada tanggal 20 Desember 2008 sebagai upah kerja warga yang ikut serta dalam pengerukan sungai sebesar Rp 4.620.000,00.

Tujuan dan manfaat pengerukan sungai ini adalah:

- 1) Memberdayakan keluarga miskin
- 2) Keselamatan warga penghuni sekitar sungai

Target dan sasaran pelaksanaan pengerukan sungai ini adalah keluarga miskin kota Dinoyo di berdayakan agar mereka dapat ikut serta dalam pembangunan dan mendapat upah dari pengerukan sungai tersebut.

Kegiatan pengerukan sungai ini dilaksanakan secara gotong royong oleh warga Kelurahan Dinoyo dengan melibatkan 28 warga. Berikut adalah data mengenai daftar penerima upah tenaga kerja:

**Tabel 7**  
**Upah Tenaga Kerja**  
**Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) dalam Pengerukan**  
**Sungai**

No	Nama Penerima	Hari Orang Kerja ( HOK ) Menurut tanggal Pada Bulan Desember					Jumlah HOK	Jumlah Upah ( Rp. )
		26	27	28	29	30		
1.	Suliyanto						5	175.000
2.	Suratno						5	175.000
3.	Jumali						5	175.000
4.	Arif						5	175.000
5.	Supri						5	175.000
6.	Heni						5	175.000
7.	Teguh						5	175.000
8.	Deren						5	175.000
9.	Andik						5	175.000
10.	Riski						5	175.000
11.	Mariono						4	140.000
12.	Gasur						4	140.000
13.	Sukardi						4	140.000
14.	Bukhori						4	140.000
15.	Silo						4	140.000
16.	Iwan						4	140.000
17.	Ipan						4	140.000
18.	Wandi						4	140.000
19.	Ipon						5	140.000
20.	Janto						5	175.000
21.	Bambang						5	175.000
22.	Meseri						5	175.000
23.	Sipon						5	175.000
24.	Sumadi						5	175.000
25.	Bambang B						5	175.000
26.	Rahno						5	175.000
27.	Rahman						5	175.000
28.	Dasiran						5	175.000
<b>JUMLAH</b>							132	4.620.000

*Sumber: laporan hasil kegiatan JPES Kelurahan Dinoyo 2008*

Dari tabel 7 diatas mengenai daftar penerima upah kerja program JPES dalam pengerukan sungai dapat dilihat bahwa warga yang bekerja 5 hari seperti Suliyanto, Suratno, Jumali, Arif, Supri, Heni, Teguh, Deren, Andik, Riski, Ipon, Janto, Bambang, Meseri, Sipon, Sumadi, Bambang B, Rahno, Rahman Dan Dasiran mendapatkan upah kerja sebesar Rp 175.000,00 masing-masing orang.

Sedangkan warga yang bekerja selama 4 hari seperti Mariono, Gasur, Sumadi, Bokhori, Silo, Iwan, Ipan dan Wandu mendapat upah kerja sebesar Rp 140.000,00 masing-masing orang. Sehingga jumlah pengeluaran yang dikeluarkan Kelurahan Dinoyo untuk upah kerja sebesar Rp 4.620.000,00

Menurut keterangan dari Bapak Suwignyo selaku Lurah pada Kelurahan Dinoyo pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2009 pukul 10.00 di kantor Kelurahan Dinoyo menyatakan:

“Pelaksanaan pengerukan sungai selain dapat memberdayakan warga agar mendapat penghasilan tambahan juga menjaga keselamatan dan membantu kelancaran secara fisik aktivitas warga khususnya yang berada dipinggir sungai di Kelurahan Dinoyo.”

Senada dengan bapak Suwignyo pendapat yang sama juga diutarakan oleh bapak Rahno selaku ketua Pogakin di Kelurahan Dinoyo pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2009:

“Pelaksanaan pengerukan sungai ini sangat membawa dampak positif dalam hal ekonomi warga dimana 28 warga ikut terlibat. Dapat terlihat bahwa warga di Kelurahan Dinoyo cukup antusias dengan keadaan daerahnya. Pengerukan sungai ini dilaksanakan selama 5 hari kerja, karena sudah banyak warga yang terlibat maka pelaksanaan pengerukan sungai pun tidak berjalan lama. Warga sekitar sungai pun sudah merasa lega karena daerah yang mereka tempati tidak lagi terancam dengan bahaya banjir”

Pada saat peneliti mengadakan penelitian dan meninjau daerah sekitar sungai hasil yang didapat tidak begitu terlihat karena kegiatan pengerukan sungai bukan suatu pembangunan secara fisik dimana dapat langsung terlihat namun manfaat sangat dirasakan oleh warga sekitar.

#### **d. Perbaikan MCK**

Kegiatan perbaikan MCK di Kelurahan Dinoyo tepatnya dilaksanakan di RW IV RT I. Rencana usulan kegiatan pembangunan MCK adalah 3 (tiga) kamar, berhubung lahan dan kondisinya tidak memungkinkan dan kemampuan swadaya masyarakat terbatas maka untuk pelaksanaan hanya terealisasi 1 (satu) kamar mandi dan tempat cuci pakaian. Anggaran dana yang dianggarkan dalam pengerukan sungai kecil melintang sebesar 5 juta Berikut adalah perincian dana yang digunakan dalam perbaikan MCK:

**Tabel 8**  
**Rincian Penggunaan Dana**  
**Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) dalam Pengerukan MCK**

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Harga (Rp)	Penerima	Jumlah (Rp)
1.	17-11-2008	1	Pembelian Pasir	560.000	Toko Ahmad Ning	2.150.000
			Semen	530.000		
			Batu Merah	210.000		
			Seng	240.000		
			Kayu	250.000		
			Kayu Reng	240.000		
			Paku	7.500		
			Bendrat	7.500		
			Keramik	105.000		
2.	18-11-2008	2	Ember	20.000	Toko Ahmad Ning	100.000
			Sekop	60.000		
			Cetok	20.000		
3.	28-11-2008	3	Upah Kerja		Dasiran	2.750.000
			<b>Jumlah</b>			<b>5.000.000</b>

*Sumber: laporan hasil kegiatan JPES Kelurahan Dinoyo 2008*

Dari tabel 8 diatas mengenai rincian penggunaan dana program JPES dalam pembuatan MCK, bahwa pada tanggal 17 November 2008 Kelurahan Dinoyo membeli pasir seharga Rp 560.000,00, semen Rp 530.000,00, ,batu merah seharga Rp 210.000,00, seng Rp 240.000,00, kayu seharga Rp 250.000,00, kayu reng seharga Rp 240.000,00, paku seharga Rp 7.500,00, bendrat Rp 7.500,00 dan keramik seharga Rp 105.000,00. Sehingga total pembelian pada tanggal 17 November 2008 sebesar Rp 2.150.000,00. Sedangkan pengeluaran Kelurahan Dinoyo pada tanggal 18 November 2008 adalah ember seharga Rp 20.000,00, sekop Rp 60.000,00 dan cetok seharga Rp 20.000,00. sehingga pengeluaran Kelurahan Dinoyo pada tanggal 18 November 2008 sebesar Rp 100.000,00. dan pengeluaran Kelurahan Dinoyo pada tanggal 28 November 2008 untuk memberi upah kerja kepada warga yang ikut serta pada perbaikan MCK melalui Dasiran

selaku bendahara sebesar Rp 2.750.000,00.

Kegiatan perbaikan MCK ini dilaksanakan secara gotong royong oleh warga Kelurahan Dinoyo dengan melibatkan 27 warga. Berikut adalah data mengenai daftar penerima upah tenaga kerja:

**Tabel 9**  
**Upah Tenaga Kerja**  
**Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) dalam Perbaikan MCK**

NO	Nama Penerima	Hari Orang Kerja ( HOK ) Pada Bulan November											Jumlah HOK	Jumlah Upah ( Rp. )
		17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28		
1.	Gasur												11	440.000
2.	Kosim												11	385.000
3.	Solikin												11	385.000
4.	Jumlai												11	385.000
5.	Sulianto												11	385.000
6.	Dasiran												11	385.000
7.	Sabdono												11	385.000
<b>JUMLAH</b>														<b>2.750.000</b>

*Sumber: laporan hasil kegiatan JPES Kelurahan Dinoyo 2008*

Pada tabel 9 mengenai daftar penerima upah tenaga kerja dalam program JPES mengenai perbaikan MCK adalah warga yang bekerja selama 11 hari masing-masing Rp 385.000,00. sehingga jumlah total pengeluaran Kelurahan Dinoyo untuk pembiayaan upah kerja adalah Rp 385.000,00 masing-masing warga.

Pendapat bapak Suwignyo selaku Lurah di Kelurahan Dinoyo pada hari senin tanggal 29 Juni 2008 pukul 10.00 WIB mengenai perbaikan MCK ini adalah sebagai berikut:

”Meskipun perbaikan MCK ini tidak sesuai dengan rencananya yaitu memperbaiki 3 MCK namun sudah tercukupi kebutuhan warga di Kelurahan Dinoyo dengan adanya 1 MCK saja. Setidaknya warga yang kurang mampu tidak bingung lagi masalah MCK”

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Bapak Rahno selaku ketua Pogakin pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009 bahwa:

”Pembangunan MCK ini tidak sesuai dengan rencananya bahwa 3 tempat yang akan di bangun namun kenyataannya hanya 1 MCK saja yang dapat dibangun dikarenakan tempatnya yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pembangunan. Dengan adanya 1 MCK sudah sangat membantu warga dalam kehidupan sehari-hari.”

Menurut pengamatan secara langsung oleh peneliti dengan dibangunnya MCK ternyata sangat bermanfaat untuk penduduk kurang mampu yang berada di sekitar tempat pembangunan MCK tersebut.

#### e. Perbaikan Saluran Air Dan Plengsengan

Kegiatan perbaikan saluran air dan plengsengan di Kelurahan Dinoyo tepatnya dilaksanakan di jl. MT Haryono XIII/makam. Anggaran dana yang dianggarkan dalam perbaikan saluran air dan plengsengan sebesar 20 juta Berikut adalah perincian dana yang digunakan dalam perbaikan saluran air dan MCK:

**Tabel 10**  
**Rincian Penggunaan Dana**  
**Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) dalam Perbaikan Saluran Air dan Plengsengan**

No	Tanggal	No.Bukti	Uraian	Harga (Rp.)	Penerima	Jumlah (Rp.)
1.	16-11-2008	1	Pembelian Pasir	2.520.000	UD. Dinoyo Jaya	8.553.000
			Semen	1.643.000		
			Batu Merah	140.000		
			Batu Kali	4.250.000		
2.	17-11-2008	2	Ember	25.000	Toko Ahmad Ning	227.000
			Sekop	120.000		
			Cetok	22.000		
			Cangkul	60.000		
3.	06-12-2008	3	Upah kerja		Dasiran (Bendahara)	11.220.000
			<b>Jumlah</b>			<b>20.000.000</b>

Sumber: laporan hasil kegiatan JPES Kelurahan Dinoyo 2008

Dari tabel 10 mengenai rincian penggunaan dana JPES dalam perbaikan saluran air dan plengsengan dapat diketahui bahwa pada tanggal 16 November 2008 pengeluaran dana kelurahan Dinoyo sebesar Rp 8.553.000,00, dengan perincian yaitu pembelian pasir sebesar Rp 2.520.000,00, semen sebesar Rp 1.643.000,00, batu merah sebesar Rp 140.000,00, dan batu kali sebesar Rp

4.250.000,00. Sedangkan 17 November 2008 Kelurahan Dinoyo mengeluarkan dana sebesar Rp 227.000,00 dengan rincian yaitu ember sebesar Rp 25.000,00, sekop sebesar Rp 120.000,00, cetok sebesar Rp 22.000,00, dan cangkul sebesar Rp 60.000,00. Pada tanggal 6 Desember Kelurahan Dinoyo mengeluarkan dana untuk upah kerja sebesar Rp 11.220.000,00.

Kegiatan perbaikan saluran air dan plengsengan ini dilaksanakan secara gotong royong oleh warga Kelurahan Dinoyo dengan melibatkan 18 warga. Berikut adalah data mengenai daftar penerima upah tenaga kerja:

**Tabel 11**  
**Upah Tenaga Kerja**  
**Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) dalam Perbaikan**  
**Saluran Air dan Plengsengan**

NO	Nama Penerima	Hari orang Kera (HOK) Menurut Tanggal							HOK	(Rp)
		17	20	25	30	01	06			
1.	Gentur							18	720.000	
2.	Anto							18	630.000	
3.	Asim							17	595.000	
4.	Suratno							17	595.000	
5.	Amali							18	630.000	
6.	Supri							18	630.000	
7.	Mariono							18	630.000	
8.	Arip							17	595.000	
9.	Djoko							17	595.000	
10.	Wakri							18	630.000	
11.	Heni							18	630.000	
12.	Dono							18	630.000	
13.	Sholeh							18	630.000	
14.	Riaji							18	630.000	
15.	Yusuf							17	595.000	
16.	Suharno							17	595.000	
17.	Rahno							18	630.000	
18.	Dasiran							18	630.000	
Jumlah									11.220.000	

Sumber: laporan hasil kegiatan JPES Kelurahan Dinoyo 2008

Dari tabel 11 dapat diketahui daftar penerima upah tenaga kerja program JPES dalam perbaikan saluran air dan plengsengan berjumlah 18 orang, yang bekerja selama 18 hari sekitar 12 orang dengan upah kerja Rp 720.000,00 masing-masing orang. Sedangkan yang bekerja selama 17 hari sebanyak 6 orang dengan upah kerja sebesar Rp 630.000,00 masing-masing orang. Sehingga total biaya

upah kerja dikeluarkan Kelurahan Dinoyo dalam perbaikan saluran air dan plengsengan sebesar Rp 11.220.000,00.

Perbaikan saluran air dan plengsengan ini mengeluarkan biaya yang tidak sedikit hal ini disampaikan oleh Bapak Suwignyo selaku Lurah di kelurahan Dinoyo pada hari Senin tanggal 29 Juni pukul 10.00 WIB, bahwa:

“ Dana yang tidak sedikit dikeluarkan oleh pemerintah untuk perbaikan saluran air dan plengsengan. Ini dikarenakan volume kegiatannya juga luas. Dalam perbaikan saluran air dan plengsengan memang terlihat bahwa pengeluaran terbanyak adalah biaya upah kerja, jelas terlihat pemberdayaan masyarakat khususnya Kelurahan Dinoyo dapat berjalan dengan baik yaitu dengan meningkatkan perekonomian warga.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Dasiran selaku bendahara pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009 bahwa:

“Dalam pelaksanaan perbaikan saluran air dan plengsengan dana yang dikeluarkan lebih banyak pada upah kerja warga sekitar. Disini terlihat antusiasme warga besar terhadap lingkungan daerah mereka tinggal. Saluran air diperbaiki membawa dampak positif bagi warga, karena jalan didaerah mereka tidak lagi becek karena aliran air sudah terkontrol dengan adanya perbaikan saluran air yang diperbaiki sekarang.”

Pada saat peneliti melakukan obsevasi langsung ke lapangan maka dapat dilihat kondisi jalan yang rapi tidak terfapat genangan air dan saluran airpun sudah ditutup juga jadi diatasnya dapat dipakai jalan.

#### **f. Pengerukan Sungai Besar**

Kegiatan pengerukan sungai besar di Kelurahan Dinoyo tepatnya dilaksanakan di RW V, IV dan II. Anggaran dana yang dianggarkan untuk pengerukan sungai besar adalah sebesar 10 juta Berikut adalah perincian dana yang digunakan dalam pengerukan sungai besar.



**Tabel 12**  
**Rincian Penggunaan Dana**  
**Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) dalam Pengerukan**  
**Sungai Besar**

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Harga (rp)	Penerima	Jumlah (rp)
1	15-12-08	1	Cangkul	300.000	UD.Dinoyo	550.000
			Sekop	120.000		
			Sabit	50.000		
			Keranjang	80.000		
2	27-12-08	2	Upah kerja		Dasiran	9.450.000
<b>Jumlah</b>						<b>10.000000</b>

*Sumber: laporan hasil kegiatan JPES Kelurahan Dinoyo 2008*

Dari tabel 12 mengenai rincian dana JPES yang dikeluarkan guna dalam kegiatan pengerukan sungai besar dapat dilihat bahwa pengeluaran Kelurahan Dinoyo pada tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp 550.000,00 dengan rincian membeli cangkul Rp 300.000,00, sekop Rp 120.000,00, sabit Rp 50.000,00 dan keranjang sebesar Rp 80.000,00. sedangkan pada tanggal 27 Desember Kelurahan Dinoyo mengeluarkan dana sebesar Rp9.450.000,00 untuk membayar upah kerja para warga Kelurahan Dinoyo yang ikut serta.

Kegiatan pengerukan sungai besar ini dilaksanakan secara gotong royong oleh warga Kelurahan Dinoyo dengan melibatkan 30 warga. Berikut adalah data mengenai daftar penerima upah tenaga kerja:

**Tabel 13**  
**Upah Tenaga Kerja**  
**Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) dalam Pengerukan**  
**Sungai Besar**

NO	NAMA	Hari Orang Kerja ( HOK ) Menurut Tanggal Pada Bulan Desember 2008							jmlh	jmlh
		18-Des	19-Des	20-Des	25-Des	26-Des	27-Des	HOK		
1.	Kusyanto							9	315.000	
2.	Lianto							9	315.000	
3.	Tarmikun							9	315.000	
4.	Joko							9	315.000	
5.	Ngateman							9	315.000	
6.	Riyanto							9	315.000	
7.	Jiono							9	315.000	
8.	Sujatmiko							9	315.000	
9.	Solichin							9	315.000	
10.	Irfai							9	315.000	
11.	Supeni							9	315.000	
12.	Haruono							9	315.000	
13.	Didik							9	315.000	
14.	Jeping							9	315.000	
15.	Mustofa							9	315.000	
16.	Nuryanto							9	315.000	
17.	Sulian Sabar							9	315.000	
18.	Hamid							9	315.000	
19.	Saptono							9	315.000	
20.	Siadiono							9	315.000	
21.	Supratman							9	315.000	
22.	Yusuf							9	315.000	
23.	Asim							9	315.000	
24.	Guntur							9	315.000	
25.	Sanggup							9	315.000	
26.	Saiful Anam							9	315.000	
27.	Afis							9	315.000	
28.	Sanuji							9	315.000	
29.	Rahno							9	315.000	
30.	Dasiran							9	315.000	
<b>JUMLAH</b>									<b>9.450.000</b>	

Sumber: laporan hasil kegiatan JPES Kelurahan Dinoyo 2008

Dari tabel 13 mengenai penerimaan upah tenaga kerja yang ikut dalam program JPES dalam pengerukan sungai besar dapat dilihat bahwa warga yang

bekerja selama 9 hari mendapatkan upah kerja sebesar Rp 315.000,00 masing-masing orang dengan jumlah tenaga kerja 30 orang, sehingga total pengeluaran yang dikeluarkan Kelurahan Dinoyo dalam memberikan upah tenaga kerja sebesar Rp 9.450.000,00.

Pengerukan sungai besar ini banyak sekali tujuan dan manfaatnya. Manfaat yang dirasakan warga adalah penghasilan tambahan yang dapat membantu menambah penghasilan warga dan juga menjaga keselamatan warga sekitar sungai.

Menurut Bapak Suwignyo selaku Lurah di Kelurahan Dinoyo pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009 mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan kegiatan pengerukan sungai besar ini banyak sekali warga yang terlibat, sekitar 30 orang warga ikut terlibat mengingat volume kegiatan juga yang cukup luas. Maka dari itu pengeluaran terbesar dari kegiatan pengerukan sungai besar ini adalah upah kerja warga yang mencapai Rp 9.450.000.00.”

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Bapak Dasiran selaku bendahara pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009 bahwa:

“Program JPES memang sebenarnya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga, yang terjadi dari kegiatan pengerukan sungai besar ini proses pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik setidaknya banyak warga yang ikut terlibat mengingat pengerukan sungai besar ini dapat menambah kapasitas air yang dapat tertampung sehingga bahaya banjir tidak ada lagi.”

Pada saat peneliti melakukan observasi langsung ke daerah pengerukan sungai besar, ada sejumlah warga yang mengatakan manfaat yang besar dengan adanya pengerukan sungai besar ini dimana bahaya banjir di daerah mereka tidak lagi ada, meskipun secara kasat mata pengerukan sungai besar tidak dapat terlihat karena bukan pembangunan fisik yang langsung dapat dilihat.

#### **g. Pengerukan Saluran Air**

Kegiatan pengerukan saluran air di Kelurahan Dinoyo tepatnya dilaksanakan di jl Sunan Kalijaga RT VII. Anggaran dana yang dianggarkan untuk pengerukan sungai besar adalah sebesar 5 juta Berikut adalah perincian dana yang digunakan dalam pengerukan saluran air:

**Tabel 14**  
**Rincian Penggunaan Dana**  
**Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) dalam Pengerukan**  
**Saluran Air**

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Harga (Rp.)	Penerima	Jumlah (Rp.)
1.	20-Des-08	1	Cangkul	120.000	Toko Barokah	
			Sekop	60.000		
			Sabit	30.000		
			Keranjang	30.000		240.000
2.	27-Des-08	2	Upah kerja		Dasiran ( Bendahara )	4.760.000
			<b>Jumlah</b>			<b>5.000.000</b>

*Sumber: laporan hasil kegiatan JPES Kelurahan Dinoyo 2008*

Dari tabel 14 mengenai rincian dana yang dikeluarkan Kelurahan Dinoyo pada program JPES untuk pengerukan saluran air, bahwa pada tanggal 20 Desember 2008 Kelurahan Dinoyo membeli cangkul seharga Rp 120.000,00, sekop seharga Rp 60.000,00, sabit seharga Rp 30.000,00 dan keranjang seharga Rp 30.000,00. sehingga total pengeluaran pada tanggal 20 Desember sebesar Rp 240.000,00. sedangkan pengeluaran pada tanggal 27 Desember 2008 kelurahan dinoyo membayar upah kerja para warga sebesar Rp 4.760.000,00 sehingga total pengeluaran Kelurahan Dinoyo dalam pengerukan saluran air ini sebesar Rp 5.000.000,00.

Kegiatan pengerukan saluran air ini dilaksanakan secara gotong royong oleh warga Kelurahan Dinoyo dengan melibatkan 28 warga. Berikut adalah data mengenai daftar penerima upah tenaga kerja:

**Tabel 15**  
**Upah Tenaga Kerja**  
**Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) dalam Pengerukan**  
**Saluran Air**

NO	NAMA	Hari Orang Kerja ( HOK ) Menurut tanggal Pada Bulan Desember 2008					Jumlah HOK	Jumlah Upah ( Rp. )
		23	24	25	26	27		
1.	Solikin						5	175.000
2.	Supandri						5	175.000
3.	Siono						5	175.000
4.	Kacung						5	175.000
5.	Soleh						5	175.000
6.	Dulmanap						5	175.000
7.	Misdi						5	175.000
8.	Sutrisno						5	175.000
9.	Takri						5	175.000
10.	Suharno						5	175.000
11.	Rofil						5	175.000
12.	Jeping						5	175.000
13.	Jumari						5	175.000
14.	Miaji						5	175.000
15.	Isrofi						5	175.000
16.	Suyono						5	175.000
17.	Jumain						5	175.000
18.	Kasiadi						5	175.000
19.	Poniman						5	175.000
20.	Misdianto						5	175.000
21.	Saiful Anam						5	175.000
22.	Dasiran						5	175.000
23.	Rahno						5	175.000
24.	Jumali						5	175.000
25.	Sardi						4	140.000
26.	Ali						4	140.000
27.	Sudarji						4	140.000
28.	Amin						4	140.000
							136	4.760.000

*Sumber: laporan hasil kegiatan JPES Kelurahan Dinoyo 2008*

Dari tabel 15 mengenai penerimaan upah kerja pada kegiatan pengerukan saluran air ini yang bekerja selama 4 hari mendapat upah kerja sebesar Rp 140.000,00 masing-masing orang. Sedangkan yang bekerja selama 5 hari mendapatkan upah kerja sebanyak Rp 175.000,00 masing-masing orang. Sehingga biaya yang dikeluarkan Kelurahan Dinoyo dalam kegiatan pengerukan

saluran air ini sebesar Rp 4.760.000,00.

Menurut Bapak Dasiran selaku bendahara pada tanggal 30 Juni 2008 pukul 11.00 WIB menyatakan:

“ Kegiatan pengerukan saluran air ini bertujuan agar pada saat musim penghujan datang warga tidak lagi diresahkan dengan adanya banjir. Sehingga aktivitas warga dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya”

Senada dengan pendapat diatas Bapak Rahno selaku bendahara pada program JPES pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2009 mengatakan bahwa:

“Semua kegiatan pada program JPES ini sepenuhnya agar masyarakat dapat diberdayakan dan juga fasilitas yang ada dapat difungsikan kembali.. termasuk juga pengerukan saluran air ini. Setidaknya dengan adanya pengerukan saluran air ini maka sampah-sampah yang ada dapat dibersihkan dan juga mengurangi terjadinya banjir”

Pada saat peneliti melakukan observasi yang terlihat salurah air yang bersih dan tidak lagi ada sampah yang tergenang, karena saluran airnya bukan saja dikeruk namun juga ditutup untuk menghindari sampah warga yang dulu dibuang disaluran air tersebut.

### **3. Faktor-faktor penghambat dan pendukung terlaksananya program JPES Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru**

#### **a. Faktor penghambat program JPES di Kelurahan Dinoyo**

##### **1) Kualitas SDM yang kurang memadai**

Warga Kelurahan Dinoyo banyak juga yang masih menganggur, diharapkan dengan adanya program JPES dapat memberdayakan keluarga miskin untuk turut serta dalam program-program JPES nantinya. Namun kebanyakan warga di Kelurahan Dinoyo malas untuk bekerja akibatnya pelibatan masyarakat dalam program JPES ini kurang maksimal.

Menurut Bapak Dasiran selaku Bendahara pada program JPES yang dilaksanakan di Kelurahan Dinoyo pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2008 menyatakan :

” Warga Kelurahan Dinoyo yang terlibat dalam program JPES hanya sedikit kebanyakan mereka gengsi karena menjadi tukang atau kuli. Hal inilah yang membuat derajat ekonomi mereka menurun. Padahal upah kerja yang diberikan pada program JPES ini lumayan tinggi.”

Senada dengan Bapak Dasiran, Bapak Suwignyo selaku Lurah di Kelurahan Dinoyo pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2008 menyatakan:

” Warga Kelurahan Dinoyo yang bisa berpikiran panjang hanya sedikit orang saja, maka dari itu hanya sedikit warga yang terlibat dalam pelaksanaan program JPES. Selain itu warga yang ikut serta rata-rata mereka juga ikut dalam proyek yang lainnya. Jadi mereka tidak bekerja dalam 1 proyek saja namun juga bekerja di proyek-proyek JPES berikutnya.”

Menurut keadaan dilapangan sesuai hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan bahwa masyarakat di Kelurahan Dinoyo kebanyakan mengenyam pendidikan yang tidak tinggi mungkin dikarenakan pemikiran yang masih kurang maju dan mereka terkesan gengsi untuk ikut serta dalam program JPES padahal bila dilihat kehidupan ekonomi mereka juga belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini yang menyebabkan terhambatnya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian di Kelurahan Dinoyo.

- 2) Belum terbentuknya kelompok masyarakat sebagai mitra dari pemerintah

Masyarakat terkadang enggan membentuk suatu kelompok kerja misalkan seperti siskamling dan yang lainnya. Akibatnya warga yang bertempat tinggal di RW IV ikut serta juga dalam pengerjaan proyek di RW V. Hal ini terlihat bahwa kelompok masyarakat belum sepenuhnya terbentuk.

Bapak Suwignyo selaku Lurah pada Kelurahan Dinoyo sudah pernah mengatakan dan menyuruh agar segera dibentuk kelompok kerja yang nantinya akan turut serta dalam pelaksanaan program JPES di Kelurahan Dinoyo.

Menurut Bapak Dasiran selaku bendahara juga mengatakan pendapatnya bahwa:

”Masyarakat kurang mengerti dengan program padat karya yang ada dalam program JPES ini maka dari itu dengan pemahaman yang kurang maka masyarakat hanya diminta membentuk suatu kelompok yang nantinya bisa mempercepat pelaksanaan JPES ini juga sulit. Mereka masih gengsi dengan adanya program JPES ini padahal mereka sebenarnya juga mengharapkan upah kerja yang akan diterimakan bagi warga yang ikut serta”

#### **b. Faktor pendukung program JPES di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru**

##### **1) Masyarakat mendukung dan mau ikut serta dalam program JPES**

Pelaksanaan program JPES ini di dukung juga oleh warga Kelurahan Dinoyo. Mereka yang ingin meningkatkan ekonominya rata-rata turut serta pada program JPES yang dilaksanakan di Kelurahan Dinoyo. Meskipun masih ada warga yang beranggapan gengsi untuk turut serta dalam pelaksanaan program JPES ini.

Menurut bapak Suwignyo selaku Lurah pada hari Selasa tanggal 30 Juni mengatakan bahwa:

” Antusias warga yang mau turut serta dalam program JPES cukup bagus. Warga sungguh-sungguh dalam pengerjaan program JPES. Meskipun tidak semua warga dapat terlibat namun program JPES di Kelurahan Dinoyo sudah berjalan optimal”

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Bapak Rahno selaku ketua Pogakin pada Selasa tanggal 30 Juni 2009 mengatakan bahwa:

”Warga sudah merasakan dampak yang ada dengan adanya program JPES selain lingkungan mereka lebih rapi dan saran prasarana dapat dipakai lagi, upah kerja yang diterimakan membuat warga juga menginginkan adanya program yang berkelanjutan.”

Menurut peneliti di lapangan pada saat observasi banyak pendapat warga yang menyatakan bahwa adanya program JPES sangat membantu perekonomian mereka dan juga mereka mengharapkan untuk ada program berkelanjutan dari JPES di Kelurahan Dinoyo.

##### **2) Pemerintah turun langsung guna untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Program JPES.**



Dalam pelaksanaan program JPES pemerintah turun langsung mengawasi pelaksanaan JPES. Misalakan dengan adanya foto-foto sarana dan prasaranan yang rusak dan juga foto sesudah di laksanakan program JPES di Kelurahan Dinoyo.

Menurut Bapak Suwignyo pada hari Selasa tanggal 30 Juni menyatakan bahwa :

”Petugas selalu ada dan mengawasi terlaksananya program JPES agar dana yang telah diberikan oleh pemerintah dapat tersalurkan dengan semestinya dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan.”

Sejalan dengan pendapat diatas bapak Dasiran selaku bendahara menyatakan bahwa:

“Dalam hal keuangan dan pelaksanaan pada program JPES pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Bapekko agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada penyimpangan dalam urusan dana yang diberikan”

### C. Analisis Data

Setelah penulis menyajikan data dari berbagai aspek program JPES yang diharapkan dapat menyokong perekonomian warga di perkotaan yang khususnya dilaksanakan di Kelurahan Dinoyo, maka selanjutnya dalam penulisan ini disajikan analisis data. Dan pada akhirnya dengan adanya sajian analisa data ini dapat ditarik suatu kesimpulan yang sesungguhnya. Mengenai terlaksananya program JPES di Kelurahan Dinoyo yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Proses pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat perkotaan melalui program JPES di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru

##### a. Tahap Perencanaan

Didalam perencanaan program JPES maka pemerintah sebelumnya sudah menekankan prinsip dasar pengelolaan JPES berikut adalah prinsip-prinsipnya (<http://www.jawapos.co.id>):

- 1) Akseptabel, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antar pelaku, sehingga memperoleh dukungan semua pihak.
- 2) Transparan, dilakukan secara terbuka, sehingga dapat terkendali dan terwujud.

- 3) Akuntabel, harus dapat dipertanggung jawabkan secara struktural dan social kepada masyarakat.
- 4) Keterpaduan, harus dapat dipertanggung jawabkan secara struktural dan social kepada masyarakat
- 5) Keberlanjutan, memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan dan jangka panjang.

Program bantuan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) tahun 2008 diperuntukkan bagi keluarga miskin di Kota Malang. Program ini disosialisasikan kepada 57 kelurahan.

Sebanyak 57 kelurahan akan menerima bantuan dana program JPES ini. Alokasi dana JPES bersumber dari APBD Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 730 juta, diarahkan pada sembilan kelurahan di lima wilayah kecamatan. Yakni masing-masing lokasi adalah, Kel. Blimbing dan Kel. Balarjosari di Kecamatan Blimbing, Kel. Bandulan dan Mulyorejo di Kec Sukun, Kel. Dinoyo dan Kel. Tasikmadu di Kec. Lowokwaru, Kel. Madyopuro di Kecamatan Kedungkandang, serta Kel. Klojen dan Kel. Penanggungan di Kec, Klojen. Pemkot Malang sendiri menyediakan dana pendamping sebesar Rp 1,7 miliar untuk 49 kelurahan di Kota Malang. Sehingga total dana yang akan dikucurkan sebesar Rp 2,43 Miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Malang, Ir. Bachtiar Ismail mengatakan, program pengentasan kemiskinan tersebut difokuskan dalam program padat karya. Yaitu dengan membangun sarana dan prasarana di kelurahan setempat, seperti jembatan, plensengan, saluran air, penegrasan jalan dan lain-lain, dengan melibatkan masyarakat miskin setempat.

Bachtiar menjelaskan, JPES merupakan program pengentasan kemiskinan yang spesifik di Jawa Timur. Bentuknya pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat miskin. Dengan begitu diharapkan, masyarakat miskin mampu berkembang.

Perencanaan Program JPES di Kelurahan Dinoyo sudah cukup optimal. Aparat kelurahan Dinoyo membuat proposal kegiatan yang berisikan kegiatan apa saja yang nantinya akan dilaksanakan dalam

program JPES misalnya pavingisasi dan pembuatan gorong-gorong, pembangunan plengsengan sungai, pengerukan sungai kecil melintang, perbaikan MCK, perbaikan saluran air dan plengsengan, pengerukan sungai besar, pengerukan saluran air. Bukan hanya kegiatan saja yang terdapat dalam proposal perencanaan program JPES namun seperti anggaran biaya dan juga volume kegiatan juga sudah direncanakan dan dianggarkan.

Pendapat yang sama diutarakan oleh Bapak Suwignyo, Bapak Dasiran dan Bapak Rahno bahwa perencanaan program JPES harus disiapkan atau dipikirkan apa saja yang harus dimasukkan dalam proposal kegiatan misalnya saja berapa kegiatan atau pembangunan fisik dilakukan agar nanti dapat dianggarkan biayanya dan juga volume kegiatan nya sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak ada kendala.

Proposal kegiatan tersebut juga direvisi dan juga disetujui oleh Bapekko dan pada akhirnya boleh dilaksanakan di Kelurahan Dinoyo dan melibatkan masyarakat Dinoyo agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan adanya upah kerja.

Dapat ditarik kesimpulan dengan adanya proses perencanaan dalam tahapan JPES maka pada saat itu proses sosial sudah terjalin antara aparat Kelurahan Dinoyo dengan masyarakat membahas pelaksanaan JPES di Kelurahan mereka.

#### **b. Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan program JPES di Kelurahan Dinoyo yang sebagian besar berupa pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Dinoyo, berjalan lancar. Pelaksanaan program bantuan fisik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini ditarget harus rampung akhir tahun. Untuk mengejar target itu dirasa tidak ada masalah. Bahkan Kelurahan Dinoyo sudah dapat menyelesaikan hampir 100 %. Dari hasil monitoring program JPES di Malang, setidaknya mencatat dua Kelurahan penerima program bantuan peningkatan kesejahteraan ini yang sudah merampungkan 100 % salah satunya Kelurahan Dinoyo.

Cepat selesainya pelaksanaan kegiatan JPES karena masyarakat sudah siap secara dini. Tidak hanya material juga menyangkut tingkat kesadaran masyarakat akan gotong royong..

Antusiasme warga Kelurahan Dinoyo yang cukup tinggi sangat membantu dalam pelaksanaan program JPES. Warga dengan sukarela ikut serta dalam pelaksanaan program JPES dengan ikut melibatkan diri misalakan antusiasme warga RW V dalam pengerukan sungai. Mereka merasa juga dengan adanya pengerukan sungai nantinya kawasan penduduk sekitar sungai akan aman dari bahaya banjir.

Pelaksanaan Program JPES di Kelurahan Dinoyo cukup membantu perekonomian masyarakat Dinoyo, hal ini dikarenakan upah kerja yang diterimakan juga cukup tinggi. Dapat dilihat dari penjelasan Bapak Suwignyo selaku Lurah kehidupan masyarakat lebih meningkat mereka tidak lagi bingung membeli kebutuhan pokok misalakan beras dan lain-lain.

Dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program JPES ini juga harus sesuai dengan anggaran yang dianggarkan dari Pemerintah Kota Malang, tidak ada dana tambahan jika dana sudah dianggarkan dari Pemerintah Kota Malang. Jadi petugas di Kelurahan Dinoyo harus behati-hati dalam menganggarkannya.

Dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan program JPES sangat membantu perekonomian warga miskin dimana warga miskin diberdayakan untuk mengikuti kegiatan JPES dengan mendapatkan upah kerja.

### **c. Tahap Evaluasi**

Peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan padat karya dalam program JPES tersebut sangat penting. Khususnya peningkatan produktivitas dan kebersamaan, tanggungjawab dan rasa memiliki terhadap sarana prasarana yang telah dibangun. Ini terbukti dalam realisasi pembangunan JPES tahun 2008 di Kelurahan Dinoyo Kota Malang.

Kemanfaatan program jaring pengaman ekonomi dan sosial (JPES) mulai dirasakan warga. Kelompok keluarga miskin (Pokgakin) yang menjadi pelaksana kegiatan di setiap keluarahan berharap adanya program

pembangunan berkelanjutan. Sehingga peningkatan infrastruktur dan penguatan ekonomi kemasyarakatan semakin terlihat nyata. Pelaksana kegiatan yang dipercayakan kepada keluarga miskin tersebut untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Dengan penyediaan lapangan kerja produktif bagi tenaga kerja masyarakat setempat di lokasi pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Jadi Pokgakin ini terlibat langsung baik dalam proses administrasi, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya, Warga memang telah mengawali menyediakan material sejak awal sejak mengetahui kelurahannya dapat program JPES. Masyarakat bergotong royong menyediakan material yang dibutuhkan. Sehingga ketika dana cair, maka langsung dilaksanakan dan dalam waktu yang tidak begitu lama sudah selesai.

Mulusnya penyelesaian program JPES di Kelurahan Dinoyo ini juga terkait dengan banyaknya partisipasi atau swadaya masyarakat. Karena melihat pentingnya sarana yang diperbaiki misalnya pavingisasi dan pembuatan gorong-gorong, pembangunan plengsengan sungai, pengerukan sungai kecil melintang, perbaikan MCK, perbaikan saluran air dan plengsengan, pengerukan sungai besar, pengerukan saluran air, masyarakat tanpa disuruh banyak membantu pekerjaannya.

Pada tahap evaluasi ini laporan akhir dari semua kegiatan program JPES yang dilaksanakan di Kelurahan Dinoyo dilaporkan kepada Bapeko selaku instansi yang terkait dalam pengurusan program JPES di Kota Malang.

Bukan hanya hasil yang dicapai saja namun perincian dana yang terpakai dan realisasi dana dari Pemerintah Kota Malang sesuai atau tidak juga ikut dilaporkan. Tidak lupa pemberdayaan masyarakat dengan adanya program JPES juga ikut dilaporkan dan dievaluasi.

Dapat ditarik kesimpulan hasil evaluasi dari program JPES di Kota Malang cukup optimal dimana dana yang terpakai sesuai dengan anggaran dari Pemerintah Kota Malang dan pelaksanaan JPES juga cukup maksimal dan tidak memakan waktu lama. Masyarakat banyak juga yang terlibat dalam program JPES ini. Pada intinya dengan adanya program JPES padat

karya ini membawa dampak positif dimana warga dapat tersokong ekonominya sehingga pemberdayaan masyarakatpun sudah tercapai. Dan pembangunan fisik di Kelurahan Dinoyo dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga di Kelurahan Dinoyo. Masyarakat juga menginginkan adanya pembangunan berkelanjutan dengan adanya program JPES ini karena dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Kelurahan Dinoyo.

## **2. Hasil yang telah dicapai pelaksanaan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) Kelurahan Dinoyo Kota Malang**

### **a. Pavingisasi dan pembuatan gorong-gorong**

Program JPES yang dilaksanakan di jalan MT. Haryono X RT 05 RW V dalam pembangunan paving dan pembuatan gorong-gorong manfaatnya sangat dirasakan oleh warga setempat. Jalan yang dulunya masih tanah dan jika hujan masih tergenang air sekarang sudah terlihat rapi dan bersih.

Untuk pavingisasi dan pembuatan gorong-gorong dapat dilihat pada tabel 2 mengenai rincian penggunaan yang terpakai dalam kegiatan tersebut biasanya pembelian paving dan benang seharga Rp 620.000 dan pembayaran upah kerja warga yang ikut terlibat sejumlah Rp 1.880.000,00. Dalam pelaksanaannya ternyata tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Namun manfaat yang dihasilkan dari pembangunan paving dan gorong-gorong amat dirasakan warga.

Antusiasme warga juga ditunjukkan dengan keikutsertaan warga dalam pembangunan pavingisasi dan gorong-gorong seperti yang terdapat di tabel 3 mengenai perincian upah kerja, dimana terdapat 12 warga yang ikut terlibat dalam kegiatan ini. Warga yang bekerja selama 5 hari menerima upah kerja sebesar Rp 175.000,00 per orang dan sebanyak 5 orang yang bekerja selama 5 hari sedangkan yang bekerja selama 4 hari sebanyak 7 orang dengan upah kerja sebesar Rp 140.000,00. Ini berarti dengan adanya program JPES padat karya memang banyak membawa manfaat.

Dengan pembangunan paving dan gorong-gorong warga tidak lagi khawatir jika musim penghujan datang karena dapat menyebabkan jalannya becek dan tidak terlihat rapi dan teratur. Sedangkan dengan dibangunnya gorong-gorong juga sangat bermanfaat karena aliran air tidak lagi bermuara ke jalan lagi namun sudah masuk ke gorong-gorong tersebut dan tidak lagi terjadi banjir dan kegiatan warga juga dapat berjalan dengan baik.

Keuntungan dengan dibangunnya pavingisasi dan gorong-gorong juga disampaikan oleh Bapak Suwignyo selaku Lurah di Kelurahan Dinoyo menurutnya kegiatan tersebut dapat memberdayakan warga dan membantu perekonomian warga. Selain itu secara fisik dapat dilihat jalan yang sudah dipasang paving juga lebih bersih dan teratur dan saluran air sudah lewat gorong-gorong dan tidak terjadi banjir lagi.

Dapat disimpulkan dengan adanya pavingisasi dan gorong-gorong warga dapat terlibat, dengan adanya keterlibatan warga maka proses pemberdayaan masyarakat sudah terbentuk dan juga perekonomian warga dapat meningkat. Selain itu manfaat fisik yang dapat dilihat adalah tidak lagi ada bahaya banjir lagi di Kelurahan Dinoyo.

#### **b. Pembangunan Plengsengan Sungai**

Program JPES yang dilaksanakan di jalan MT. Haryono VIII terusan RW IV dalam pembangunan plengsengan sungai manfaatnya sangat dirasakan oleh warga setempat. Warga tidak lagi khawatir dengan adanya banjir.

Untuk pembangunan plengsengan sungai dapat dilihat pada tabel 4 mengenai rincian penggunaan yang terpakai dalam kegiatan tersebut bawasanya pembelian bahan-bahan bangunan seharga Rp 325.000 dan pembayaran upah kerja warga yang ikut terlibat sejumlah Rp 1.175.000,00. Dalam pelaksanaannya ternyata tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Namun manfaat yang dihasilkan dari pembangunan plengsengan sungai amat dirasakan warga.

Antusiasme warga juga ditunjukkan dengan keikutsertaan warga dalam pembangunan plengsengan sungai seperti yang terdapat di tabel 5

mengenai perincian upah kerja, dimana terdapat 10 warga yang ikut terlibat dalam kegiatan ini. Warga yang bekerja selama 3 hari menerima upah kerja sebesar Rp 105.000,00 per orang dan sebanyak 3 orang yang bekerja selama 5 hari sedangkan yang bekerja selama 4 hari sebanyak 7 orang dengan upah kerja sebesar Rp 140.000,00. Ini berarti dengan adanya program JPES padat karya memang banyak membawa manfaat. Warga disibukkan dengan kepedulian terhadap lingkungan pemukiman mereka. Dalam hal ini proses pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan sudah berjalan dengan baik.

Dengan pembangunan plengsengan sungai warga tidak lagi khawatir jika musim penghujan datang karena dapat menyebabkan jalannya becek dan tidak terlihat rapi dan teratur. dan tidak lagi terjadi banjir dan kegiatan warga juga dapat berjalan dengan baik.

Hal serupa mengenai manfaat dengan adanya plengsengan sungai juga disampaikan oleh Bapak Suwignyo bahwasanya dengan adanya program JPES dalam kegiatan pembangunan plengsengan sungai ini dapat memberdayakan masyarakat miskin dengan adanya upah kerja yang dapat menghasilkan penghasilan tambahan. Selain itu juga bahwa kelancaran aliran sungai juga terjaga jadi secara fisik warga juga dapat melaksanakannya.

Dapat disimpulkan dengan adanya plengsengan sungai warga dapat terlibat, dengan adanya keterlibatan warga maka proses pemberdayaan masyarakat sudah terbentuk dan juga perekonomian warga dapat meningkat. selain itu manfaat fisik yang dapat dilihat adalah aliran air menjadi lancar lagi di Kelurahan Dinoyo.

### **c. Pengerukan Sungai Kecil Melintang**

Pengerukan sungai kecil melintang yang dilaksanakan di di RW V, IV, dan I. Volume kegiatan untuk pavingisasi sekitar 1000 M2 sangat bermanfaat sekali buat warga sekitar dimana tidak akan terjadi banjir akibat sungai yang meluap.



Pengerukan ini penting, karena sungai kebanyakan sudah tertutup lumpur dan harus dikeruk. Jika sudah dikeruk memungkinkan daya tampung masing-masing saluran dapat kembali pada volume semula.

Biaya yang dikeluarkan dengan adanya kegiatan pengerukan sungai kecil melintang juga cukup banyak ini dapat dilihat pada tabel 6 mengenai rincian penggunaan dana JPES dalam pengerukan sunagi kecil melintang untuk membeli alat-alatnya menghabiskan dana sekitar Rp 380.000 dan untuk pembiayaan upah kerja sebesar Rp 4.620.000,00. Disini pengeluaran yang banyak adalah upah kerja warga dalam kegiatan pengerukan sungai dalam hal ini jelas bahwa proses pemberdayaan masyarakat di perkotaaan berjalan setidaknya warga tidak lagi menganggur dan perekonomian warga juga terbantu.

Kepedulian warga juga ditunjukkan dengan keikutsertaan warga dengan turut serta melaksanakan pengerukan sungai melintang ini. Dapat dilihat pada tabel 7 tentang daftar penerima upah tenaga kerja pada program JPES ini yaitu 28 orang ikut terlibat dimana terdapat 20 orang yang bekerja selama 5 hari dengan upah masing-masing orang sebanyak Rp 175.000,00 sedangkan yang bekerja selama 4 hari sebanyak 8 orang dengan upah masing-masing orang sebanyak Rp 140.000,00.

Banyak keuntungan yang dapat dirasakan oleh warga Kelurahan Dinoyo yaitu dengan adanya pengerukan sungai ini keselamatan warga selitar dapat terjaga dan juga perekonomian warga juga dapat meningkat. Bapak Suwignyo dalam hal ini juga berpendapat bahwa pengerukan sungai sangat perlu karena dikawatirkan lama-kelamaan sungai akan meluap dan dapat mengancam keselamatan warga sekitar sungai dengan adanya banjir. Pendapat Bapak Suwignyo dalam memprioritaskan kegiatan pengerukan sungai kecil melintang dalam program JPES yang dilaksanakan di Kelurahan Dinoyo sangatlah tepat karena warga sekitar tidak ada inisiatif untuk mengusulkan daerah mereka untuk pengerukan sungai, untung saja Bapak Suwignyo selaku Lurah dapat berpikir panjang mengenai keselamatan warganya.

Dapat disimpulkan dengan adanya pengerukan sungai kecil melintang warga dapat terlibat, dengan adanya keterlibatan warga maka proses pemberdayaan masyarakat sudah terbentuk dan juga perekonomian warga dapat meningkat. selain itu manfaat fisik yang dapat dilihat adalah tidak lagi ada bahaya banjir lagi di Kelurahan Dinoyo karena lumpur yang ada sudah dikeruk dan volume air dapat tertampung secara maksimal.

**d. Perbaikan MCK**

Kegiatan perbaikan MCK ini dilaksanakan di Kelurahan Dinoyo tepatnya di RW IV RT I. Pada awal kegiatan perbaikan MCK ini berjumlah 3 MCK sehubungan dengan lahan yang tidak memungkinkan maka dibangunlah 1 MCK saja. Lahan yang tidak memungkinkan karena jenis tanahnya lembab dan kemungkinan jika dibangun MCK nantinya tanahnya bisa longsor.

Biaya yang dikeluarkan untuk program JPES dalam perbaikan MCK ini juga tidak sedikit yaitu Rp 5.000.000,00. Dengan rincian penggunaan dana dalam hal ini dapat dilihat pada tabel 8 bahwa untuk pembelian bahan yang akan digunakan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 2.150.000,00. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian alat-alat yang digunakan sebesar Rp 100.000,00 dan biaya yang dikeluarkan untuk upah kerja sebesar Rp 2.750.000. Dalam hal ini terlihat bahwa biaya terbesar dikeluarkan adalah upah kerja warga, ini berarti pemberdayaan warga sudah berjalan dengan baik selain memberi pekerjaan walaupun sifatnya sementara warga juga mendapat upah kerja yang dapat membantu perekonomian mereka.

Antusiasme warga juga terlihat dengan keterlibatan warga dengan ikut serta dalam kegiatan perbaikan MCK hal ini terlihat pada tabel 9 bahwa sebanyak 7 orang warga ikut terlibat dan mereka mendapatkan upah kerja masing-masing Rp 385.000,00. Kegiatan perbaikan MCK ini menghabiskan waktu selama 11 hari. Waktu yang dihabiskan lumayan agak lama walau hanya membangun 1 MCK saja. Hal ini dikarenakan warga yang terlibat kurang banyak harusnya ditambahkan pekerja biar pelaksanaan cepat selesai dan langsung dapat dimanfaatkan oleh warga

sekitar.

Dengan adanya MCK ini warga miskin juga terbantu untuk memperoleh prasarana yang memadai untuk mandi dan mencuci pakaian. Tidak lagi di sungai yang kebersihannya kurang terjaga dengan baik. Manfaat lain yang dapat dirasakan oleh warga adalah upah kerja yang diterima juga dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Rupanya dengan adanya program JPES untuk memberdayakan masyarakat perkotaan sangat dirasakan oleh warga. Diharapkan program ini berkelanjutan agar kehidupan perkotaan baik dari fisik maupun ekonomi dapat meningkat.

Dapat disimpulkan dengan adanya pembangunan MCK warga dapat terlibat, dengan adanya keterlibatan warga maka proses pemberdayaan masyarakat sudah terbentuk dan juga perekonomian warga dapat meningkat. selain itu manfaat fisik yang dapat dilihat adalah MCK digunakan warga miskin untuk kebutuhan sehari-hari di Kelurahan Dinoyo.

**e. Perbaikan Saluran Air Dan Plengsengan**

Kegiatan perbaikan saluran air dan plengsengan ini dilaksanakan karena adanya program JPES di Kelurahan Dinoyo tepatnya dilaksanakan di Jl Mt Haryono XIII dekat makam.

Kegiatan perbaikan saluran air dan plengsengan ini menghabiskan dana lumayan banyak yaitu Rp 20.000.000,00 dapat dilihat pada tabel 10 tentang rincian penggunaan dana JPES dalam perbaikan saluran air dan plengsengan. Dana yang digunakan untuk pembelian bahan-bahan bangunan sebesar Rp 8.553.000,00, sedangkan dana yang digunakan untuk membeli alat-alat yang digubakan dalam memperbaiki saluran air dan plengsengan sebesar Rp 227.000,00 dan dana yang dikeluarkan untuk upah kerja warga sebesar Rp 11.220.000,00. Terlihat jelas bahwa upah kerja yang diberikan oleh program JPES lumayan tinggi. Dengan adanya program JPES ini membantu warga tidak hanya secara fisik saja dengan adanya perbaikan saluran air dan plengsengan namun juga membantu

perekonomian warga.

Keikutsertaan warga juga ditunjukkan dengan gotong-royong warga dalam perbaikan saluran air dan plengsengan. Seperti yang terlihat pada tabel 11 dimana sebanyak 18 warga ikut terlibat. Sebanyak 12 warga bekerja selama 18 hari dengan upah kerja masing-masing sebesar Rp 630.000,00 dan yang bekerja selama 17 hari sebanyak 6 orang dengan upah kerja masing-masing orang sebesar Rp 595.000,00.

Saluran air juga perlu dirancang agar kesempatan resapan air ke dalam tanah lebih besar. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan memilih saluran yang berwawasan lingkungan (ecodrainage). Saluran alam lebih mendukung resapan air. Kemiringan dasar saluran atau sungai dibuat sekecil mungkin sehingga kecepatan aliran tidak terlalu besar, dengan cara dibuat tanggul-tanggul (bendung) di dalam saluran atau sungai di bagian hulu.

Disamping peningkatan resapan air ke dalam tanah dan menghambat laju aliran ke sungai, teknologi parit ini juga dapat menampung air untuk sementara waktu dan menahan erosi yang mungkin terjadi di lahan sebelah hulu parit. Dengan demikian sedimentasi di saluran atau sungai di bagian hilir dapat diminimalisasikan. Sedikit sedimen seringkali berarti ada lebih banyak ruang yang dapat dimanfaatkan oleh air dalam sungai/saluran, navigasi yang lebih mudah, biaya pengerukan lebih rendah. Keuntungan lain dari penggunaan dam parit adalah tidak menggunakan lahan produktif dan biaya relatif murah dan terjangkau oleh petani.

Penjelasan Bapak Suwignyo mengenai perbaikan saluran air dan plengsengan sudah cukup jelas bahwa dana yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut cukup banyak mengingat pentingnya perbaikan saluran air dan plengsengan. Waktu yang digunakan untuk memperbaiki saluran air dan plengsengan juga cukup lama yaitu 18 hari kerja. Dalam hal ini perberdayaan masyarakat perkotaan sudah berjalan karena mereka sekarang sudah punya kesibukan kerja dengan upah kerja yang tinggi

sehingga juga dapat membantu perekonomian mereka meskipun bersifat sementara.

Dapat disimpulkan dengan adanya perbaikan saluran air dan plengsengan warga dapat terlibat, dengan adanya keterlibatan warga maka proses pemberdayaan masyarakat sudah terbentuk dan juga perekonomian warga dapat meningkat. selain itu manfaat fisik yang dapat dilihat adalah aliran air menjadi lancar dan juga saluran air jadi terlihat bersih dan rapi di Kelurahan Dinoyo.

#### **f. Pengerukan Sungai Besar**

Kegiatan pengerukan sungai besar ini dilaksanakan karena adanya program JPES di Kelurahan Dinoyo tepatnya dilaksanakan di RW V, IV dan II.

Kegiatan pengerukan sungai besar ini menghabiskan dana lumayan banyak yaitu Rp 10.000.000,00 dapat dilihat pada tabel 12 tentang rincian penggunaan dana JPES dalam pengerukan sungai besar. Dana yang digunakan untuk pembelian bahan-bahan dan alat-alat bangunan sebesar Rp 550.000,00, sedangkan dana yang dikeluarkan untuk upah kerja warga sebesar Rp 9.450.000,00. Terlihat jelas bahwa upah kerja yang diberikan oleh program JPES lumayan tinggi. Dengan adanya program JPES ini membantu warga tidak hanya secara fisik saja dengan adanya pengerukan sungai besar namun juga membantu perekonomian warga.

Keikutsertaan warga juga ditunjukkan dengan gotong-royong warga dalam pengerukan sungai besar. Seperti yang terlihat pada tabel 13 dimana sebanyak 30 warga ikut terlibat. 30 orang warga bekerja selama 9 hari dengan upah kerja masing-masing orang sebesar Rp 315.000,00. antusiasme warga dengan lingkungan pemukiman mereka cukup tinggi mereka berfikir ini adalah kepentingan bersama dengan adanya program JPES ini kawasan pemukiman mereka bisa bebas dari banjir. Rasa kepedulian warga yang melibatkan 3 RW ini sangat tinggi.

Manfaat yang dirasakan penduduk sekitar sungai sangatlah tinggi khususnya RW V, IV, II dimana pemukiman mereka terletak didaerah

sekitar sungai, mereka tidak lagi khawatir adanya banjir di musim penghujan karena dengan adanya pengerukan sungai ini yang tadinya volume air tidak bisa tertampung semua jadi bisa tertampung semua.

Dapat disimpulkan dengan adanya pengerukan sungai besar warga dapat terlibat, dengan adanya keterlibatan warga maka proses pemberdayaan masyarakat sudah terbentuk dan juga perekonomian warga dapat meningkat. Selain itu manfaat fisik yang dapat dilihat adalah tidak lagi ada bahaya banjir karena sungai sudah dikeruk dan volume air dapat tertampung secara maksimal lagi di Kelurahan Dinoyo.

#### **g. Pengerukan Saluran Air**

Pengerukan pengerukan saluran air yang dilaksanakan di Jl Sunan Kalijaga RT VII. Kegiatan pengerukan saluran air ini sangat penting dilakukan karena pada saat itu musim penghujan dan dikawatirkan saluran air meluap dan menyebabkan becek yang dapat merusak jalan.

Kegiatan pengerukan saluran air ini menghabiskan dana sebesar Rp 5.000.000,00 dapat dilihat pada tabel 14 tentang rincian penggunaan dana JPES dalam pengerukan saluran air. Dana yang digunakan untuk pembelian bahan-bahan dan alat-alat bangunan sebesar Rp 240.000,00, sedangkan dana yang dikeluarkan untuk upah kerja warga sebesar Rp 4.760.000,00. Terlihat jelas bahwa upah kerja yang diberikan oleh program JPES lumayan tinggi. Dengan adanya program JPES ini membantu warga tidak hanya secara fisik saja dengan adanya pengerukan saluran air namun juga membantu perekonomian warga.

Keikutsertaan warga juga ditunjukkan dengan gotong-royong warga dalam pengerukan saluran air. Seperti yang terlihat pada tabel 15 dimana sebanyak 28 warga ikut terlibat. Sebanyak 24 orang warga bekerja selama 5 hari dengan upah kerja masing-masing orang sebesar Rp 175.000,00. Sedangkan yang bekerja selama 4 hari sebanyak 4 orang warga dengan upah kerja masing-masing orang sebesar Rp 140.000,00 antusiasme warga dengan lingkungan pemukiman mereka cukup tinggi mereka berfikir ini adalah kepentingan bersama dengan adanya program

JPES ini kawasan pemukiman mereka karena jalan-jalan tidak tergenang air lagi yang dapat .

Kegiatan pengerukan saluran air ini sangat efektif diusulkan oleh Bapak Suwignyo selaku Lurah karena jarang sekali saluran air di bongkar dan dibersihkan dari sampah-sampah. Akibatnya sering sekali saluran air ini meluap kejalan-jalan dan bisa menyebabkan jalan rusak dan bahaya banjir. Dengan adanya kegiatan pengerukan saluran air ini masyarakat berlatih juga mengenai kepedulian mereka terhadap lingkungan pemukiman mereka. Dan juga mereka mendapatkan upah kerja terhadap kepedulian terhadap lingkungan kerja dengan adanya kegiatan pengerukan saluran air ini yang dapat menambah penghasilan mereka.

Dapat disimpulkan dengan adanya pengerukan saluran air warga dapat terlibat, dengan adanya keterlibatan warga maka proses pemberdayaan masyarakat sudah terbentuk dan juga perekonomian warga dapat meningkat. selain itu manfaat fisik yang dapat dilihat adalah tidak lagi ada genangan air dijalan dan juga terlihat rapi dan bersih lagi di Kelurahan Dinoyo.

### **3. Faktor-faktor penghambat dan pendukung terlaksananya program JPES Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru**

#### **a. Faktor penghambat program JPES di Kelurahan Dinoyo**

##### **1) Kualitas SDM yang kurang memadai**

Kualitas SDM orang memang sangat ditentukan oleh pendidikan mereka, jelas terlihat banyaknya remaja di Kelurahan Dinoyo yang berpendidikan minim dan yang mengenyam bangku kuliah hanya sedikit saja. Tidak sepenuhnya semua kualitas SDM dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, selain itu juga keinginan seseorang untuk maju.

Pada program JPES yang dilaksanakan di Keluraha Dinoyo keikutsertaan warga untuk gotong-royong guna peduli dengan lingkungan sekitar mereka sangat diharapkan. Antusiasme warga sangat penting guna berjalannya program JPES ini. Diharapkan remaja di

Kelurahan Dinoyo dapat ikut serta namun kenyataan yang terjadi kebanyakan warga yang sudah berkeluarga yang ikut serta. Jelas sekali terlihat remaja yang masih banyak yang menganggur di kelurahan Dinoyo kurang peduli dengan lingkungan pemukiman mereka. Mungkin karena warga yang sudah berkeluarga ini merasa bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan adanya program JPES ini karena mereka sudah mempunyai tanggung jawab atas istri dan anak-anaknya.

Bapak Dasiran selaku Bendahara pada program JPES yang dilaksanakan di Kelurahan Dinoyo juga berpendapat warga Kelurahan Dinoyo yang terlibat dalam program JPES hanya sedikit kebanyakan mereka gengsi karena menjadi tukang atau kuli. Hal inilah yang membuat derajat ekonomi mereka menurun. Padahal upah kerja yang diberikan pada program JPES ini lumayan tinggi. Hal ini yang menyebabkan proses pemberdayaan masyarakat miskin diperkotaan kurang dapat berjalan dengan lancar.

Senada dengan Bapak Dasiran, Bapak Suwignyo selaku Lurah di Kelurahan Dinoyo berpendapat warga Kelurahan Dinoyo yang bisa berpikiran panjang hanya sedikit orang saja, maka dari itu hanya sedikit warga yang terlibat dalam pelaksanaan program JPES. Selain itu warga yang ikut serta rata-rata mereka juga ikut dalam proyek yang lainnya. Jadi mereka tidak bekerja dalam 1 proyek saja namun juga bekerja di proyek-proyek JPES berikutnya.

Sedikitnya warga yang terlibat dalam pelaksanaan program JPES ini mengakibatkan program JPES mungkin tidak akan berkelanjutan karena program JPES yang berlangsung sekarang ini difokuskan untuk padat karya dimana keikutsertaan warga sangat penting.

Dapat disimpulkan bahwa SDM seseorang sangat berpengaruh pada pola pikirnya. seperti di Kelurahan Dinoyo masih adanya warga yang merasa gengsi untuk mengikuti pelaksanaan program JPES.



## **2. Belum terbentuknya kelompok masyarakat sebagai mitra dari pemerintah**

Pada awal perencanaan program JPES aparat Kelurahan Dinoyo sudah menugasi pada tiap-tiap RT dan RW untuk membentuk suatu kelompok kerja dimana nantinya kelompok kerja tersebut melaksanakan kegiatan yang ada di RT dan RW mereka. Jadi tidak lagi bingung menunjuk siapa saja yang nantinya akan melaksanakannya.

Setelah berbagai kegiatan sudah ditentukan maka akan dilaksanakan dan yang terjadi tidak adanya kelompok kerja yang diharapkan oleh petugas pelaksana JPES Kelurahan Dinoyo. Hal ini mengakibatkan lamanya pelaksanaan program JPES di Kelurahan Dinoyo.

Masyarakat dalam hal pembentukan kelompok kerja terkesan malas dan mungkin juga gengsi mengingat bahwa nantinya kegiatan yang dilaksanakan hampir sama dengan kuli bangunan. Sifat masyarakat perkotaan yang seperti ini yaitu mengutamakan gengsi daripada kesejahteraan hidup mereka berakibat merugikan diri sendiri dan juga lingkungan sekitar mereka tidak layak huni. Misalkan saja jika tidak ada pengerukan sungai seperti pengerukan sungai kecil melintang dan pengerukan sungai besar pasti jalan-jalan yang ada akan tergenang air dan berakibat kerusakan pada jalan.

Dapat disimpulkan bahwa warga di Kelurahan Dinoyo kurang dapat bersosialisasi dengan baik dalam masalah kepedulian lingkungannya. Kurangnya antusiasme dari warga seharusnya dapat dibina dengan diadakan penyuluhan mengenai kepedulian terhadap lingkungan.

### **b. Faktor pendukung program JPES di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru**

#### **1) Masyarakat mendukung dan mau ikut serta dalam program JPES**

Antusiasme warga juga ditunjukkan dengan kesediaan warga mengikuti semua pelaksanaan program JPES di Kelurahan mereka.

Memang banyak warga ada yang beranggapan gengsi untuk menjadi seorang kuli, namun masing banyak warga yang peduli terhadap lingkungan pemukiman mereka.

Meskipun program JPES ini difokuskan pada kegiatan padat karya namun banyak warga yang juga masih mengharapkan perekonomian mereka terbantu. Dengan demikian tidak sedikit warga yang ikut serta terlibat dalam pelaksanaan program JPES ini. Mereka ingin mendapatkan upah kerja yang memadai untuk menyokong perekonomian mereka.

Meskipun banyak pemuda yang bertempat tinggal di Kelurahan Dinoyo tapi mereka enggan untuk ikut serta terlibat dalam kegiatan pada program JPES ini. Maka dari itu yang ikut serta dalam kegiatan ini kebanyakan bapak-bapak yang sudah berumah tangga yang merasa hidupnya kurang tercukupi dalam hal ekonomi. Mereka jauh mempunyai tanggung jawab daripada pemuda yang berada di Kelurahan Dinoyo.

dapat ditarik kesimpulan masyarakat yang ikut serta ini sangat membantu sekali dalam pelaksanaan program JPES. Mereka yang ikut terlibat adalah mereka yang peduli terhadap lingkungan mereka dimana peduli lingkungan itu sangat penting karena menyangkut kepentingan orang banyak.

## **2) Pemerintah turun langsung guna untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Program JPES.**

Selain warga ikut membantu juga faktor pelaksanaan program JPES berlangsung dengan baik karena pemerintah turun langsung guna mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.

Dalam hal ini pemerintah kota Malang melalui Bapekko mengawasi berlansungnya program JPES di semua Kelurahan yang ada di kota Malang. Pengawasan kerja ini sangat perlu sekali karena pada akhirnya antara proposal dan hasil pelaksanaan harus disesuaikan.

Disamping itu pengawasan kerja juga dilakukan agar tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan dana JPES. Di Kelurahan Dinoyo mereka yang mengawasi adalah aparat dari Bapekko dan bekerja sama dengan aparat Kelurahan dimana pelaporan hasil harus rutin dilaporkan.

Selain itu pemerintah kota Malang juga mengambil bukti atas pelaksanaan program JPES di Kelurahan Dinoyo dengan cara memfoto kegiatan yang dilakukan. Foto sebelum diadakannya program JPES dan foto setelah diadakannya program JPES. Hal ini dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban saat program JPES sudah dilaksanakan.

dapat disimpulkan bahwa dengan pemerintah daerah tidak hanya diam saja, namun juga ikut serta terlibat dalam hal pengawasan program JPES di Kelurahan Dinoyo.



## BAB V PENUTUP

Guna melengkapi tulisan ini maka peneliti pada penulisan selanjutnya membuat kesimpulan beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan terdahulu dan merekomendasikan suatu saran-saran sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Kemiskinan merupakan masalah klasik yang selalu dihadapi oleh manusia karena melibatkan seluruh aspek kehidupan, walaupun seringkali kehadirannya sering tidak disadari sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan kondisi yang nyata yang ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan.

Seperti kemiskinan yang ada di Kota Malang khususnya di Kelurahan Dinoyo dengan adanya program JPES perekonomian warga sedikit meningkat. Pada tahap perencanaan program JPES memfokuskan atau cenderung pada kegiatan padat karya namun pada pelaksanaannya program padat karya tersebut juga dapat meningkatkan perekonomian warga di Kelurahan Dinoyo, misalkan dengan adanya upah kerja yang diterima untuk warga yang ikut terlibat dalam kegiatan pada program JPES padat karya.

2. Dari hasil penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian yang telah dibahas, maka kegiatan-kegiatan pada program JPES di Kelurahan Dinoyo sudah berjalan dengan baik. Ada 7 kegiatan yang dari program JPES di Kelurahan Dinoyo diantaranya pavingisasi dan pembuatan gorong-gorong, pembangunan plengsengan sungai, pengerukan sungai kecil melintang, perbaikan MCK, perbaikan saluran air dan plengsengan, pengerukan sungai besar dan pengerukan saluran air. Dari ketujuh kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Warga di Kelurahan Dinoyo juga antusias untuk turut serta dalam kegiatan pada Program JPES. Mereka peduli dengan lingkungan yang mereka tempati,

Terlihat jelas bahwa proses pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan sudah berjalan di Kelurahan Dinoyo. Masyarakat ikut serta dengan adanya program JPES, diharapkan dengan adanya program JPES ini masyarakat miskin yang menganggur dapat diberdayakan dan juga mereka mendapat upah kerja yang bisa membantu perekonomian mereka. Dengan adanya upah kerja dapat dilihat bahwa proses peningkatan ekonomi dari program JPES sudah berjalan dengan baik. Proses pemberdayaan ekonomi dan sosial di Kelurahan Dinoyo dengan adanya program JPES sudah berjalan dengan baik.

3. Faktor-faktor yang menghambat dalam program JPES misalnya dengan kualitas SDM yang kurang memadai dan juga belum terbentuknya kelompok dari masyarakat sebagai mitra dari pemerintah, merupakan suatu faktor yang dapat menghambat pada pelaksanaan program JPES di Kelurahan Dinoyo. Namun faktor penghambat tersebut sudah dapat teratasi dengan adanya penyuluhan mengenai pentingnya program JPES dalam pengentasan kemiskinan di perkotaan.

SDM sangat mempengaruhi cara pandang orang, termasuk juga masyarakat Kelurahan Dinoyo yang tidak antusias dikarenakan gengsi untuk ikut serta dalam program JPES di Kelurahan Dinoyo. Padahal jika dilihat tingkat ekonomi masyarakat, di Kelurahan Dinoyo masih banyak yang ekonomi menengah ke bawah. Diharapkan cara pandang mereka dapat berubah, supaya tingkat ekonomi mereka juga meningkat dengan adanya program JPES di Kelurahan Dinoyo.

Sedangkan faktor pendukung terlaksananya program JPES di Kelurahan Dinoyo ada 2 diantaranya masyarakat mendukung dan mau ikut serta dalam pelaksanaan program JPES dan juga pemerintah turun langsung guna untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan program JPES. kedua faktor pendukung tersebut sangat membantu pelaksanaan program JPES di Kelurahan Dinoyo dengan keikutsertaan warga maka proses pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan sudah berjalan. Dengan adanya pengawasan dari pihak Bapekko maka pihak

Kelurahan Dinoyo dalam pelaksanaan program JPES dapat lebih maksimal dan juga penggunaan dana dapat tersalur dengan baik.

## **B. Saran**

1. Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi program JPES yang dilaksanakan di Kelurahan Dinoyo maka sebaiknya di maksimalkan terutama pada tahapan perencanaan karena nantinya tahapan perencanaan ini menentukan pada tahapan pelaksanaan dan juga evaluasi pada hasil program JPES.
2. Ketujuh kegiatan dalam program JPES yang dilaksanakan di Kelurahan Dinoyo memang sudah berjalan dengan baik namun pihak dari Kelurahan Dinoyo seharusnya lebih mengorganisir siapa saja yang ikut serta dalam proses pengerjaan agar tidak ada lagi warga yang ikut dalam 2 kegiatan atau merangkap. Diharapkan semua warga miskin dapat diberdayakan secara merata. Dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat dan juga faktor pendukung bisa dijadikan masukan untuk dapat memaksimalkan jika program JPES nantinya berkelanjutan.
3. Untuk pengembangannya kedepan program JPES diharapkan berkelanjutan dan harus lebih mengarah pada ekonomi masyarakat misalkan dengan adanya pinjaman uang untuk warga miskin guna membuka usaha untuk meningkatkan ekonominya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:

Adisasmita, HR. 2005. *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta. Penerbit Graha Ilmu

Hikmat, Hary. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. Humaniora Utama Press.

Islami, M. Irfan. 2003. *Dasar-Dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik*. Malang: Prpgram Studi Ilmu Administrasi program Paska Sarjana Universitas Brawijaya.

Mansyur, MC. 1977. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya. Penerbit Usaha Nasional

Moleong, LJ. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.

Muluk, M. R. Kh. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publisng

Nugroho, Trilaksono. 2007. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang. FIA UNIBRAW.

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.

Siagian, SP. 1976. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Soetrisno, R. 2002. *Administrator Dalam Pengentasan Kemiskinan*. Nganjuk. Penerbit Yayasan Sandang

Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.

Thoha, Miftah. 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## Perundang-undangan:

Berita Resmi Statistik BPS No. 37/07/Th. XI, 1 Juli 2008

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/6496/022/2008

Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 188/1997/022/2008

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Internet:

----- “Tujuan Program JPES”. Diakses tanggal 13 Maret 2009 pukul 11.00 WIB di <http://www.Probolinggo.go.id>

-----”Sejarah Pemerintahan Kota Malang” Diakses tanggal 20 Maret pukul 19.00 WIB di <http://www.malanhkota.go.id>

----- “ Konsep Pemberdayaan Masyarakat” Dakses tanggal 26 Maret 2009 pukul 21.00 WIB di <http://fiqhsantoso.wordpress.com>.

-----“Bentuk Pemberdayaan Masyarakat”. Diakses pada tanggal 26 Maret 2009 pukul 22.00 WIB di [ttp://fasilitator-masyarakat.org](http://fasilitator-masyarakat.org)

-----“Kemiskinan di Perkotaan”.Diakses pada tanggal 26 Maret 2009 pukul 22.00 WIB di <http://www.appropriateeconomics.org>.





# Pavingisasi dan menutup drainase di RW III dan RW V Kelurahan Dinoyo



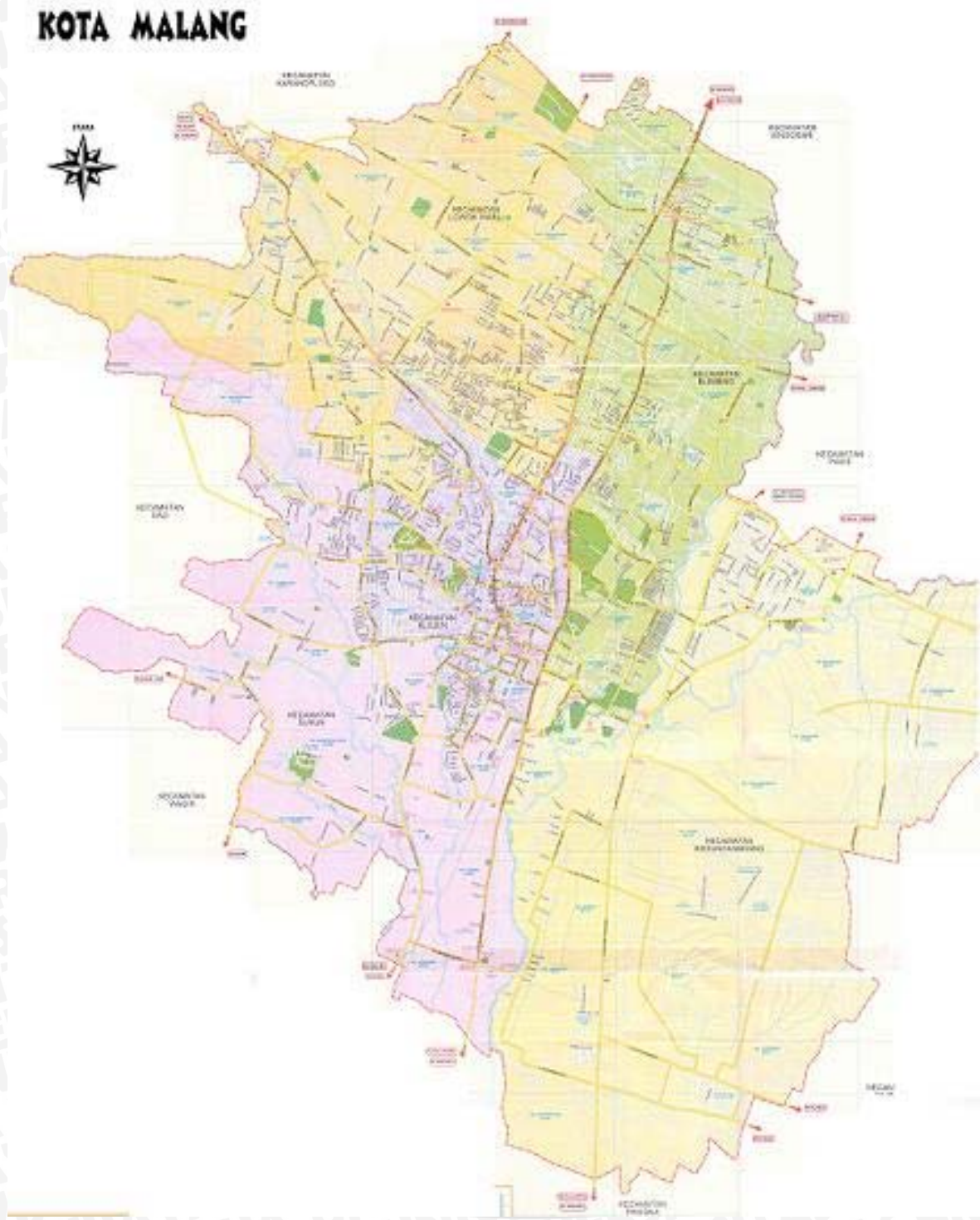
## Pembuatan plengsengan di RW IV dan RW VI Kelurahan Dinoyo



### Pembuatan gorong – gorong di RW III



### Peta Kota Malang



## **Apa itu JPES ?**

- ❖ Jaringan Pengaman Ekonomi Sosial, yang merupakan salah satu program kemiskinan Jawa Timur, yang pelaksanaan kegiatan dikelola oleh Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) tidak boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga.

## **Dasar Hukum :**

1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/6496/022/2008 tentang Alokasi Dana Bantuan Sosial Program JPES Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 ;
2. Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur selaku Pengguna Anggaran Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 188/8631022/2008 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial Program Jaringan Pengaman Ekonomi Dan Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 ;
3. Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/207/35.73.112/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Jaringan Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) Kota Malang Tahun Anggaran 2008 ;
4. Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/233/35.73.112/2008 tentang Penetapan Lokasi dan alokasi dana Program JPES Bidang Padat Karya Dana Sharing APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2008;
5. Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/234/35.73.112/2008 tentang Koordinator Pendamping dan Kelompok Keluarga Miskin Program Jaringan Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) Kota Malang Tahun Anggaran 2008 ;

## **Maksud dan Tujuan JPES adalah :**

- Penanggulangan kemiskinan dengan Pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat miskin.
- Meringankan beban keluarga miskin.
- Menciptakan lapangan pekerjaan.
- Mendorong pembangunan fasilitas publik yang bermanfaat langsung bagi penduduk miskin.
- Menumbuh kembangkan kembali solidaritas dan daya kohesi sosial masyarakat agar dapat bekerja sama untuk meningkatkan keberdayaan dan tingkat kesejahteraannya.

## **Latar Belakang JPES**

Program JPES tahun 2008 ini merupakan penyempurnaan dari program PAM-DKB tahun 2006 dan Program JPES Tahun 2007,

Berbagi keberhasilan pembangunan di Jawa Timur ternyata masih juga belum sepenuhnya menghapus masalah kemiskinan. Menurut data BPS Propinsi Jawa Timur, persentase penduduk miskin kategori 2 dan 3 tahun 2006 tercatat sebesar 19,89 persen atau sebesar 7.455.655 jiwa. Bahkan, yang memprihatinkan akibat inflasi, kondisi perekonomian yang fluktuatif dan melambungnya harga pangan dan barang kebutuhan sehari-hari, tekanan hidup yang dialami keluarga miskin dalam satu-dua tahun terakhir cenderung makin berat, terkait dengan hal tersebut Pemerintah meluncurkan Program PAM-DKB 2006, JPES 2007 dan JPES Tahun 2008.

## Ruang Lingkup Kegiatan

Program JPES Tahun 2008 baik dari APBD Propinsi dan Kota difokuskan pada pola kegiatan **Padat Karya**.

Pilihan sub kegiatan Padat Karya ditentukan melalui musyawarah Pokgakin di wilayah Kelurahan masing-masing dengan Berita Acara Musyawarah Pokgakin.

## Organisasi Pelaksanaan

1. Tingkat Propinsi (Ketua Penyelenggara JPES Propinsi Jatim)
2. Tingkat Kota (Tim Koordinasi Kota Malang)
3. Tingkat Kecamatan (Tim Koordinasi Kecamatan)
4. Tingkat Kelurahan (Tim Koordinasi Kelurahan)

## Sasaran dan Target

Keluarga Miskin (Gakin) yang terhimpun di dalam Kelompok Gakin (Pokgakin) di Kelurahan-kelurahan.

## Kriteria Anggota Kelompok Gakin (Pokgakin)

Adalah warga termiskin dari masyarakat miskin di kelurahan setempat dengan acuan data BPS Tahun 2006 yang belum pernah menerima manfaat PAM-DKB Tahun 2006 dan JPES 2007 dengan sasaran diutamakan kepada :

1. Penduduk miskin produktif (pada umumnya usia kerja 19-55 tahun).
2. Buruh (buruh tani, buruh nelayan, buruh industri kecil, dan lain-lain).
3. Perempuan miskin produktif yang tidak mempunyai penghasilan.

Jumlah Pokgakin ditiap kelurahan harus satu dengan susunan kepengurusan minimal (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang disahkan dengan Keputusan Lurah).

Adapun **Sub Pokgakin** ditiap Kelurahan boleh lebih dari satu.

## Bagaimana mekanisme dan syarat Penyaluran dana ?

1. Untuk APBD Propinsi dibagi menjadi 2 tahap (Tahap I, 50% dengan syarat memenuhi kelengkapan Proposal Langsung ke rekening Pokgakin dan Tahap II, 50% melalui Tim Koordinasi Kota = Bappeko dengan syarat minimal setor SPJ minimal 30%).
2. Untuk APBD Kota ditransfer 100% (satu tahap) melalui rekening masing-masing Pokgakin, dengan syarat memenuhi kelengkapan administrasi kelengkapan proposal.

## Syarat pengajuan Pokgakin Tahap I bagi APBD Propinsi :

- a. Kuitansi asli (bukan fotocopy) rangkap 4 (empat), 1 (satu) lembar bermeterai 6.000,- yang ditandatangani Ketua dan Bendahara Pokgakin;
- b. Foto copy rekening SIKLUS Bank Jatim rangkap 4 (empat) atas nama "JPES...(Kelurahan)...(Nama Pokmas)" contoh : "JPES Bareng Mawar" dengan slip pengambilan dana 2 orang (ketua dan bendahara);
- c. Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara Pokgakin masing-masing rangkap 4 (empat);

- d. Proposal usulan kegiatan rangkap 4 (empat) yang asli satu yang berisikan :
  - Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur Jawa Timur cq. Biro Keuangan yang ditandatangani oleh Ketua Pokgakin mengetahui Lurah;
  - Susunan keanggotaan Pokgakin yang ditandatangani oleh Ketua Pokgakin mengetahui Lurah;
  - Dokumentasi (foto 0% lokasi kegiatan JPES);
  - Desain gambar sederhana;
  - Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Ketua Pokgakin mengetahui Lurah (sesuai Form 2);
  - Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan.

**Adapun syarat pengajuan Pokgakin bagi APBD Kota = (sama dengan) syarat pengajuan Pokgakin APBD Propinsi tahap I.**

Hasil penelitian direkap menjadi usulan Camat dan dikirim ke Walikota melalui Tim Koordinasi Kota (Bappeko) dengan **Form-3** dengan dilengkapi dokumen yang sudah diteliti.

**Syarat pengajuan Pokgakin Tahap II bagi APBD Propinsi :**

- a. Kuitansi asli (bukan fotocopy) rangkap 4 (empat), 1 (satu) lembar bermeterai 6.000,- yang ditandatangani Ketua dan Bendahara Pokgakin;
- b. Foto copy rekening SIKLUS Bank Jatim rangkap 4 (empat) atas nama “JPES...(Kelurahan)...(Nama Pokmas)” contoh : “JPES Bareng Mawar” dengan slip pengambilan dana 2 orang (ketua dan bendahara);
- c. Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara Pokgakin masing-masing rangkap 4 (empat);
- d. Laporan kemajuan fisik dan keuangan Tahap I minimal 30% yang ditandatangani oleh Ketua Pokgakin dan diketahui oleh Pendamping Pokgakin dan Lurah;
- e. Rencana RAB Tahap II;
- f. Surat Pengajuan dari Tim Koordinasi diketahui oleh Walikota Malang.

**Pengelolaan Kegiatan :**

Tahapan kegiatan :

- a) Persiapan / Perencanaan.
- b) Pelaksanaan.
- c) Penyaluran dana.
- d) Pertanggung jawaban.
- e) Pelestarian.

**Prinsip Dasar Pengelolaan :**

**AKSEPTABEL**, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antar pelaku, sehingga memperoleh dukungan semua pihak.

**TRANSPARAN**, dilakukan secara terbuka, sehingga dapat terkendali dan terwujud.

**AKUNTABEL**, harus dapat dipertanggung jawabkan secara struktural dan sosial kepada masyarakat.

**KETERPADUAN**, harus dapat dipertanggung jawabkan secara struktural dan sosial kepada masyarakat.

**KEBERLANJUTAN**, memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan dan jangka panjang.

### **Pembukaan & Penutupan REKENING SIKLUS ?**

#### Syarat-syarat Pembukaan rekening

- Mengisi Formulir Bank Jatim yang ditandatangani 2 orang (Ketua+Bendahara).
- Fotocopy KTP (Ketua+Bendahara) yang masih berlaku.
- SK Pokgakin.
- Surat Pengantar Pembukaan rekening dari Kelurahan.

#### Syarat-syarat Penutupan rekening

- Mengisi Formulir Bank Jatim
- Foto copy KTP (Ketua+Bendahara) yang masih berlaku
- Buku Tabungan Siklus asli diserahkan
- Surat Pengantar Penutupan rekening dari Kelurahan

